ISSN 2442-7845
e ISSN 2620-3332
ojs.selodangmayang.com

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

DESAIN EKOWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUNGAI LUAR KAB INDRAGIRI HILIR RIAU
Oleh : Siti Wardah,Rahmadi Siswanto, Yuliana1,Muhammad Cholid, Juli Nurohman

BUSSINES MODEL CANVAS UNTUK PROGRAM HILIRISASI INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENINGKATAN PAD
Oleh : Rizki Kinanda, M. Gasali M, Akbar Alfa, Endi Sudeska

IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Oleh : Yulianti, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, KMS. Novyar Satriawan Fikri

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI RIAU
Oleh : Nelva Siskawati, Widyawati

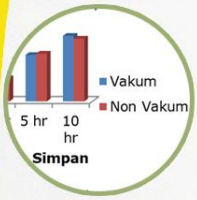

PENGARUH LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU 50C TERHADAP KUALITAS FISH BALL PATIN PADA KEMASAN VAKUM DAN NONVAKUM
Oleh : Monalisa Hasibuan, Zulkarnain, Tengku Marlina Cahyani, Suradi

STUDI POTENSI PAJAK RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS
Oleh : Syafrizal Thaher DS, Roberta Zulfhi Surya, Novrizal Nur

PEMBINAAN KECAMATAN KINERJA PERINGKAT TERENDAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Oleh : Ismal, Ardiansah, Sudi Fahmi

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Oleh : Fitri Wahyuni, Yaswirman, Nilma Suryani

PEMANFAATAN KELAPA BUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF USAHA PENGOLAHAN KOPRA ASALAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING
Oleh : Triyana Syahfitri, Annisa Alwahidah, Khairul, Nurhayati1,Rahma Fadila

POTENSI SAGU (METROXYLON SP.) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU
Oleh : Syartiwidya

Volume 9, Nomor 1, April 2023

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

ISSN 2442 – 7845
E ISSN 2620 – 3332

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Volume 9 Nomor 1 April 2023

Penanggung Jawab
KEPALA BAPPEDA KAB. INHIL
SEKRETARIS BAPPEDA KAB. INHIL
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KAB. INHIL

Redaktur (Journal Manager)
Roberta Zulfhi Surya, ST., MT

Redaktur Pelaksana
Taufan Marala
Rosmiar,SE

Penyunting/Editor (Chief Editor)
Akbar Alfa, ST, MT

Penyunting/Editor
DR. Alvi Furwanti Alwie, SE, MM
DR. Edi Susrianto Indra Putra, S.Pd, M.Pd
DR. Erniati, ST, MT
DR. H. Najamuddin, Lc. MA
H. M. Aras, SH, MH, Ph.D
DR. Mulono Apriyanto, Tp. MP
Haryati Astuti, M.Kes
Bayu Fajar Susanto, SE
Andriansyah, S.Pd, M.Pd

Administrasi
Yurnalis, S.Pd
Eva Susanti, SE
M. Rizki Six Marganda
Dhelta Hary Kusuma, S.Pd
Mardian Rahman, S.SI
Robi Alka, S.Pd
Ahmad Sayuti

Design Grafis
Romi Saputra, S.Kom
Safriyadi, S.Sos

Alamat Redaksi
Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Jalan Akasia Nomor 02 Tembilahan, Telp. 21071-23777 Fax (0768)22573
e-mail : selodangmayang@yahoo.co.id, bappedalitbanginhil@gmail.com dan roberthazulfhi@yahoo.co.id
Pertama Terbit : April 2015
Frekuensi Terbit: Tiga kali setahun, setiap bulan April, April dan Desember

ISSN 2442 - 7845
E ISSN 2620 - 3332

SELODANG MAYANG
Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Volume 9, Nomor 1, April 2023

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, wa syukrillah, Jurnal Selodang Mayang Volume 9 Nomor 1 Bulan April 2023 yang merupakan edisi pertama tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Tim Redaksi menyajikan 10 (Sepuluh) karya tulis ilmiah yang mengangkat karya tulis ilmiah hasil penelitian maupun kajian berbagai perguruan tinggi, lembaga dan perorangan, serta jurnal-jurnal kajian yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan perannya dalam penerbitan jurnal Selodang Mayang ini. Masukan dan saran senantiasa kami harapkan dalam upaya melengkapi dan menyempurnakan penerbitan jurnal Selodang Mayang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di masa yang akan datang.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi serta informasi bagi pembaca, untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Terima kasih.

Dewan Redaksi

ISSN 2442-7845
E ISSN 2620-3330

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Volume 9 Nomor 1 April 2023

DAFTAR ISI

Judul Artikel **Halaman**

1. **DESAIN EKOWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUNGAI LUAR KAB INDRAGIRI HILIR RIAU**
   Siti Wardah,Rahmadi Siswanto, Yuliana,Muhammad Cholid, Juli Nurohman..... 1-6

2. **BUSSINES MODEL CANVAS UNTUK PROGRAM HILIRISASI INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENINGKATAN PAD**
   Rizki Kinanda, M. Gasali M, Akbar Alfa, Endi Sudeska 7-15

3. **IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
   Yulianti, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, KMS. Novyar Satriawan Fikri 16-24

4. **PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI RIAU**
   Nelva Siskawati, Widyawati 25-30

5. **PENGARUH LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU 50C TERHADAP KUALITAS FISH BALL PATIN PADA KEMASAN VAKUM DAN NONVAKUM**
   Monalisa Hasibuan, Zulkarnain, Tengku Marlina Cahyani, Suradi..... 31-37

6. **STUDI POTENSI PAJAK RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS**
   Syafrizal Thaher DS, Roberta Zulfhi Surya, Novrizal Nur..... 38-53

7. **PEMBINAAN KECAMATAN KINERJA PERINGKAT TERENDAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
   Ismal', Ardiansah, Sudi Fahmi 54-62

8. **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
   Fitri Wahyuni, Yaswirman, Nilma Suryani..... 63-70

9. **PEMANFAATAN KELAPA BUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF USAHA PENGOLAHAN KOPRA ASALAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING**
   Triyana Syahfitri, Annisa Alwahidah, Khairul, Nurhayati[1],Rahma Fadila 71-76

10. **POTENSI SAGU (METROXYLON SP.) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU**
    Syartiwidya..... 77-84

DESAIN EKOWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUNGAI LUAR KAB INDRAGIRI HILIR RIAU

Siti Wardah[1],Rahmadi Siswanto[1], Yuliana[1],Muhammad Cholid[1], Juli Nurohman[1]
Universitas Islam Indragiri[1]

Email: sitiwardahst@yahoo.co.id (Korespdensi)

Abstract

Currently, the community is recovering after Covid-19 which hit several years ago. Not only in all aspects of human life but also in the world of health, because almost all aspects of human life are paralyzed, especially in the economic sector. Sungai Luar Village has eco-tourism potential that can be one of the natural resources, natural and cultural uniqueness, and potential to become one of the primary undeveloped sectors so that it is expected to be able to improve the welfare of local communities which has an impact on increasing Regional Original Revenue (PAD). Ecotourism design focuses on being divided into two main parts, in terms of infrastructure and promotion through social media. In terms of infrastructure, it focuses on the construction of road access to the location of the tourist attraction. As for promotional media, it focuses on introduction through social media such as websites, posters, and advertising videos. It is hoped that this ecotourism design can improve and help economic recovery and increase the PAD of Indragiri Hilir Regency, Riau.

Keywords: *Design, Ecotourism, Economic Recovery, Covid-19, Regional Original Revenue*

Abstrak

Saat ini masyarakat sedang dalam pemulihan pasca Covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu. Tidak hanya dalam segala aspek kehidupan manusia tetapi juga dalam dunia kesehatan, Karena hampir semua bagian kehidupan manusia mengalami kelumpuhan, terutama dalam bidang perekonomian. Desa sungai luar memiliki potensi ekowisata yang dapat menjadi salah satu sumber daya alam, keunikan alam dan budaya, serta berpotensi menjadi salah satu sektor utama yang belum berkembang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desain ekowisata berfokus dibagi menjadi dua bagian utama, dari segi infrastruktur dan promosi melalui media sosial. Dari segi infrastruktur berfokus kepada pembangunan akses jalan menuju lokasi objek wisata. Sedangkan untuk media promosi berfokus pada pengenalan melalui media sosial seperti website, poster, dan video iklan. Diharapkan dengan adanya desain ekowisata ini dapat meningkatkan serta membantu pemulihan ekonomi dan meningkatkan PAD Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Kata kunci:*Desain, Ekowisata, Pemulihan Ekonomi, Covid-19, Pendapatan Asli Daerah*

1. PENDAHULUAN

Seperti yang sudah kita diketahui, virus corona atau yang sering kita kenal dengan Covid-19 pertama kali muncul pada awal Desember 2019 di China. Negara yang sudah kuat terpapar Covid-19 adalah Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia. Virus ini semakin menyebar dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus virus tersebut pada 2 Maret. Saat itu, Presiden Jokowi langsung mengumumkan ada 2 orang yang terjangkit virus Corona di Indonesia.

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) tahun 2020, virus baru ini dikenal dengan sebutan Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV2) dan nama penyakitnya adalah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Saat ini masyarakat sedang dalam pemulihan pasca Covid-19 yang melanda

beberapa tahun lalu. Wabah virus corona (Covid-19) memiliki dampak yang sangat kompleks, merasuk ke setiap aspek kehidupan manusia, tidak hanya dunia kesehatan. Terutama dalam bidang perekonomian. Bukan hanya Indonesia tapi hampir seluruh dunia merasakannya.

Desa sungai luar yang memiliki luas ± 69 km2 dahulunya merupakan daerah yang penuh dengan semak-semak belukar, walaupun demikian mereka terus melanjutkan rintisan sehingga mereka berhasil membangun daerah ini sebagai lahan perkebunan atau pesawahan serta tempat pemungkiman penduduk yang terutama bagi keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka pada waktu itu mereka menamakan daerah ini dengan nama Sungai Luar dan terus menerus berkembang hingga anak cucu mereka, pada akhirnya daerah ini dimekarkan pada tahun 1940.an maka sejak itu desa dinamakn Desa Sungai Luar sampai sekarang ini.

Desa sungai luar dibangun pada tahun 1930 an disebut sungai luar karena berasal dari sungai kecil dan alur sungai terdiri dari beberapa perintis. Pada saat itu berkumpulah sekelompok orang yang membangun/membuka parit-parit didesa sebatu, tanjung siantartasik raya, sungai rawa, simpang jaya.

(Baharuddin, 2022-2027) Perbatasan Wilayah Desa Sungai Luar adalah disebelah Utara Desa Sungai Dusun, disebelah Selatan Kelurahan Sungai Beringin, disebelah Barat Desa Simpang Jaya, dan disebelah Timur Desa Sungai Dusun. Dengan luas wilayah pemukiman 350 ha, pertanian/perkebunan 6.538,5 ha, kebun kas Desa 4 ha, Perkantoran 0,25 ha, sekolah 1 ha, jalan 5 ha, dan lapangan bola kaki dan bola volley 1 ha. Untuk jumlah penduduk Desa Sungai Luar ada 1.094 KK. Dengan laki-laki 1.977 jiwa dan perempuan 1.943 jiwa. Jadi jumlah total penduduk Desa Sungai Luar adalah 3.920 jiwa. Dengan letak Geografis Desa sungai luar tersebut, menjadikan Desa ini berpotensi dalam pengembangan dibidang Pariwisata. Salah satunya dengan adanya Ekowisata Kolam Pemancingan.

Ekowisata adalah sumber daya alam, potensi lingkungan, keunikan alam dan budaya, serta berpotensi menjadi salah satu sektor utama di daerah yang belum dikembangkan secara optimal, diharapkan mampu mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Pynanjung & Rianti, 2018). Oleh sebab itu, kegiatan ekowisata memberikan akses langsung bagi semua orang untuk belajar, melihat, dan menikmati pengalaman alam, dan budaya masyarakat lokal. Selanjutnya Tyas & Damayanti dalam Damanik (2018: 76), mengemukakan bahwa pengembangan desa wisata pada dasarnya dilakukan dengan berbasis pada potensi yang dimiliki masyarakat pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan desa wisata dapat mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi berbasis masyarakat seperti kerajinan, jasa, dan lain-lain. Masitah (2019: 47) menyebutkan calon wisatawan tidak mendapat informasi yang baik tentang wisata, sehingga semenarik apa pun suatu destinasi, jika tidak disertai dengan iklan yang efektif dan terarah, akan gagal untuk menarik minat calon wisatawan. Pemasaran pariwisata sangat penting karena Anda dapat mempromosikan wisata di desa tersebut.

Dengan keberadaan Ekowisata kolam pemancingan tersebut dibutuhkan Desain Ekowisata Di Desa Sungai Luar agar membuat Desa Sungai Luar lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama di era modern saat ini. Banyaknya peminat dan antusias dari masyarakat menjadikan salah satu faktor pendukung dari berkembangnya wisata tersebut. Di sisi lain, kegiatan memancing ini merupakan hobi yang tak pernah surut. Untuk mengisi waktu senggang maupun dijadikan momen kegiatan untuk berlibur dengan keluarga, seperti kegiatan memancing ini sangat cocok untuk dijadikan alternatif bagi para wisatawan sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat desa sungai luar kecamatan batang tuaka Pasca Pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Ekowisata

Istilah ekowisata mulai diperkenalkan oleh Ceballos-Lascuráin (1996) yang menyatakan bahwa ekowisata adalah perjalanan ke lokasi-lokasi alami yang terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari alam dan budaya penduduk setempat. Selain itu beberapa pakar mendefinisikan ekowisata yang masing-masing meninjau dari pendapat berbeda. Ekowisata secara umum didefinisikan sebagai perjalanan ke daerah yang masih asli untuk menikmati pemandangan dan satwa liar (Boo 1990), diasumsikan memiliki sedikit atau tidak ada dampak lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi dalam menjaga integritas budaya masyarakat lokal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pengembangan Pariwisata Daerah, ekowisata dapat dibagi menjadi empat jenis: ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan ekowisata karst. Namun pada kenyataannya terdapat banyak jenis ekowisata yang berbasis ekologi alam dan budaya. Ini adalah ekowisata taman nasional, ekowisata ekogeografis, ekowisata pedesaan, ekowisata kuliner, dan ekowisata spiritual.

2.2 Desain Kawasan

Desain kawasan merupakan metode yang mencakup sejumlah kata kunci seperti prosedur, pengaturan yang sistematis atau teratur bersama dengan gagasan tentang tujuan yang didefinisikan dengan jelas sebagai produk akhir. Desain kawasan bertujuan agar suatu pembangunan dapat berkelanjutan. Ada tiga tujuan utama desain yaitu untuk merancang dan membangun perkembangan yang baik secara struktural dan fungsional di saat yang sama memberikan kesenangan kepada mereka yang melihat perkembangan. Desain juga menunjukkan seni, arsitektur, selain itu, desain juga harus memiliki daya tahan dan mampu memberikan rasa kesejahteraan serta kepuasan emosional (Moughtin et al. 1999).

2.3 Infrastruktur

Infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekowisata dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu: infrastruktur keras dan insfrastruktur lunak. Infrastruktur keras terdiri dari pembuatan akses jalan, saluran listrik dan air, gedung informasi, pos keamanan, pos retribusi tiket masuk, fasilitas penginapan, dan warung makan. Sedangkan infrastruktur lunak meliputi media informasi (brosur, papan informasi, petunjuk jalan) dan media komunikasi (jaringan komunikasi dan internet).

2.4 Perencanaan

Perencanaan pembangunan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atau pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada di suatu daerah, seperti desa, daerah, atau negara. Perencanaan partisipatif adalah strategi pembangunan, suatu proses pengambilan keputusan publik yang sangat tergantung pada persepsi publik tentang keinginan mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan (Akbar et al., 2018).

2.5 Pendapatan Asal Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki strategi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku instansi yang berhubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merumuskan kebijakan baru yang memungkinkan terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hili

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah harus lebih terfokus pada Penyediaan sarana dan prasarana penunjang, agar mampu memaksimalkan kinerja Peningkatan PAD Kabupaten Indragiri Hilir.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pelaksanaan yang kami lakukan antara lain Interaksi dan koordinasi yang meliputi wawancara dan observasi. Maksud dari metode yang kami lakukan ini membuat masyarakat Desa Sungai Luar dapat berpartisipasi dalam kegiatan kami, yang nantinya dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana desain ekowisata Desa Sungai Luar dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemic Covid-19.

1. Waktu dan Tempat Penelitian
   Peneltian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu sejak bulan Agustus sampai bulan September 2022, yaitu selama kegiatan KKN UNISI berlangsung di Desa Sungai Luar. Lokasi penelitian adalah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Metode Pengumpulan Data
   Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yakni masyarakat dengan wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dalam penelitian ini.

3. Konsep Pengukuran Variabel
   Variabel yang akan di ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Infrastruktur dan fasilitas akses menuju daerah ekowisata

b. b.Strategi promosi daerah ekowisata

4. Metode Analisis Data
   Untuk tujuan penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Melalui metode deskriptif, penulis memaparkan secara sistematis apa yang terjadi di lapangan. Metode penulisan ini membantu penulis untuk memahami hubungan antara fenomena yang diteliti, memungkinkan mereka untuk secara sistematis memahami apaIyang sebenarnya terjadi di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Desain Pengenalan objek wisata

Salah satu hal yang terpenting dalam desain ekowisata adalah mendesain media untuk pengenalan objek Ekowisata kolam pemancingan di desa sungai luar. Diharapkan dengan desain media tersebut dapat menarik minat wisatawan lokal maupun internasional. Konsep pesan yang akan disampaikan melalui Website dan poster online yang berisi informasi dan profil tempat wisata kolam pemancingan. sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi serta dapat berkomunikasi baik dengan pelaku ekowisata. Selain itu adanya pelatihan tentang cara mempromosikan wisata Sungai Luar melalui media sosial dalam bentuk promosi media sosial, diantaranya membuat poster, video, iklan, dan website seperti pada Gambar 1, sehingga meningkatkan daya Tarik dan dikenal oleh calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat Ekowisata tersebut.

Gambar 1. Desain Pengenalan objek wisata

4.2. Desain Infrastruktur jalan

Selain desain pengenalan objek wisata, hal yang terpenting juga adalah desain infrastruktur jalan. Desain infrastruktur jalan adalah menentukan jenis struktur perkerasan jalan yang sesuai dengan kondisi tanah dilokasi tersebut.

a. Pemilihan Jenis Struktur Perkerasan

Pada umumnya struktur perkerasan terbagi menjadi struktur perkerasan lentur (aspal) dan struktur perkerasan kaku (beton).

Jenis struktur perkerasan yang diterapkan dalam desain struktur perkerasan terdiri atas:

1) Struktur perkerasan pada permukaan tanah asli.
2) Struktur perkerasan pada timbunan.
3) Struktur Perkerasan pada galian.

Tipikal struktur perkerasan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

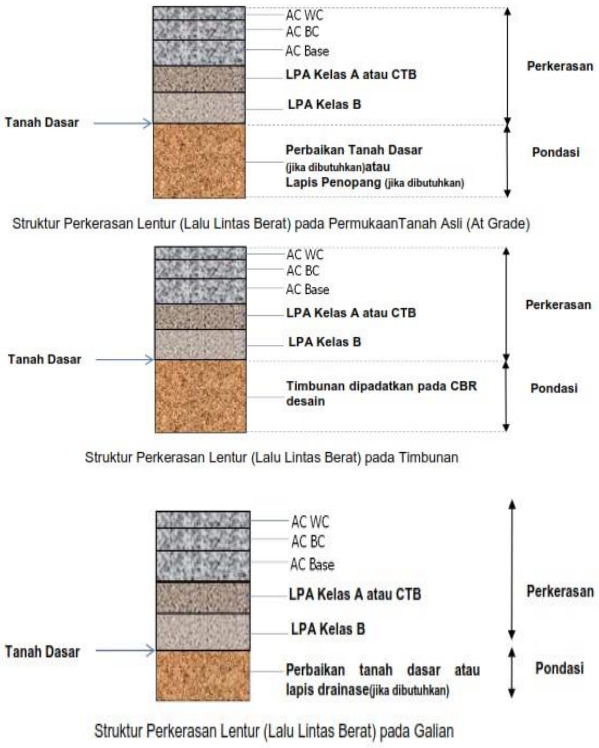

Gambar 2. Komponen Struktur Perkerasan Lentur

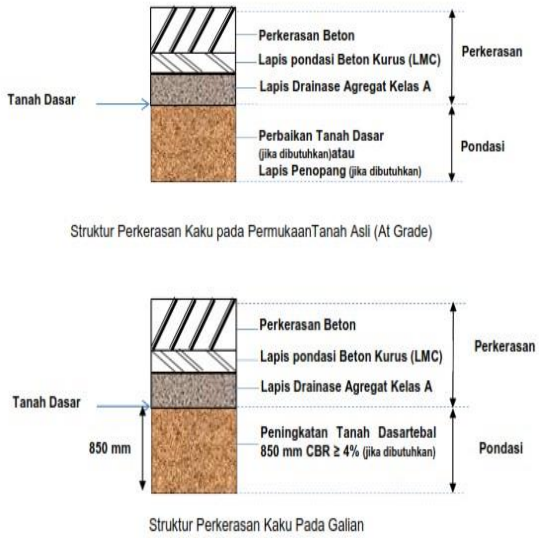

Gambar 3. Komponen Struktur Perkerasan Kaku

b.Umur Rencana

Tabel 9.1 Umur Rencana Berdasarkan Jenis Perkerasan.

Jenis Perkerasan	Elemen Perkerasan	Umur Rencana (Tahun)
Perkerasan Lentur	Lapisan aspal dan lapisan berbutir dan CTB	20
	Pondasi jalan Semua lapisan perkerasan untuk area yang tidak diijinkan sering ditinggikan akibat pelapisan ulang, missal: jalan perkotaan, underpass, jembatan, terowongan.	40
	Cement Treated Based	
Perkerasan Kaku	Lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, lapis beton semen, dan pondasi jalan	
Jalan tanpa penutup	Semua elemen	Minimum 10

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep desain ekowisata di desa sungai luar dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 terbagi menjadi dua bagian utama, dari segi infrastruktur dan promosi melalui media sosial. Dari segi infrastruktur berfokus kepada pembangunan akses jalan menuju lokasi objek wisata. Sedangkan untuk media promosi berfokus pada pengenalan melalui media sosial seperti website, poster, dan video iklan.

Diharapkan dengan adanya desain ekowisata ini dapat meningkatkan serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat didesa Sungai Luar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Cahyono, "Desain dan pengembanganekowisata mangrove gelagah wangi Istana Tambak Bulusan Demak, Jawa Tengah," 2019.

[2] Baharuddin, "Rancangan RPJMDES Sungai Luar," 2022.

[3] D. Agribisnis, F. Ekonomi, and D.Manajemen, "Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Musiduga Kabupaten Sijunjung Melalui Pendekatan Arsitektur Strategi Mya Amelia," 2016.

[4] I. G. A. K. Warmayana, "Pemanfaatan Digital Marketing dalam Promosi Pariwisata pada Era Industri 4.0," Pariwisata Budaya J. Ilm. Agama Dan Budaya, vol. 3, no. 2, p. 81, 2018, doi: 10.25078/pba.v3i2.649.

[5] I. K. Dewi, Suwarti, and S. Yuwanti, "Pengenalan Konsep Ekowisata Dan Identifikasi Potensi Wisata Alam Berbasis Ekowisata," SELAPARANG J. Pengabdi. Masy. Berkemajuan, vol. 4, no. 2, p. 307, 2021, doi: 10.31764/jpmb.v4i2.4138.

[6] Masitah, I. Pengembangan Desa Wisata olehPemerintah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 53(9), 1689–1699.(2019)https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2806

[7] N. W. Tyas and M. Damayanti, "Development Potentials of Kliwonan Village as a Batik Tourism Village in Sragen Regency," J. Reg. Rural Dev. Plan., vol. 2, no. 1, pp. 74–89, 2018.

[8] P. A. Pynanjung and R. Rianti, "Dampak Pengembangan Ekowisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang: Studi Kasus Kawasan Ekowisata Riam Pangar," J. Nas. Pariwisata, vol. 10, no. 1, p. 22, 2018, doi: 10.22146/jnp.59469.

[9] S. Jonathan, "Pengembangan ekowisataelang jawa di taman nasional Gunung Ciremi," *ekowisata*, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.

[10] U. Inati and Salahudin, "Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Ekowisata: Sebuah Kajian Pustaka Sistematis," *J. Reg. Rural Dev. Plan.*, vol. 6, no. 1, pp. 14–29, 2022, doi: 10.29244/jp2wd.2022.6.1.14-29.

e-ISSN: 2620-3332 SELODANG MAYANG

BUSSINES MODEL CANVAS UNTUK PROGRAM HILIRISASI INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENINGKATAN PAD

Rizki Kinanda[1], M. Gasali M[1], Akbar Alfa[1], Endi Sudeska[1]
[1]Universitas Islam Indragiri

Email: akbar.jimi.alfa@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The economy of Inhil Regency in the coconut sector is currently facing a very critical problem. The low selling price and the low acceptability of buying coconut raw material by large companies have had a negative impact on the welfare of the farming community in Inhil Regency. Downstreaming the coconut industry is a very basic solution from an industrialization standpoint. Selling coconuts only from raw materials does not increase sales value. Encouraging various business actors to increase the value of products into finished materials will increase sales value, including facilitating the emergence of new business actors to increase product value. The role of government is very important to improve the welfare of farming communities. This coconut industry downstream program must be encouraged and escorted by the local government. Even though basically this program is aimed at improving people's welfare, the success of this program will bring about an increase in regional economic activity and an increase in regional income (PAD). This paper will describe the coconut industry downstream program to the Business Model Canvas which is a model that is widely used in the business sector. This aims to strengthen the program's orientation to local revenues and maintain the sustainability of implemented programs in the community. In the discussion section, it is described in detail, broadly, but has strong limitations on what the government must prepare and do to start a coconut industry downstream program in Inhil Regency. Starting from customer targets, partner collaboration, revenue channels, etc. which make it easier for the government to see opportunities and challenges in implementing this program.

Keywords: *Downstream, Coconut, Regional Income, PAD, Industry.*

Abstrak

Perekonomian Kabupaten Inhil di bidang kelapa saat ini sendang menghadapi permasalahan yang sangat genting. Harga jual yang rendah serta penerimaan pembelian bahan mentah kelapa yang rendah oleh perusahaan besar memberikan dampak buruk kepada kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Inhil. Hilirisasi industri kelapa merupakan solusi yang sangat mendasar dari sisi industrialisasi. Penjualan kelapa hanya dari bahan mentah tidak meningkatkan nilai jual. Mendorong berbagai pelaku usaha untuk meningkatkan nilai produk menjadi bahan jadi akan meningkatkan nilai jual termasuk diantaranya adalah memudahkan munculnya pelaku usaha baru untuk meningkatkan nilai produk. Peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Program hilirisasi industri kelapa ini harus didorong dan dikawal oleh pemerintah daerah. Walapun secara mendasar program ini adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi keberhasilan program ini akan mendatangkan peningkatan aktifitas perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan daerah (PAD). Tulisan ini akan melukiskan program hilirisasi industri kelapa kepada Bussiness Model Canvas yang merupakan model yang banyak digunakan dalam bidang bisnis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat orientasi program kepada pendapatan daerah serta menjaga keberlangsungan program terimplementasi di masyarakat. Pada bagian pembahasan terjabarkan secara detail, luas, namun memiliki batasan yang kuat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan pemerintah untuk memulai program hilirisasi industri kelapa di Kabupaten Inhil. Mulai dari target costumer, kolaborasi patner, saluran pendapatan, dll yang memudahkan pemerintah dalam melihat peluang dan tantangan implementasi program ini.

Kata kunci: *Hilirisasi, Kelapa, Pendapatan Daerah, PAD, Industri.*

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa di Inhil adalah salah satu komoditas unggulan. Saat ini industri kelapa di Inhil membutuhkan kebijakan yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Inhil, terlebih nilai jual kelapa di Inhil saat ini sedang menurun. Bulan juli 2022 harga jual kelapa bulat yang berkisar Rp1.500 hingga Rp1.300 perkilogram di setiap daerah di Kabupaten Inhil.

Sumber-sumber PAD yang masuk ke Kabupaten Inhil seperti retribusi, pajak, dll sangat terpengaruh oleh aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi di bidang industri kelapa di Kabupaten Inhil memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Dalam penelitian Pidelis Murib, dkk (2016) dan penelitian oleh Lidia Elly (2013) dinyatakan bahwa peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada masing-masing area studi kasus.

Bulan Juli 2022 PT Sambu Grub yang beroperasi di Inhil membatasi daya tampung pemasok (pengumpul/pancang), atau membatasi kuota pembongkaran 40 ton perharinya. Sehingga terjadinya antrian panjang pompong bongkar muat kelapa.

Hal ini menyebabkan PT Sambu Grub menurunkan jumlah hasil produksi, agar tidak membebani keuangan yang dapat mendatangkan kerugian. Hal ini pun akan berdampah kepada dinamika pembelian bahan baku industri.

Utamanya kondisi ini berdampak kepada perekonomian masyarakat petani, karena hasil panen kelapa tidak terserap, menimbulkan kerugian besar bagi petani kelapa Inhil yang menjadi beban dan tantangan sendiri bagi perusahaan untuk improvisasi memelihara keseimbangan antara aspek permintaan dengan aspek persediaan.

Program hilirisasi kelapa adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Diantara contoh bentuk dari hilirisasi industri kelapa adalah mempermudah jalan untuk penambahan perusahaan kelapa berdiri di suatu daerah untuk menambah perusahaan yang dapat menampung hasil kelapa masyarakat, serta meningkatkan nilai jual kelapa dengan menjual kelapa dalam bentuk produk setengah jadi atau produk jadi (bukan bahan baku).

Hilirisasi industri kelapa tentu membutuhkan program kebijakan pemerintah dan eksekusi yang baik. Bussiness Model Canvas dapat menjadi suatu metode yang tepat agar eksekusi pelayanan/kebijakan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. BMC adalah sebuah metode atau alat yang banyak digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mempermudah implementasi inisiatif atau program yang ingin dilaksanakan. Metode ini akan menjabarkan eksekusi pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Berlandaskan hal-hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Perencanaan Program Hilirisasi Kelapa di Kabupaten Inhil dengan alat atau metode Bussiness Model Canvas. Hal ini dapat membantu pihak pemerintah untuk memetakan langkah atau membuat roadmap apa saja yang akan dilakukan untuk implementasi hilirisasi kelapa di Kabupaten Inhil. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan *study case* dan kajian literatur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bussiness Model Canvas

BMC adalah metode yang sudah banyak digunakan dalam usaha mengimplementasikan ide atau konsep kepada kebijakan langsung. Orientasi utamanya adalah untuk menjabarkan batasan dari program dan detail implementasi untuk mempermudah eksekusi program.

Menurut Osterwalder & Yves Pigneur (2014) dijabarkan bahwa Business Model Canvas adalah 9 blok bisnis. Blok ini berisikan bagian-bagian penting yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi tersebut menciptakan manfaat dan juga mendapat kemanfaatan dari para pelanggannya. Adapun bagian dalam Business Model Canvas tersebut meliputi Customer Segment, Value Proposition, Channels, Customer Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnership dan Cost Structure.

- Manfaat BMC

Manfaat dari Business Model Canvas bisa menjabarkan, menganalisis, dan merancang secara kreatif dan inovatif dalam upaya membentuk, memberikan, dan menangkap dimensi pasar dan mendongkrak permintaan dengan cara menginovasi sebuah nilai. Business Model Canvas ini dipaparkan secara visual berupa suatu kanvas/gambar sehingga membantu memudahkan untuk dipahami oleh sang pembaca. Pihak stakeholder perusahaan bisa menyesuaikan bentuk Business Model Canvas ini sesuai dengan kebutuhan usahanya.

- Elemen BMC

Dalam bukunya yang berjudul "Business Model Generation" tahun 2010, Osterwalder dan Pigneur membuat suatu kerangka Business Model yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak yang saling berkaitan. Kotak kotak itu berisikan elemen elemen yang penting yang menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan manfaat bagi pelanggan dan dari para pelanggannya

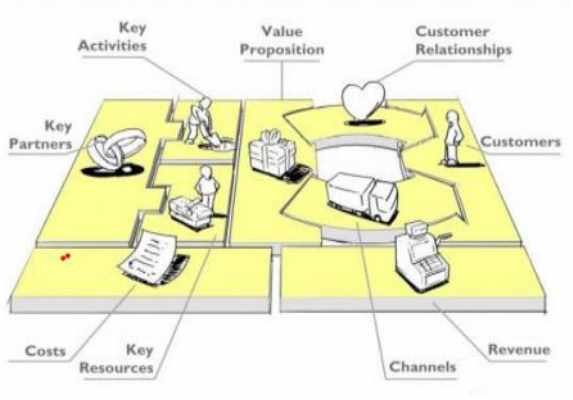

Gambar 1. Model Bussiness Model Canvas

2.1.1. Costumer Segment

Blok bisnis awal yang harus terdeskripsi dengan kuat adalah costumer segment. Blok ini akan menentukan siapa costumer yang ditargetkan.

Menurut Tim PPM Manajemen (2012:30) Customer segment atau segmen pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa/produk dari organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Umumnya, pelanggan adalah pihak yang membayar langsung atas jasa/produk yang dibelinya. Customer Segmen adalah kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani.

Untuk mengidentifikasi suatu segmen yang akan dilayani dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan: 1. Untuk siapa kita membuat Value Proposition? 2. Siapa pelanggan utama? 3. Siapa yang mendatangkan Revenue? 4. Siapa penikmat atau pengguna Value Proposition?

Ali, Hasan (2013) menjelaskan mengenai analisis segmentasi pasar yang merupakan proses estimasi luas pasar yang memiliki respon yang sama yang diperkirakan akan menjadi calon pembeli yang menguntungkan dengan cara: 1. Mendefinisikan pasar produk yang dilayani 2. Menganalisis industri untuk mengetahui peluang dan daya tarik pasar 3. Menganalisis pesaing kunci untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing 4. Mengembangkan profil konsumen untuk mengetahui segmen pasar yang profitable.

2.1.2. Value Preposition

Value Preposition akan menjadi nilai utama yang harus diperkuat secara ide dan konsep. Blok bisnis ini yang akan menjadi penilaian utama terkait keunikan program dan manfaat program.

Menurut (Kotler, 1996:24) Value Propositions menggambarkan tentang bagaimana perusahaan memberikan nilai terbaik untuk pelanggannya sesuai dengan proposisi nilai yang ada pada perusahaan tersebut. Dengan menciptakan nilai yang unggul, perusahaan menciptakan pelanggan yang sangat puas dan tetap setia serta mau membeli lagi.

Beberapa elemen utama dalam menentukan Value proposition sesuai dengan yang disampaikan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur adalah sebagai berikut:

- Keterbaruan
- Memepermudah pekerjaan
- Desain
- Brand
- Harga
- Pengurangan Biaya
- Pengurangan Resiko
- Aksesibilitas
- Kenyamanan/kegunaan

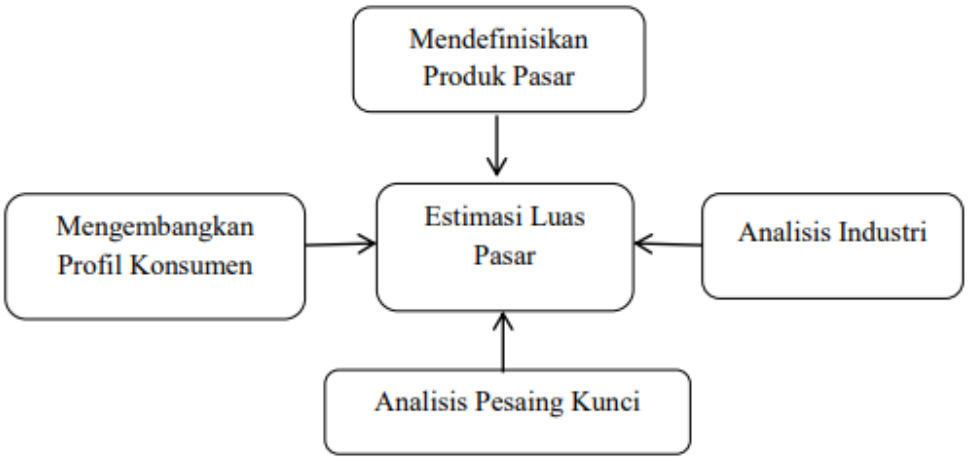

Gambar 2. Model Value Preposition
Sumber: Ali, Hasan (2013)

2.1.3. Channels

Channels adalah saluran pemasaran yang berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian produk ke konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009) Channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung yang terlihat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi.

Alexander dan Osterwalder (2012) menyatakan bahwa:

1. Memunculkan kesadaran dari pelanggan mengenai adanya produk atau jasa perusahaan
2. Membantu pelanggan mengevaluasi Value Proposition perusahaan
3. Memfasilitasi pelanggan membeli produk atau jasa perusahaan
4. Menyampaikan value proposition kepada pelanggan
5. Menyediakan dukungan pasca penjualan.

2.1.4. Customer Relationships

Custumer Relationship adalah serangkaian kegiatan guna mempertahankan hubungan antara pemilik produk dengan custumer yang menikmati produk. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberlanjutan program dan mencapai target yang diharapkan.

Menurut Tim PPM Manajemen (2012) Customer relationships merupakan pembinaan hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru (akuisisi), mempertahankan pelanggan lama (retention) , dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Dalam Business Model Canvas (BMC), elemen Customer Relationships menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pasar tertentu. Value propositions yang baik, penetapan customer segments yang tepat, dan Channels yang bagus, tidak akan banyak membantu perusahaan menciptakan value streams, apabila Customer Relationships tidak di desain dengan baik.

Tidak semua kegiatan di cantumkan dalam kotak "Key Activities" ini, melainkan hanya kegiatan kunci yang benar-benar menunjang keberhasilan suatu organisasi mengantarkan value proposition-nya ke customer.

Menurut Tim PPM Manajemen (2012:187) Setiap organisasi memiliki beragam aktivitas. Dalam pengembangan model bisnis, yang perlu di desain hanyalah aktivitas utama (Key Activities) saja. Ciri-ciri Key Activites di antaranya adalah:

1. Kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan Value Propositions
2. Menyalurkan Value Proposition kepada pelanggan
3. Kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan
4. Kegiatan untuk menangani aliran pendapatan.

2.1.5. Revenue Stream

Revenue Stream adalah blok yang sangat penting. Blok ini menjadi saluran keuntungan finansial masuk kepada pemilik produk. Sangat penting dikarenakan ini akan menjadi saluran fundamental untuk menentukan lanjut atau tidaknya program secara pertimbangan administrasi. Osterwalder dan Pigneur (2012) menyatakan revenue streams adalah blok bangunan arus pendapatan menggambarkan dana yang dihasilkan pemilik produk.

2.1.6. Key Activities

Key Activities adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada program yang akan diimplementasikan. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan blok ini yang menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan pemilik produk agar model bisnisnya dapat bekerja.

Aktifitas yang dilakukan akan berorientasi keberhasilan pencapaian value preposition. Batasan-batasan dari kegiatan yang dilakukan harus melibatkan pertimbangan blok lain dalam BMC yang ada agar kegiatan yang dilakukan tidak keluar jalur.

2.1.7. Key Resources

Key Resources adalah sumber daya milik pemilik produk yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya umumnya berwujud manusia, teknologi, peralatan, channel maupun brand. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010) key resources didefinisikan sebagai sumber daya utama yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi.

2.1.8. **Key Partnerships**

Key Partnerships harus mendapat perhatian oleh pemilik produk. Hal ini untuk memperkuat operational atau keberlanjutan implementasi program.

Menurut Tim PPM Manajamen (2012) Key Partnerships atau kemitraan kunci merupakan mitra kerjasama mengoperasikan organisasi. Organisasi membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai motif yang umumnya adalah: penghematan karena tidak tercapainya ekonomi skala, mengurangi risiko, memperoleh sumber daya atau pembelajaran.

Menurut Tim PPM Manajemen (2012) Dalam melakukan kemitraan, organisasi memiliki 4 tujuan yaitu:

1. Optimasi operasi
2. Mendapatkan sumber daya
3. Mendapatkan pengetahuan
4. Akuisisi pasar

2.1.9. **Cost Structure**

Model bisnis pada umumnya memiliki cost sebagai pondasi implementasi. Di dalam BMC juga harus menyediakan tempat khusus untuk cost sebagai pertimbangan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Tim PPM Manajemen (2012:38) Cost Structure atau struktur biaya menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis ini. Semua upaya untuk mewujudkan Value Proposition melalui channels yang tepat, Key Resources, dan Key Activities yang andal, semuanya membutuhkan biaya. Struktur biaya dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih, apakah mengutamakan biaya rendah atau mengutamakan manfaat istimewah.

Menurut Osterwalder dan Yves pigneur (2012:40) Cost Structure memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Fixed Cost Biaya tetap atau Fixed cost yang harus dikeluarkan tanpa dipengaruhi oleh volume aktivitas ataupun jasa dan produk yang dihasilkan. Contoh dari fixed cost adalah gaji pegawai, pengadaan dan pemeliharaan pabrik.
2. Variable cost Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan mengikuti jumlah produk/jasa yang dihasilkan. Contohnya biaya variabel adalah biaya bahan mentah.
3. Economies of Scale Struktur biaya yang mengandalkan economies of Scale memanfaatkan volume produk/jasa yang dihasilkan untuk menurunkan biaya
4. Economies of Scope Struktur biaya yang mengandalkan economies of scale memanfaatkan volume aktivitas untuk menurunkan biaya.

2.2 Hilirisasi Kelapa

Hilirisasi Kelapa adalah sebuah inisiatif atau inovasi di bidang industri kelapa yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk industri kelapa.

Di Indonesia, hilirisasi telah dicanangkan sejak tahun 2010 lalu. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

Tujuan dari hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri.

Hilirisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas. Jika suatu daerah hanya mengandalkan komoditas bahan baku, maka dearah tersebut akan kesulitan

apabila nilai jual komoditas tersebut menurun. Apabila suatu daerah mengandalkan industri produk setengah jadi atau barang jadi, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Selain itu, harga produk ini relatif lebih stabil daripada harga bahan baku.

Menurut Patunru (2015), hilirisasi sering disebut downstreaming atau value-adding, yang artinya upaya meredam ekspor bahan mentah dan sebaliknya mendorong industri domestik untuk menggunakan bahan tersebut karena meningkatkan nilai tambah domestik (sembari menciptakan lapangan kerja). Maka ekspor terbaik adalah produk atau barang jadi yang merupakan hasil dari olahan bahan baku.

Dengan pandangan yang lebih luas, Hirschman (1958) menyarankan kebijakan yang lebih tepat adalah perbaikan infrastruktur dan iklim investasi. Perbaikian infrastruktur dan investasi besar akan mendrong terciptanya perusahaan baru atau perbaikan finansial kepada perusahaan eksisting sehingga hal ini berpotensi kepada meningkatnya jumlah penerimaan hasil petani masyarakat. Perbaikan SDM (lewat pendidikan dan sarana kesehatan yang lebih baik) memungkinkan pergerakan yang lebih baik kepada industri.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, BMC yang disusun dalam tulisan ini akan berorientasi kepada:

1. Peningkatan nilai tambah produk kelapa
2. Kemudahan Investasi Perusahaan Kelapa / penambahan perusahaan kelapa.

6. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan study case dan kajian teori. Penelitian ini akan berfokus kepada penyelarasan antara teoritis dengan kondisi eksisting di Kabupaten Inhil. Hal ini akan mengeksplore potensi di Kabupaten Inhil dan memetakan serta membentuk roadmap menuju hilirisasi industri kelapa yang baik.

Metode ini dirasa peneliti adalah metode paling tepat berdasarkan permasalahan yang diangkat sangat membutuhkan penelusuran secara kualitatif deskriptif.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berfokus kepada bagaimana program hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dapat di jabarkan dalam Bussines Model Canvas agar dapat dijelaskan secara terstruktur dan terintegrasi. Berdasarkan hasil penelusuran kualitatif dengan menyelaraskan kajian teoritis dan study case peneliti menyusun materi yang dapat diterapkan dalam canvas penelitian.

7.1. Costumer Segment

Pemerintah harus tepat dan eksplisit mencantumkan hal ini di dalam regulasinya. Karena segmen ini menjadi pondasi awal sebuah program kerja yang harus dipertahankan.

Dalam mengidentifikasi costumer segment perlu ditegaskan untuk siapa program ini, Siapa yang mendatangkan pendapatan, dan Siapa penggunanya?. Segmen ini akan menggiring program kebijakan kearah yang sesuai dengan siapa yang tercantum di dalam segmen ini.

Berdasarkan study case industri kelapa di Kabupaten Inhil. Costumer Segmetn Program Hilirisasi industri kelapa adalah:

1. Masyarakat Petani (custumer sosial)
   Peniingkatan kualitas kehidupan masyarakat harus menjadi faktor utama setiap program dari pemerintah. Masyarakat petani diidentifikasi sebagai Costumer Segment karena kelompok ini menjadi penerima manfaat terbesar dari sisi pendapatan, pekerjaan, dan bantuan penghidupan lainnya, namun kelompok ini juga menjadi sumber pemasukan bagi daerah melalui roda perekonomian yang semakin baik apabila masyarakat petani memiliki penghasilan yang baik pula.
   Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Walaupun darisegi Pendapatan Daerah tidak signfikan akan tetapi kesejahteraan sosial masyarakat adalah orientasi utama pemerintah daerah disamping pendapatan daerah masuk melalui retribusi dan pajak dari masyarakat.
2. Perusahaan (revenue stream)
   Perusahaan juga menjadi costumer segment sekaligus sumber revenue stream pada program hilirisasi industri kelapa di Kabupaten Inhil. Hal ini dikarenakan perusahaan mendapat manfaat dengan program ini dengan meningkatnya pendapatan atau dipermudahnya urusan bisnis, namun juga perusahaan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan daerah melalui Retribusi dan Pajak.

7.2. Value Preposition

Program Hilirisasi Industri Kelapa harus memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh costumer segment. Berdasarkan study case dan penyesuaian dengan kajian literatur diidentifikasi bahwa value preposition yang ditargetkan dalam program hilirisasi industri kelapa di Kabupaten Inhil adalah:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan nilai jual produk yang sebelumnya hanya fokus kepada produk baku/mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi.
2. Peningkatan jumlah kelapa yang dijual masyarakat petani kepada perusahaan dengan kemudahan investasi dan kemudahan birokrasi bisnis sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya beli kelapa masyaraat petani atau menambah jumlah investasi industri di Kabupaten Inhil.

7.3. Channels

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila channel yang menghubungkan antar stakeholder terbangun dengan baik.

Channel dalam BMC bertujuan untuk menghubungkan antar stakeholder untuk terus bisa bersama menjalankan program ini. Berdasarkan study case dan kajian literatur berikut channel yang tepat untuk digunakan dalam program hilirisasi ini:

1. Kegiatan Edukasi / Sosialisasi Rutin
   Penekanan pada segmen ini adalah pertemuan yang diadakan. Kegiatan pertemuan ini menjadi channel komunikasi masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah.
2. FGD Rutin antara Pemerintah, Perusahaan Swasta, dan Masyarakat Petani. FGD ini akan menjadi media yang tepat untuk komunikasi kondisi terkini industri kelapa di Kabupaten Inhil. Pemerinta bisa terus memantau kondisi lapangan untuk terus mengetahui permasalahan yang terjadi.
3. Platform dan Tinjauan rutin lapangan. Kegiatan tinjauan lapangan ini akan menjadi salah satu rutinitas yang penting dilakukan agar pemangku kebijakan dapat terus memantau kondisi terkini. Namun dalam hal ini terdapat inovasi yang dapat dikembangkan yaitu platform yang bertujuan untuk pemantauan online industri kelapa di Kabupaten Inhil. Platform sederhana ini diinput oleh petugas pemantauan yang dilakukan perhari atau perminggu yang langsung terintegrasi secara online sehingga dapat langsung dipantau oleh pemangku kebijakan tanpa harus menunggu pelaporan yang membutuhkan waktu lebih lama.

7.4. Customer Relationships

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila hubungan antar stakeholder terus terikat. Di dalam hubungan ini ada interaksi yang mengingikat dengan asas manfaat yang didapat.

1. Pemerintah harus berkerjasama dengan akademisi untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Peran akademisi adalah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat petani untuk meningkatkan nilai produk mereka. Dengan adanya edukasi rutin, terstruktur, terencana, serta bantuan alat dari pemerintah diharapkan masyarakat mampu meningkatkan produk mereka dari produk baku ke produk setengah jadi atau produk jadi. Peningkatan nilai jual ini akan memberikan dampak positif baik untuk masyarakat petani maupun pemerintah. Namun kegiatan pemasaran dan promosi produk masyarakat harus tetap dikawal oleh pemerintah maupun akademisi.
2. Kemudahan dan promosi investasi, dengan mudahnya investasi maka hal ini akan meningkatkan finansial perusahaan di Kabupaten Inhil atau menambah perusahaan baru. Dengan bertambahnya perusahaan baru ini maka ini akan mendorong penerimaan atau pembelian produk masyarakat tani semakin meningkat.
3. Insentif bagi perusahaan. Kebijakan sementara untuk memberikan insentif bagi perusahaan akan meningkatkan daya beli perusahaan kepada produk petani. Diantara insentif yang bisa dilakukan diantaranya adalah kebijakan sementara penurunan atau peniadaan pajak bagi perusahaan yang mau meningkatkan pembelian produk masyarakat tani. Hal ini untuk memancing peningkatan perekonomian di awal.

7.5. Revenue Streams

Revenue streams dalam BMC adalah bertujuan untuk menjadi saluran

keuntungan bagi perusahaan pemilik produk. Sedangkan, Tujuan utama dari pekerjaan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam hal ini adalah pendapatan daerah bagi masyarakat petani.

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila pemerintah memiliki revenue streams untuk terus menjalankan program. Dalam program ini, secara keseluruhan hasil yang didapatkan adalah peningkatan pendapatan daerah. Dengan kata lain apabila program hilirisasi ini berhasil dilakukan maka pendapatan daerah akan meningkat dan itu dapat menjadi revenue streams bagi Pemerintah Kabupaten Inhil.

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program ini akan mendorong aktifitas ekonomi di Kabupaten inhil meningkat. Hal ini tentu memberikan dampak positif kepada perekonomian daerah. Sumber-sumber PAD yang masuk ke Kabupaten Inhil seperti retribusi, pajak, dll sangat terpengaruh oleh aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi di bidang industri kelapa di Kabupaten Inhil memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Dalam penelitian Pidelis Murib, dkk (2016) dan penelitian oleh Lidia Elly (2013) dinyatakan bahwa peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada masing-masing area studi kasus.

7.6. Key Resources

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila terdapat key resources yang dapat berupa sumber daya fisik (bangunan, kendaraan, peralatan), uang, asset intelektual (merek, hak cipta, paten, data base pelanggan), dan sumber daya manusia.

Dalam canvas ini, diidentifikasi key resources yang digunakan antara lain:

1. Kantor khusus tim program hilirisasi kelapa di Kabupaten Inhil
2. Kendaraan untuk pemantauan lapangan, ruangan FGD
3. Peralatan khusus untuk pengolahan produk masyarakat disesuaikan dengan konsep pengolahan dari akademisi
4. Asset intelektual inovasi dari akademisi untuk pengolahan produk masyarakat
5. Data base masyarakat tani beserta data jual beli hasil tani atau produk tani
6. Tim Khusus Program Hilirisasi.

7.7. Key Activities

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil terdiri dari beberapa rekomendasi kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Edukasi Berkala oleh akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang kuat kepada masyarakat untuk temotivasi meningkatkan nilai jual produknya.
2. Bantuan peralatan, bantuan yang dimagsud adalah di tahap lanjutan dari edukasi adalah eksekusi untuk meningkatkan nilai produk. Hal ini harus didukung dengan peralatan yang memadai agar masyarakat dapat meningkatkan nilai produk mereka.
3. Pembuatan Platform dan pemantauan rutin. Platform yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mendukung kegiatan pemantauan lapangan rutin agar hasil pemantauan dapat diliat secara online oleh pemangku kebijakan.
4. Kemudahaan investasi pada inverstor untuk meningkatkan produktifitas perusahaan yang turut mendorong jual beli produk masyarakat tani
5. Insentif pada perusahaan yang mau meningkatkan daya beli produk tani masyarakat bisa dengan penurunan atau peniadaan sementara pajak, atau dengan kebijakan lainya.
6. FGD Rutin dengan Perusahaan dan Masyarakat tani

7.8. Key Partnerships

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila hubungan antar stakeholder terjalin dengan baik. Key partnership pada program ini adalah:

1. Pemerintah Daerah
2. Masyarakat Petani
3. Perusahaan Swasta
4. Akademisi

7.9. Cost Structure

Program Hilirisasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila Cost Structurenya dapat dipenuhi. Cost Structure yang harus dipenuhi antara lain:

1. Pembiayaan Kegiatan Edukasi Berkala yang melibatkan akademisi dan masyarakat.

2. Pembiayaan bantuan peralatan untuk pengolahan produk tani masyarakat guna meningkatkan nilai produk mereka.
3. Biaya Pembuatan Platform atau Aplikasi
4. Biaya pemantauan lapangan rutin.
5. Biaya FGD Rutin dengan Perusahaan dan Masyarakat tani

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Jurnal ini memiliki keunikan pada kombinasi antara metode dan area implementasi produknya. Metode yang digunakan adalah BMC yang merupakan model yang digunakan dalam implementasi bisnis yang mana orientasinya adalah keuntuknya secara finansial kepada perusahaan pemilik produk, sedangkan Program Hilirisasi Industri Kelapa oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat bukan pada organisasi pemerintah itu sendiri. Namun penggunaan metode ini adalah untuk memperkuat konsentrasi pada keberlanjutan program karena pendapatan daerah akan menjadi vital untuk keberlangsungan program ini. Beberapa kesimpulan yang dapat digaris bawahi dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Program Hilirisasi Industri Kelapa memiliki 2 tujuan di 2 bidang pembangunan daerah, yaitu secara sosial dan ekonomi. Tujuan sosial adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ekonomi adalah untuk meningkatkan aktifitas perekonomian daerah serta untuk meningkatkan PAD melalui retribusi dan pajak.
2. Masyarakat menjadi penerima produk guna meningkatkan pendapatan masyarakat akan tetapi juga dapat memberikan efek timbal balik pada pemerintah dengan meningkatnya aktifitas ekonomi daerah. Disamping aktifitas masyarakat kan tetap memberikan pendapatan daerah melalui retribusi.
3. Perusahaan besar menjadi saluran penting kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak.
4. Aktifitas hilirisasi dilakukan dengan sangat mendasar. Dimulai dari edukasi kepada masyarakat tidak hanya sekedar pemberikan bantuan finansial ataupun peralatan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat sehingga program ini memiliki pondasi SDM yang kuat sehingga bisa berjalan dalam jangka panjang.
5. Peran akademisi sangat penting untuk bisa mengedukasi masyarakat yang mana ini akan menjadi pondasi peningkatan nilai jual produk kelapa di masyarakat. Sehingga masyarakat memahami pentingnya peningkatan nilai jual produk tidak hanya menjual bahan mentah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Osterwalder, A and Yves Pigneur. Business Model Canvas. New Jersey: john wiley & sons, inc. 2010
[2] Osterwalder, A & Yves Pigneur. Business Model Generation. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012
[3] Patunru, Arianto A. Trade Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy. Lowy Institute for International Policy, Australia. 2015
[4] Kotler, Philip dan Keller. Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi. Kedua belas, PT. Indeks, Jakarta. Kotler, Philip. 2011. Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan,. Implementasi dan Kontrol. Jakarta: PT. Prehallindo. 2017
[5] E. Lidia. Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun Sebelumnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat". Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2013
[6] Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016 Pidelis Murib 839 Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013 Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang
[7] Murib, P, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2016

e-ISSN: 2620-3332 SELODANG MAYANG

IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Yulianti[1], Mulono Apriyanto[1], Ali Azhar[1], KMS. Novyar Satriawan Fikri[1]
[1]Universitas Islam Indrgiri

Email: mulono.dr@gamail.com (korespondensi)

Abstract

The goal of this study is to describe and analyze the synergy model between the Central Government and the Kabupaten Indragiri Hilir Government that is effective in creating food security, implementation of a food security action program in the Indragiri Hilir Regency, and to identify food security problems in order to improve the welfare of farmers and communities in the Indragiri Hilir Regency, as well as what steps have been and must be taken in order to achieve this goal. The technique employed in this study is qualitative, with the focus of the research being the opinions and attitudes of stakeholder actors in the execution of the Indragiri Hilir Regency's Food Security Action Program policy, including resource preparedness, implementation procedures, and others.

Keywords: *Implementation, Food Security, Indragiri Hilir*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupten Indragiri Hilir yang efektif untuk melahirkan ketahanan pangan, implementasi program aksi tentang ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir, dan mengetahui permasalahan-permasalahan tentang ketahanan pangan guna peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupten Indragiri Hilir serta langkahlangkah apa yang telah dan harus dilakukan guna mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian adalah pandangan dan sikap aktor stakeholders dalam implementasi kebijakan Program Aksi Ketahanan Pangan Kabupten Indragiri Hilir, meliputi kesiapan sumber daya, proses implementasi dan lain-lain.

Kata kunci: *Implementasi, Ketahanan Pangan, Indragiri Hilir*

1. PENDAHULUAN

Isu kerawanan pangan merupakan isu yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Salah satu program terpenting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir adalah mewujudkan ketahanan pangan lokal, regional, keluarga dan perseorangan yang berlandaskan kemandirian dari penyediaan pangan nasional. Menyadari pentingnya ketahanan pangan sebagai salah satu pilar ketahanan nasional dan daerah, Rapat Gubernur Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020 mengundang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) provinsi se-Indonesia sebagai Ketua, merumuskan Rencana Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2021. Pekerjaan persiapan sedang dilakukan dengan Kelompok Kerja Teknis dan Lintas Sektor (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan[1], [2]. Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, swasta, perorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMD), akademisi, petani dan nelayan, produsen, pedagang, penyedia jasa dan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional dan regional pada tahun 2021[3]. Setiap daerah memiliki kemampuan pengiriman makanan yang berbeda, termasuk impor makanan dari luar. Di daerah terpencil, kelangkaan pangan seringkali menjadi penyebab utama rendahnya akses rumah tangga terhadap pangan[4], [5]. Dengan kondisi pertumbuhan yang membaik dan berkembangnya daerah-daerah terpencil, akses rumah tangga terhadap pangan

ditentukan oleh daya beli. Kemiskinan merupakan faktor utama yang membatasi akses terhadap pangan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin agar rumah tangga dan individu memiliki akses terhadap pangan. Kebijakan umum yang diterapkan adalah stabilisasi harga pangan pokok agar mekanisme pasar dan distribusi yang ada dapat menyediakan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, serta memperkuat cadangan pangan lokal dan masyarakat. Upaya ini diiringi dengan pengentasan kemiskinan sehingga tujuan MDGs serta kesepakatan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang dicanangkan tahun 2021 untuk menurunkan kelaparan dan kemiskinan 1 persen per tahun dapat dicapai [6], [7].

Besarnya volume beras yang didistribusikan dalam program Raskin cenderung menurun periode 2019-2021, namun dari segi realisasi penyaluran dan ketepatan sasaran terhadap Kepala Keluarga (KK) miskin telah terjadi peningkatan kinerja selama dua tahun terakhir[8]. Secara volume, beras yang didistribusikan dalam program Raskin cukup besar, namun belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sesuai norma sebanyak 20 kg per bulan dan seluruh rumah tangga miskin. Sampai saat ini prosentase keluarga miskin yang dapat dijangkau sekitar 70-88 persen [9], [10]. Pada umumnya kendala tersebut diselesaikan di tingkat masyarakat melalui musyawarah desa, namun sebagai akibatnya beras dibagi kepada tiap keluarga miskin dalam jumlah kurang dari 20 kg. Survei evaluasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 menemukan bahwa rata-rata penerimaan beras Raskin adalah 13,3 kg/KK/bulan [6], [11]. Terlepas dari adanya kelemahan dalam penentuan penerima manfaat, program Raskin dinilai telah memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan beberapa alasan, yaitu: (1) program Raskin telah mempersempit celah kemiskinan (poverty gap) sekitar 20%; (2) tingkat konsumsi kalori keluarga miskin penerima Raskin lebih tinggi antara 17-50 kkal/per hari dibandingkan mereka yang tidak memperoleh Raskin; (3) memberikar stimulasi tidak langsung terhadap permintaan agregat karena adanya efek pengganda (multiplier effect) dan transfer pendapatan yang meningkatkan daya beli penerima Raskin [12], [13].

Penurunan ini terjadi karena: 1) keberhasilan program dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan yang berimbas pada meningkatnya rata-rata konsumsi energi; dan 2) penurunan Angka Kecukupan Energi (AKE) dimana yang semula 2100 kkal/kap/hr turun menjadi 2000 kkal/kap/hr[14].

Melalui kegiatan penganeka-ragaman pangan diharapkan adalah menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun pada tingkat konsumsi langsung dalam rumah tangga, walaupun disadari banyak sekali faktor ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkat konsumsi suatu produk. Sementara total pemanfaatan beras per kapita untuk keseluruhan (pangan, industri) dapat saja tidak banyak berubah karena meningkatnya permintaan beras dan sektor industri dan jasa restoran[15], [16].

Dari sisi produksi dan konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan pondasi dan keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik aspek sosial, ekonomi, politik dan kelestarian lingkungan. Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang pertama mengungkapkan makna dari gagasan kebijakan publik dan menjelaskan perkembangannya, baik teori maupun praktik. Hal ini penting mengingat fakta kebijakan publik di kawasan Anglo Saxon dan tempat lainnya telah mengalami perubahan (termasuk di Indonesia) yang cukup berarti dan kajiannya kompleks [17], [18].

[17], [18]mengemukakan bahwa sektor publik memiliki sepuluh ciri penting yang membedakan dengan sektor swasta, yaitu:

1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih amigo.
2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan.
3. Sektor publik lebih banyak memanfaatkan banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.
4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha, mempertahankan peluang dan kapasitas.
5. Sektor publik lebih memerhatikan kompensasi atas kegagalan pasar.

6. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki *segment symbolic*.
7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.
8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran.
9. Sektor publik harus berorientasi demi kepentingan publik.
10. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

[17], [18] mengatakan gagasan kebijakan sebagai produk atau prinsip berkembang menjadi istilah dengan konotasi netral, yang jauh berbeda dengan makna Machiavellian dalam karyanya Shakespeare dan Marlowe. Kebijakan dan politik (setidaknya di Inggris) menjadi istilah yang sama sekali berbeda. Bahasa di kebijakan menjadi instrumen utama rasionalisasi politik seperti dinyatakan oleh Lasswell. Kata "kebijakan" (policy) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan penting yang diambil dalam kehidupan organisasi atau privat, ”kebijakan" bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis yang sering diyakini mengandung ”keberpihakan dan korupsi”.

2.2. Agenda Kebijakan Publik

Menurut [19] agenda kebijakan publik adalah sebuah istilah tentang pola-pola tindakan pemerintah yang spesifik sifatnya. Ia mengatakan agenda adalah sebuah istilah yang dipakai untuk memproyeksikan isu-isu yang harus ditangani demi menjawab kepentingan umum. Agenda pemerintah merupakan suatu wujud keseriusan para decision maker kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang tengah dialami. Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;

1. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah.
2. Membuat batasan masalah.
3. Mendukung agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik (publikasi melalui media massa dan sebagainya).

Peristiwa biasanya amat beragam dalam hal efek [20], [21]. Peperangan dan bencana alam menggoyahkan kehidupan jutaan manusia. Penemuan baru sistem. Penggapaian telah mengubah gaya hidup secara dramatis. Peristiwa biasanya melahirkan masalah-masalah tetapi menyiapkan pula kondisi penanganannya. Terlepas dari bagaimana para pengamat merasakan peristiwa-peristiwa tersebut. Hal ini secara langsung dipengaruhi oleh varian khusus [1], [22]. Contoh membiarkan sebuah pusat pertokoan baru ataupun suatu kompleks apartemen mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang tercipta oleh peristiwa ini.

Di lain pihak, para pencinta lingkungan yang sama sekali tidak terpengaruh secara langsung akan mengidentifikasikan pula akan sebuah kebutuhan berupa perlunya kehidupan di wilayah tersebut dan menentang varian tadi. Kesesuaian dalam mengidentifikasikan dan bertindak berdasarkan kebutuhan tidak akan menjamin apa-apa. Oleh karena itu akan menghasilkan banyak permasalahan dan peristiwa yang sama. Sedang konflik di antara definisi-definisi permasalahannya menghasilkan sebuah isu.

2.3. Problem Kebijakan

[22] menyatakan problem kebijakan dibedakan sebagai berikut:

1. Problem distributive, melibatkan sejumlah kecil orang dan dapat dikelola satu demi satu, misalnya penyelidikan terhadap karyawan untuk menentukan sistem pengupahan.
2. Problem regulasi, untuk menimbulkan pembatasan bagi yang lain, sehingga dapat melibatkan relatif sedikit orang dan banyak orang.
3. Problem redistributive adalah masalah yang memerlukan pertukaran sumber penghasilan di antara kelompok atau kelas di masyarakat. Misalnya beberapa individu yang berpendapat bahwa ketidaksamaan pendapat merupakan masalah publik sering menginginkan pembagian pajak pendapatan dalam kelas di masyarakat untuk dapat ditransfer dari orang kaya kepada orang miskin melalui kebijakan publik

2.4. Konsep Dasar Ketahanan Pangan

Undang-undang yang secara eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan adalah UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU tersebut menjelaskan konsep ketahanan pangan, komponen, serta para pihak yang harus berperan mewujudkan ketahanan pangan

dan mengamanatkan pemerintah bersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan. UU tersebut telah dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) antara lain: (i) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang mengatur tentang Ketahanan Pangan yang mencakup ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional; (ii) PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan di bidang label dan iklan pangan untuk menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (iii) PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan [23].

Untuk mengatur pembangunan perberasan nasional, pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan. Inpres ini mewajibkan kementerian terkait melaksanakan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan melalui: (i) pemberian dukungan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, (ii) pemberian dukungan pakta upaya diversifikasi usaha dan pengembangan pasca panen, (iii) kebijakm harga, (iv) kebijakan ekspor dan impor beras, (v) penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, dan (vi) pengelolaan cadangan beras nasional.

Mengingat ketahanan pangan yang kompleks dengan keterkaitan antar banyak pelaku dan daerah dengan dinamika perubahan antar waktu, maka koordinasi dan sinergi yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi tersebut pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang mengatur koordinasi, evaluasi dan pengendalian upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Saat ini telah terbentuk 32 Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan 339 Dewan Ketahanan Pangan kabupaten/kota. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi Daerah mengatur peran pemerintah yang lebih bersifat sebagai inisiator, fasilitator dan regutator dan peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ketahanan pangan.

Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota dan atau pemerintah desa sesuai kewenangannya, menjadi pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pangan nasional menjadi payung kebijakan pangan daerah; sedangkan kebijakan pangan daerah menjadi komponen utama dalam kebijakan pangan nasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian pada pandangan dan sikap aktor stakeholders dalam implementasi kebijakan Program Aksi Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, meliputi kesiapan sumber daya, proses implementasi dan lain-lain. Dalam hal ini akan dilihat mengenai pandangan aktor/stakeholder antara lain : a) Masyarakat Petani b) Tokoh masyarakat, pemerhati ketahanan pangan), c) Pemerintah terkait (pejabat Bappeda, Pejabat Bulog, Pejabat Badan Ketahanan Pangan dan lain-lain). Aktor/Stakeholder dimaksudkan adalah yang ada (berkoalisi) dalam pelembagaan pertanian dan organisasi lain yang terkait dalam implementasi kebijakan Program Aksi Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini mengambil lokasi di desa, Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja), dengan pertimbangan:

1. Desa sebagai bentuk satuan dasar basis kebijakan Program Aksi Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Karakteristik desa, diplih berdasarkan cluster, yaitu desa pinggir hutan, desa subur, desa kering (tandus), dan desa pesisir.
3. Kesesuaian dengan tema dan substansi penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti akan mengambil beberapa desa di Provinsi Bengkulu yang dianggap telah mengimplementasikan kebijakan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dokumen yang digunakan diperoleh dari Kantor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, instansi pemerintah Sekretariat Kabupaten, Kantor Disperindag, Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas-Dinas terkait dan kantor non pemerintah. Untuk menganalisis data

kualitatif digunakan analisis data model interaktif. Pada model analisis ini ada tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengetahui tentang definisi dan juga subsistem ketahanan pangan, maka dapat dilakukan analisis bahwa agribisnis memang dapat dijadikan sebagai cara ataupun solusi dalam mendukung maupun meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, karena agribisnis yang merupakan sebuah sistem dapat kemudian diintegrasikan serta diaplikasikan untuk mendukung berbagai subsistem ketahanan pangan, sehingga tujuan dari ketahanan pangan akan tercapai. Sesuai teori bahwa fokus dari sistem agribisnis adalah adanya keberlanjutan (sustainable). Sedangkan subsistem ketahanan pangan berfokus pada stabilitas (stability)[17].

Subsistem Ketersediaan pangan (food availability) pada ketahanan pangan dapat dinte grasikan dengan subsistem usahatani (On-farm) pada sistem agribisnis. Para pelaku budidaya seperti petani dan lainnya dapat mengusahakan atau melakukan budidaya berbagai macam tanaman pangan, tidak hanya padi, namun juga tanaman lainnya yang bisa dijadikan sebagai alternatif diversifikasi pangan, seperti jagung dan umbi-umbian, sehingga ketersediaan pangan dalam negeri benar-benar tercapai dan tidak hanya bertumpu pada satu komoditas pangan saja[24], [25].

Subsistem akses pangan *(food access*) dapat diintegrasikan juga dengan subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness). Dengan adanya kegiatan distribusi atau kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional sehingga adanya kegiatan distribusi ini, maka konsumen dapat mengakses produk-produk yang dibutuhkan.

Ketiga hasil analisis yang telah dijelaskan dapat dibuat sebuah ilustrasi yang menunjukkan sistem agribisnis dapat dintegrasikan dengan berbagai subsistem ketahanan pangan, sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan.

4.1. Sinergisitas Pemerintah Pusat, Daerah,Swasta dan Masyarakat

Lembaga koordinasi fungsonal Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk di 30 Provinsi berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah agar memiliki kapasitas dalam menangkap aspirasi masyarakat serta memfasilitasi masyarakat agar mampu mengembangkan perannya secara maksimal dalam mewujudkan ketahanan pangan[12].

Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah membatasi perannya pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi dan advokasi. Sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah maka peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu diletakkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah[21].

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya rawan pangan yang berarti terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan daerahnya. Jika diperlukan pemerintah pusat dapat memberi sanksi kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir apabila tidak melakukannya. Sebaliknya pemerintah pusat memberi penghargaan apabila ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terwujud [21].

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya mendorong mensosialisasikan kelembagaan tersebut dan mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat agar memiliki kesempatan berperan seluas-luasnya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Sesuai dengan tugas yang diembannya, pemerintah pusat berperan memfasilitasi penciptaan kondisi yang kondusif melalui penetapan kebijakan makro dengan terwujudnya ketahanan pangan nasional serta memberi peluang kepada masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan ketahanan pangan.

4.2. Permintaan Pangan Lebih Cepat Dari Pertumbuhan Penyediaan

Di Kabupaten Indragiri Hilir, kelompok rawan pangan sebagian besar berada di pedesaan, yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari sektor pertanian[14], [26]. Oleh karena itu strategi perwujudan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah strategi jalur ganda (twintrack strategy), yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan; dan (2) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat termasuk swasta) untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan dan miskin.

Aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan

akibat distribusi yang tidak efisien; (2) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (3) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta percepatan nilai tambah.

Kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (2) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (3) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (4) semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dan sebagainya).

Kebijakan ketahanan pangan difokuskan kepada pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah-masalah pangan. Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui peningkatan kapital dan kapasitas rumah tangga agar mampu memproduksi, mengolah dan memasarkan produk pangan, serta mampu memasuki pasar tenaga kerja dan memberikan kesempatan berusaha guna meningkatkan pendapat rumah tangga.

4.3. Identifikasi Permasalahan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk membahas masalah ketahanan pangan yang komprehensif maka ada tiga aspek cakupan (FAO, 1996), yaitu: Pertama, aspek ketersediaan (availability). Jumlah pangan yang tersedia harus mencukupi kepentingan semua rakyat, baik bersumber dari produksi domestik ataupun impor. Kedua, keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi. Keterjangkauan secara fisik mengharuskan bahan pangan mudah dicapai individu atau rumah tangga. Keterjangkauan ekonomi berarti kemampuan membeli pangan atau berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan. Ketiga, aspek stabilitas (stability), merujuk kemampuan meminimalkan kemungkinan terjadinya konsumsi pangan berada di bawah kebutuhan standar pada musim sulit (paceklik atau bencana alam).

Dilihat dari kemampuan produksi, daerah menyediakan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir tampak ada kecenderungan menurun secara relatif terhadap permintaan. [9], [27] mengatakan, selama 10 tahun terakhir rata-rata kenaikan produksi pangan hanya sekitar 0,9%. Padahal konsumsi justru naik 2,5-3%. Untuk beras, kenaikan produksinya hanya sekitar 1% per tahun.

Tingkat produktivitas daerah atas sejumlah komoditas pangan malah mengalami stagnasi. Untuk beras, stagnan berada pada tingkat 4,3 ton/ha. Di sisi lain, perluasan area komoditas pangan cenderung turun. Misalnya, 2019 penurunan luas area panen terjadi pada semua komoditas pangan khususnya beras dan palawija. Untuk beras turun 3,2%, jagung turun 4,8%, kacang hijau turun 1,35%, ubi jalar turun 14%, dan ubi kayu turun 0,3%. Setidaknya ada dua penyebab utama mengapa produksi pangan di Kabupaten Indragiri Hilir belum mampu mencukupi kebutuhan pangan domestik. Pertama, konversi lahan produktif pertanian. Selama 10 tahun terakhir, fenomena alih fungsi (konversi) lahan pertanian Kabupaten Indragiri Hilir tampak nyata terjadi. Untuk areal sawah di Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa hasil penelitian menunjukkan dalam satu dekade terakhir rata-rata konversi lahan sawah 3.400 sampai 3.500 hektare (ha) per tahun [9], [28]. Penyusutan lahan persawahan diKabupaten Indragiri Hilir disebabkan desakan pertambahan penduduk, perkembangan sektor industri, konversi lahan produktif menjadi realestat, daerah wisata, dan peruntukan lainnya yang saling tumpangtindih. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari laju konversi lahan pertanian yang cepat.

Kecenderungan konversi lahan yang tinggi terjadi pada lahan pertanian di sekitar sentra pertumbuhan ekonomi dan industri yang umumnya adalah kota-kota besar. Contoh laju konversi yang tinggi di sekitar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir lahan pertanian produktif adalah lahan relatif lebih subur yang tentu saja berkontribusi signifikan terhadap produksi pangan daerah. Kedua, sekitar 89,4% petani kita tergolong petani guram yang hanya memiliki lahan di bawah 2 ha. Sekitar 48,5% di antaranya hanya memiliki lahan rata-rata 0,17 ha. Pertanian berskala kecil seperti ini sangat sulit diharapkan mampu memberikan sumbangan produksi daerah secara besarbesaran. Sebab, secara teoretis pertanian lahan sempit ini produksinya rendah, pendapatannya kecil sehingga tidak dapat menabung. Karena itu, tidak mungkin memperbaiki teknologinya sehingga produktivitas lahannya akan terus rendah.

Secara sederhana dikatakan tidak mungkin menjaga ketahanan pangan berbasis petani guram [27]. Terminologi ketersediaan pangan yang dirumuskan lembaga pangan dunia (FAO) tidak mensyaratkan suplai pangan domestik harus dari produksi domestik, tetapi bisa juga

dari impor. Suatu daerah tetap terjaga ketahanan pangan kalau daerah itu bisa mengimpor komoditas pangannya dari daerah luar. Walaupun ketersediaan pangan daerah bisa dicukupi melalui impor, ada hal penting yang harus dipahami [29]. Mengandalkan impor untuk ketersediaan komoditas pangan domestik, apalagi komoditas pangan strategis, adalah berisiko tinggi dan berbahaya. Sebagai contoh beras dan gula. Untuk beras diketahui bahwa penawaran dan harganya di pasar luar daerah sangat tidak stabil. Hal ini bukan disebabkan kondisi iklim dan lingkungan, tetapi pasar beras nasional bersifat oligopoli.

4.4. Rencana Kebijakan kedepan

Kebijakan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani adalah: Pertama, kebijakan yang berorientasi untuk emacu pertumbuhan ekonomi pedesaan (petani) sekaligus meningkatkan produksi pangan Kabupaten [9], [27]. Kebijakan tersebut meliputi land reform policy. Land reform policy bertujuan agar para petani memiliki luas lahan yang memberikan keuntungan untuk dikelola sekaligus meningkatkan produktivitas usaha taninya.

Dalam konteks kebijakan ini dapat direalisasikan dalam wujud pembangunan areal pertanian baru yang luas di beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk dibagikan kepada buruh-buruh tani (petani tanpa lahan), para petani gurem (petani berlahan sempit), para peladang berpindah, dan perambah hutan yang diikuti dengan bimbingan budi daya pertanian secara modern serta mekanisasi pertanian berorientasi komersial (agrobisnis) [27].

Dalam skala makro, pemerintah harus mendorong kebijakan harga yang fair. Dalam hal ini sangat penting adanya kebijakan harga dasar yang efektif dan penerapan tarif impor secara simultan. Hendaknya semua parasit ekonomi pertanian seperti penyelundup, tengkulak, pengijon, preman desa, rentenir, elite desa dan kota, serta para birokrat yang terlibat dalam aktivitas langsung dan kebijakan di lapangan supaya dibersihkan, baik keberadaan maupun perilaku mereka. Sebab kenaikan harga pangan tidak akan dinikmati petani, tetapi oleh para parasit ekonomi tersebut.

Peningkatan akses petani terhadap kredit dan perbaikan kualitas pelayanan kredit, menghilangkan lembaga pencari rente dan kelompok free rider, serta sebanyak mungkin memberikan dana berputar atau pinjaman lunak untuk perbaikan sarana penyimpanan, transportasi, dan pemasaran hasil pertanian. Akses terhadap input produksi penting seperti pupuk dapat diwujudkan dengan menerapkan kembali kebijakan subsidi pupuk. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu membuat memorandum of understanding dengan pemda-pemda yang memiliki lahan-lahan pertanian subur untuk tidak mengizinkan alih fungsi lahan lahan tersebut dan tidak kalah penting adalah introduksi agroindustri pedesaan [28].

Kedua, kebijakan yang berorientasi menjaga aspek keterjangkauan pangan meliputi pemetaan wilayah-wilayah yang potensial rawan pangan dan perbaikan akses serta ketersediaan logistik ke wilayah-wilayah tersebut. Juga sangat penting untuk menerapkan program perlindungan sosial berkala berupa program OPK (operasi pasar khusus) dan raskin (beras untuk rakyat miskin) sebagai sarana indirect income transfer untuk kelompok-kelompok miskin kronis. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan per daerah tingkat Kecamatan tentang jumlah dan sebaran kelompok tersebut. Pemetaan ini penting agar program perlindungan sosial ini dapat tepat sasaran. Kemudian juga harus dilakukan kebijakan diversifikasi pangan. Kebijakan ini bertujuan membiasakan rakyat mengonsumsi makanan sehari-hari dari berbagai jenis pangan. Dengan terwujudnya kebiasaan makan yang baru, maka ketergantungan terhadap salah satu komoditas pangan dapat direduksi. Untuk mengaplikasikan kebijakan ini pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar terwujud kebijakan penganekaragaman pangan nasional yang berbasis lokal. Alternatif kebijakan ini, Pertama, pengembangan resource untuk produksi beragam pangan lokal termasuk dukungan kebijakan harga, riset dan pengembangannya untuk memacu produktivitas komoditas lokal nonberas. Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal dengan pembinaan kreativitas masyarakat dalam memproduksi, memanfaatkan, dan mengkonsumsi berbagai jenis pangan lokal [28]. Ketiga, pengolahan dan penyediaan berbagai jenis bahan pangan dalam bentuk siap olah untuk masyarakat daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan dan temuan-temuan di bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan yang kompleks dengan keterkaitan antar banyak pelaku dan daerah dengan dinamika perubahan antar waktu, maka koordinasi dan sinergisitas yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi tersebut pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2021 yang mengatur koordinasi, evaluasi dan pengendalian

upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini tetah terbentuk sebanyak 32 Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan 339 Dewan Ketahanan Pangan kabupaten / kota.

2. Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Program Menuju Ketahanan Pangan Dan Gizi 2015 cukup baik, karena mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebiiakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang telah diterbitkan meniadi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan Ketahanan pangan).

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. P. Saliem and M. Ariani, "Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi," *Forum Penelit. Agro Ekon.*, vol. 20, no. 1, p. 12, 2016, doi: 10.21082/fae.v20n1.2002.12-24.

[2] R. Dinas Ketahanan Pangan, Propinsi, "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan," 2018.

[3] M. Apriyanto, P. Diawati, L. Fangohoi, F. Azuz, and E. Sutrisno, "Small-scale Coconut Farmers in Indragiri Hilir District as a Model of Youth Entrepreneurship in the Plantation Sector," in *International Conference on Social, Economics, Business, and Education (ICSEBE 2021)*, 2022, pp. 69–72.

[4] M. Apriyanto, M. Arpah, and A. Junaidi, "ANALISIS KESIAPAN PETANI SWADAYA DALAM MENGHADAPI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 44 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DITINJAU DARI ASPEK STATUS LAHAN, LEGALITAS DAN SUMBER BIBIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR," *J. Teknol. Pertan.*, vol. 8, no. 1, pp. 38–48, May 2019, doi: 10.32520/jtp.v8i1.970.

[5] M. Apriyanto, K. N. S. Fikri, and A. Azhar, "Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir," *PaKMas (Jurnal Pengabdi. Kpd. Masyarakat)*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2021.

[6] M. Apriyanto and Rujiah, "Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan Menggunakan Metode GIS (Geographic Information System)," *J. Food Syst. Agribus.*, vol. 5, no. 1, pp. 54–61, 2021.

[7] A. Sutoyo, "Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Propinsi Bengkulu," *J. Adm. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 93–116, 2013.

[8] Hartono, *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2020*. 2020.

[9] S. Muryono and W. Utami, "PEMETAAN POTENSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN," *BHUMI J. Agrar. dan Pertanah. Receiv.*, vol. 6, no. 2, pp. 201–218, 2020.

[10] S. Hidayana, *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi Sawah*. repository.umsu.ac.id, 2019.

[11] M. Taufik, A. Kurniawan, and F. M. Pusparini, "Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2B) Menggunakan Metode Multi Data Spasiali Di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan," *Geoid*, vol. 13, no. 1, p. 63, 2018, doi: 10.12962/j24423998.v13i1.3679.

[12] T. B. Purwantini, "Pendekatan Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Karakteristik, dan Penyebabnya," *Forum Penelit. Agro Ekon.*, vol. 32, no. 1, p. 1, 2016, doi: 10.21082/fae.v32n1.2014.1-17.

[13] D. L. Permatasari and V. Ratnasari, "Pemodelan Ketahanan Pangan di Indonesia dengan Pendekatan Regresi Probit Ordinal," *J. Sains dan Seni ITS*, vol. 5, no. 2, pp. 151–156, 2016, doi: 10.12962/j23373520.v5i2.16530.

[14] N. I. Hapsari and I. Rudiarto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang," *J. Wil. dan Lingkung.*, vol. 5, no. 2, p. 125, 2017, doi: 10.14710/jwl.5.2.125-140.

[15] F. E. Prasmatiwi, B. Arifin, I. Nurmayasari, Y. Saleh, and ..., *KAJIAN KELEMBAGAAN LUMBUNG PANGAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI LAMPUNG*. repository.lppm.unila.ac.id, 2018.

[16] R. Kusniati, "Analisis Perlindungan

Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Inov. J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. No 2, pp. 1–30, 2013.

[17] G. I. Janti, E. Martono, and Subejo, "PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN PANGAN WILAYAH (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *J. Ketahanan Nas.*, vol. 22, no. 1, p. 1, 2016, doi: 10.22146/jkn.16666.

[18] S. N. Qodriyatun, "Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut," *Aspir. J. Masal. Sos.*, 2019.

[19] A. Amalina, S. D. Binasasi, and H. Purnaweni, "Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang," *Gema Publica*, vol. 3, no. 2, p. 92, 2018, doi: 10.14710/gp.3.2.2018.92-102.

[20] N. Rusono *et al.*, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas*, p. 2, 2015.

[21] E. P. Irwanto, "Dinamika Ekonomi Politik dalam Kebijakan Pertanian dan Pangan," *Masyarakat Indonesia*. jmi.ipsk.lipi.go.id, 2020.

[22] S. P. E. Santosa, I. N. Ulupi, I. I. Arief, M. S. SPt, and ..., *Sirkular Ekonomi dan Ketahanan Pangan: Inovasi Teknologi, Bioprospektif dan Tata-Kelola Pangan Lokal*. books.google.com, 2022.

[23] U. S. Suharto, "ANALISIS KONSEP KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM PERTAMBAHAN HASIL YANG SEMAKIN MENURUN (STUDI KASUS KOMODITAS PADI …," *J. Ekon.*, 2020.

[24] S. Ghosh-Jerath, "Pathways of Climate Change Impact on Agroforestry, Food Consumption Pattern, and Dietary Diversity Among Indigenous Subsistence Farmers of Sauria Paharia Tribal Community of India: A Mixed Methods Study," *Front. Sustain. Food Syst.*, vol. 5, 2021, doi: 10.3389/fsufs.2021.667297.

[25] T. Muzerengi and H. M. Tirivangasi, "Small grain production as an adaptive strategy to climate change in Mangwe District, Matabeleland South in Zimbabwe," *Jàmbá J. Disaster Risk Stud.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–9, Oct. 2019, doi: 10.4102/jamba.v11i1.652.

[26] N. Hanani, S. Sujarwo, and R. Asmara, "INDIKATOR DAN PENILAIAN TINGKAT KERAWANAN PANGAN KELURAHAN UNTUK DAERAH PERKOTAAN," *Agrise*, vol. XV, no. 2, pp. 101–109, 2015.

[27] M. Masganti, K. Anwar, and M. A. Susanti, "Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian," *J. Sumberd. Lahan*, vol. 11, no. 1, p. 43=52, 2020, doi: 10.21082/jsdl.v11n1.2017.43-52.

[28] R. Anggari, Zulfan, and Husaini, "Alih Fungsi Lahan Sawah ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005-2014," *Karya Imiah Mhs. Pendidik. Sej.*, vol. 1, no. 1, pp. 28–38, 2016.

[29] C. C. Truzi *et al.*, "Food consumption utilization, and life history parameters of helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) reared on diets of varying protein level," *J. Insect Sci.*, vol. 19, no. 1, 2019, doi: 10.1093/jisesa/iey138.

e-ISSN: 2620-3332 SELODANG MAYANG

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI RIAU

Nelva Siskawati[1] Widyawati[1]
[1]Universitas Islam Indragiri

Email: nelvasiskawatimgt@gmail.com (korespondensi)

Abstract

This Study aims to determine how much influence the Human Development Indeks and Population in the Regency/City Of Riau Province have, from 2018 to 2020 with a total of 36 samples. The data taken is sourced from secondary data, namely the Central Bureau of Statistics of Indragiri Hilir regency. The data analysis technique used is multiple linear Regression analysis. The final result can be concluded that in the last three years from 12 regencies/cities in Riau Provinces, both partially and simultaneously, it is known that the Human Development Index (IPM) and Population Number do not affect the level of the poor.

Keywords: *Human Developmen Index, Total Population, Poor Population.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provisinsi Riau, mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan jumlah 36 sampel . Data yang diambil bersumber dari data sekunder yaitu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil akhir dapat di simpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, baik secara Parsial maupun Simultan di ketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk tidak mempengaruhi Tingkat Penduduk Miskin.

Kata kunci: *Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan individu ataupun kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan yang layak. Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan selalu menjadi polemik bagi pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Terkadang kemiskinan bukan saja di sebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang di rencanakan oleh pemerintah, namun adanya faktor kebiasaan atau yang disebut dengan miskin budaya menjadi salah satu penyebab sulitnya dalam proses pengurangan angka kemiskinan tersebut. Banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadikan salah satu penghambat negara dalam berproses menjadi negara maju.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang penduduk miskin. Lahir dan tumbuhnya era reformasi belum bisa menumpas kemiskinan di Indonesia sehingga menjadi catatan panjang kasus kemiskinan serta menjadi tugas yang harus segera di tuntaskan oleh pemerintah.

Indeks Pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Tahun 2020 capaian pembangunan manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau berstatus tinggi dengan rata – rata pertumbuhan 0,52 %.

Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah atau semakin nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah mendekati angka 100 maka semakin bagus pula tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut. Sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di daerah tersebut. Jika

Indeks pembangunan di suatu daerah masuk dalam kategori rendah maka akan berdampak naiknya angka pengangguran di daerah tersebut.

Badan Pusat statistik (BPS) Riau menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau terus mengalami kemajuan, pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia meningkat 0,23 poin dari tahub 2020 yang mencapai 72,94%. Sedangkan Persentase penduduk miskin di Riau mencapai 7,12% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 496,66 ribu jiwa.

Semakin tingginya lajunya perkembangan pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan kemiskinan, hal ini disebabkan karena manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil – hasil pertanian yang menyebabkan penduduk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya kemiskinan.

Tabel 1 **P**erbandingan Penduduk Miskin yang tetinggi dan yang terendah di Kabupaten/Kota Provinsi riau tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin
Tertinggi	
Rokan Hulu	73,35
Kampar	65,3
Terendah	
Siak	25,38
Dumai	9,88

Sumber : BPS INHIL

Data Penduduk miskin yang paling tinggi berada di peringkat pertama sekabupaten/kota di Provinsi Riau adalah Rokan Hulu dengan jumlah 73,35 ribu jiwa dan peringkat kedua ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah 65,3 ribu jiwa. Untuk peringkat paling rendah ada di Kabupaten Dumai dengan jumlah 9,88 ribu jiwa dan disusul oleh Kota Dumai berjumlah 25,38 ribu jiwa penduduk miskin.

Tabel 2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tetinggi dan yang terendah di Kabupaten/Kota Provinsi riau tahun 2020.

Kabupaten/Kota	IPM
Tertinggi	
Pekanbaru	81,32
Dumai	74,4
Terendah	
Indragiri Hilir	66,54
Rokan Hilir	68,93

Sumber : BPS INHIL

Pada tahun 2020 Kota Pekanbaru mencapai angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tinggi yaitu mencapai 81,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru sudah mendekati angka yang bagus dalam tingkat pencapaian pembangunan manusianya. Walaupun Indragiri Hilir berada di atas angka 50 persen yaitu 66,54 persen. Namun Indragiri Hilir masih termasuk kategori rendah dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Tabel 3 Perbandingan Jumlah Penduduk yang tetinggi dan yang terendah di Kabupaten/Kota Provinsi riau tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
Tertinggi	
Pekanbaru	982.356
kampar	841.332
Terendah	
Dumai	316.782
Kep.Meranti	206.116

Sumber : BPS INHIL

Selain tingkat Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Pekanbaru berada di angka paling tinggi Se Kabupaten/kota Di Provinsi riau, Kota pekanbaru juga memiliki jumlah penduduk yang palin tinggi yaitu mencapai 982.356 ribu jiwa. Sedangkan kabupaten Kepulauan meranti memiliki jumlah penduduk yang paling rendah yaitu sekitar 206.116 ribu jiwa.

M. Alhudori dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pengaruh IPM,PDRB Dan Jumlah Pengangguran terhadap penduduk miskin di provinsi Jambi menyatakan bahwa IPM dan Jumlah Pengangguran memiliki hubungan yang positif, yaitu jika IPM dan Jumlah Pengangguran meniingkat maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitiannya bahwa ada pengaruh yang signifikan IPM dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk miskin.

Berbeda dengan hasil penelitian Heri setyawan dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Di Jawa Timur menemukan bahwa IPM memiliki Hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, yaitu jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di

Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga dibuktikan dari hasil penelitiannya yang menemukan bahwa adanya pengaruh negatif Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Dari Perbedaan hasil kedua literatur tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa pengaruh Indeks pembangunan manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KEMISKINAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefenisikan bahwa Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*basic needs aproach*) yang di ukur dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kemiskinan Relatif
   Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima olehkelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.
b. Kemiskinan Absolut
   Kemiskinan absolut di artikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari seseorang tidak tercukupi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keperluan hidup dan bekerja.

2.2 JUMLAH PENDUDUK

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefenisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan menetap.

Suparmoko (2000;256) dalam jurnal Novisilastri yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduuk Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu :

1. Tingkat Kelahiran
2. Tingkat Kematian
3. Tingkat Migrasi atau Perpindahan penduduk.

2.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator alat ukur terpenting dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia biasanya digunakan sebagai penentu peringkat/level pembangunan pada suatu wilayah atau negara yang digunakan dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Selain itu dapat juga di gunakan sebagai penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

Tiga bentuk Dimensi Dasar Indeks Pembangunan Manusia,yaitu :

1. Umur Panjang Dan Hidup Sehat
2. Pengetahuan
3. Standar Hidup Layak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Data Publikasi Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data time series (data deretan waktu) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin dari 12 Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau selama periode 2018 - 2020.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dengan menggunakan seluruh populasi yaitu 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2018 -2020, sehingga berjumlah 36 sampel.

Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Yit = a + B1X1 + B2X2$$

Keterangan Rumus :

Yit : Penduduk Miskin

X1 : Indeks Pembangunan Manusia

X2 : Jumlah Penduduk

a : Konstanta

B1,B2 : Koefesien

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Normalitas

Tabel 4. Uji normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.117	36	.200*	.951	36	.110

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

(Sumber: OUTPUT SPSS VERSI 24)

Dari Tabel output di atas maka terlihat bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berati data pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.2. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.334[a]	.112	.058	19.57428	.112	2.074	2	33	.142	2.437

a. Predictors: (Constant), JP, IPM

b. Dependent Variable: Kemiskinan

(Sumber: OUTPUT SPSS VERSI 24)

Dari output spss diatas diketahui bahwa nilai Durbin watson yaitu sebesar 2.437 lebih besar dari DL = 1.2953 dan DU = 1.6539, yang bearti data terbebas dari autokorelasi.

Dari Output di atas diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yang berarti bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

4.3. Persamaan Regresi Berganda

Tabel 6. Output Coeffecients

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	103.100	62.134		1.659	.107	-23.314	229.513
	IPM	-1.099	.869	-.210	-1.264	.215	-2.867	.670
	JP	2.081E-5	.000	.293	1.765	.087	.000	.000

a. Dependent Variable: Kemiskinan

(Sumber: OUTPUT SPSS VERSI 24)

Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Y = 1003,100 - 1,099X1 + 0,000021X2}$$

Defenisi :

a. Y = 1003,100
   Artinya : Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk di anggap nol, maka Penduduk Miskin akan konstan sebesar 1003,100 jiwa.
b. -1,009X1
   Artinya : Jika terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar satu persen (1%) maka penduduk Miskin akan menurun sebesar -1,009 persen
c. +0,00002X2
   Artinya : Jika terjadi kenaikan Jumlah Penduduk sebesar satu persen (1%) maka Penduduk Miskin akan meningkat sebesar 0,00002 persen.

Dari persamaan regresi Berganda di atas dapat kita lihat bahwa adanya hubungan negatif antara Indeks Pembangunan manusia (IPM) dengan kemiskinan, ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi Indeks Pembangunan manusia (IPM) Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Sedangkan Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan, yang berarti semakin tinggi kenaikan jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

4.4. Uji Koefesien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefesien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.334[a]	.112	.058	19.57428	.112	2.074	2	33	.142

a. Predictors: (Constant), JP, IPM

b. Dependent Variable: Kemiskinan

(Sumber: OUTPUT SPSS VERSI 24)

Di lihat dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa porsentase pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan atau penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau hanya sekitar 11,2 %, sisanya di pengaruhi oleh variabel lain sekitar 88,8 %.

Dari output hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk tidak terlalu mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk miskin sekabupaten/Kota Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Uji Partial

Pada tabel 3 di atas dapat kita lihat bahwa masing – masing nilai signifikansi melebihi 0.05 yang menunjukkan arti yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penduduk miskin. Begitu juga dengan variabel jumlah penduduk juga tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin.

4.5.2. UJI SIMULTAN

Tabel 5. Uji Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1589.611	2	794.805	2.074	.142[b]
	Residual	12644.031	33	383.152		
	Total	14233.642	35			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), JP, IPM

(Sumber: OUTPUT SPSS VERSI 24)

Dari Output tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang mengandung arti bahwa secara simultan atau secara serentak bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Se Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Yang artinya masih banyak variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah penduduk miskin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Novri Silastri yang memperoleh bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi.

Variabel Indeks Pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian ini memiliki hubungan negatif dengan Kemiskinan, namun tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut penulis hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk miskin yang disebabkan oleh faktor budaya atau rasa malas dari lingkungan keluarga itu sendiri, sehingga mereka merasa sudah cukup dan menikmati keadaan yang mereka jalani, dan pada akhirnya menimbulkan pikiran bahwa tidak perlu mencapai pendidikan yang tinggi, asal bisa makan sehari – hari sudah merasa cukup.

Kondisi seperti ini pun dapat kita lihat sendiri di lapangan, banyak sekali masyarakat atau penduduk miskin yang apabila dapat rezeki lebih maka akan menghabiskan semua yang mereka dapat pada hari itu dengan prinsip besok adalah urusan besok. Atau ketika mendapatkan rezeki lebih, banyak yang memilih meliburkan diri dari mencari rezeki karena merasa ada cadangan untuk beberapa hari kedepan.

5.2. Saran

Dari Hasil Penelitian yang menyimpulkan kedua variabel tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Jumlah Penduduk tidak memiliki Pengaruh Terhadap Penduduk Miskin Di Kabupaten /Kota Provinsi Riau dan banyak tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang rata - rata mengatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penduduk Miskin, maka Perlu dilakukan penelitian lanjutan, dengan menambah variabel bebas agar dapat mengetahui variabel - variabel apa saja sebenarnya yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan atau penurunan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. M, "*Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi ",* Jurnal Of Economic and Business.

[2] B. Prasetya, "*Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia* (*IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter Dan Multidimensi) Di Indonesia* ".

[3] https://inhilkab.bps.go.id/ S.

[4] Heri, *"Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2020." Center Of Economic and Public Policy.*

[5] MJ.Silaban Putri sari, *Pengaruh IPM Dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara Tahun 2002-2017",* Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah.

[6] Silastri N, "*Pengaruh Jumlah penduduk Dan Pendapatan Domestik Regional*

Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi , JOM Fekon, 2017.

[7] Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi.Edisi Ketiga.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

e-ISSN: 2620-3332 SELODANG MAYANG

PENGARUH LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU 50C TERHADAP KUALITAS FISH BALL PATIN PADA KEMASAN VAKUM DAN NONVAKUM

Monalisa Hasibuan[1], Zulkarnain[1], Tengku Marlina Cahyani[1], Suradi[1]
[1,]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

Email: hafizhha936@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Catfish have a lot of vitamins and minerals that are beneficial for health and intelligence. The nutritional content contained in catfish is protein and Omega 3 fat, and the texture of catfish is tasty and soft. Processed catfish products are consumed fresh or produced in the form of filets, meatballs, dumplings, fish balls, fish tofu meatballs, empek-empek, sausages, and nuggets, which from the results of organoleptic tests on taste, appearance, aroma, and texture are good and tend to be liked by children, youth, adults and parents. The aim of the study was to determine the shelf life, microorganisms, and proximate content of catfish fish ball processed products, vacuum and non-vacuum at 5 0C with a shelf life of 0 days, 5 days, and 10 days. This study uses a survey method, collecting data from a representative population (sample). Proximate test results and E. coli fish ball microorganisms in catfish, proximate parameters; There was no significant difference in the moisture content, ash content, protein, fat, and carbohydrates in vacuum and nonvacuum packaging. Parameters of E. coli microorganisms in vacuum and nonvacuum packaging met food quality standards. The results of the t-test showed proximate parameters and E. coli microorganisms, catfish in a vacuum and nonvacuum storage, it was found that the significance value (2-tailed) α > 0.05 indicated there was no difference between research subjects.

Keywords*: Catfish, Vacuum, Non Vacuum, Proximate,*

Abstrak

Ikan patin memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin adalah protein dan lemak Omega 3, tekstur ikan patin tergolong gurih dan lembut. Produk olahan ikan patin dikonsumsi segar atau diproduksi dalam bentuk *file*t, bakso, siomay, *fish ball*, bakso tahu ikan, empek-empek, sosis dan nugget, dimana dari hasil uji organoleptik terhadap rasa, rupa, aroma dan tekstur yang baik dan cenderung disukai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Tujuan penelitian untuk mengetahui masa/waktu simpan, mikroorganisme dan kandungan proksimat produk olahan *fish ball* ikan patin, vakum dan non vakum pada suhu 5 ^{0}C umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari. Penelitian ini menggunakan metode survei, mengumpulkan data dari populasi yang terwakilkan (sampel). Hasil uji proksimat dan mikroorganisme E.coli *fish ball* ikan patin, parameter proksimat; kadar air, kadar abu, protein, lemak dan karbohidrat pada kemasan vakum dan non vakum tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Parameter mikroorganisme E. coli pada kemasan vakum dan non vakum memenuhi standar mutu makanan Hasil Uji t menunjukkan parameter proksimat dan mikroorganisme E.coli *fish ball* ikan patin penyimpanan vakum dan non vakum diketahui bahwa nilai signifikansi (2-tailed) α >0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan antar subjek penelitian.
Kata kunci : *Ikan patin, Vakum, Non Vakum, Proksimat, Mikroorganisme*

1. PENDAHULUAN

Ikan patin adalah sekelompok ikan berkumis ordo (*Siluriformes*) keluarga *Pangasiidae*. Nama ikan patin juga disematkan pada salah satu anggotanya, *Pangasius sp*. Jenis ikan ini bernilai ekonomi dan banyak dikembangkan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar sebagai lokasi sentra ikan patin. Ikan patin dapat berukuran sangat besar (5-

10 Kg), dimana tubuhnya bisa mencapai panjang 2 (dua) meter lebih.

Ciri-ciri umum dari ikan patin yaitu memiliki tubuh berwarna putih perak, dua pasang kumis yang pendek, tidak bersisik dan senang berkelompok. Habitat ikan patin berada di tepian sungai besar, muara sungai dan danau. Saat ini banyak dikembangkan di sungai, danau dan kolam-kolam pengembangan.

Ikan patin memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin adalah protein dan lemak omega 3. Tekstur ikan patin tergolong gurih dan lembut. Biasanya ikan patin dikonsumsi segar atau diproduksi dalam bentuk *file*t, bakso, siomay, *fish ball*, bakso tahu ikan, empek-empek, sosis dan nugget, dimana dari hasil uji organoleptik terhadap rasa, rupa, aroma dan tekstur cenderung disukai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Dalam rangka menciptakan produk dan kesukaan masyarakat terhadap ikan, perlu adanya diversifikasi pengolahan terhadap ikan dengan penerapan teknologi tepat guna, mudah dan murah. Sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai gizi baik serta disukai oleh masyarakat seperti *fish ball* ikan Patin. Produk ini dapat dikembangkan melalui UMKM dengan biaya murah, teknologi sederhana dan waktu simpan yang dapat diketahui dari hasil penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ikan Patin (Pangasius sp)

Ikan patin (*Pangasius sp*) adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Hal ini disebabkan harganya terjangkau sehingga pemanfaatan ikan patin terdistribusi secara merata hampir di seluruh pelosok tanah air. Ikan patin memiliki berbagai kelebihan, yaitu pertumbuhannya cepat, memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, rasanya enak dan kandungan gizinya cukup tinggi. Ikan patin juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kandungan lemak yang tinggi dan pH tubuh ikan yang mendekati netral menyebabkan daging ikan mudah busuk, oleh karena itu diperlukan proses pengolahan untuk pemanfaatannya menjadi berbagai bentuk produk (Anggara et al., 2016).

Komoditi perikanan yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya adalah ikan patin. Daging ikan patin memiliki karakteristik rasa yang sangat khas, kandungan gizi daging ikan patin terdiri dari 14,53% protein; 1,09% lemak; 0,74% abu dan 82,22% air (Maghfiroh (2000) dalam K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, 2013).

Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan air tawar asli Indonesia dengan kandungan protein serta omega 3 yang cukup tinggi dan memiliki karakteristik berdaging putih Pada umumnya ikan berdaging putih lebih baik dari pada ikan berdaging merah dalam pembentukan gel. Daging ikan patin yang berwarna putih sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan bakso. Berdasarkan hal di atas serta keistimewaan yang dimiliki ikan patin yaitu memiliki berdaging putih maka daging ikan patin baik diolah sebagai bahan baku pada pembuatan bakso ikan (Anggara et al., 2016). Produk olahan pangan dibuat dengan tujuan memperpanjang masa simpan produk, mencegah kebusukan dan mempertahankan kualitas dari produk (Almatsier, 2004).

2.2. Olahan Ikan Patin (Pangasius sp)

Produk olahan daging ikan patin telah banyak dilakukan, diantaranya bakso ikan, siomay ikan, bola-bola ikan, bakso tahu ikan, empek-empek, sosis ikan, nugget ikan patin dan *fish ball*, dengan hasil secara organoleptik terhadap rasa, rupa, aroma dan tekstur yang baik (Sugiyona, 2017).

Salah satu bentuk produk diversifikasi perikanan yang diharapkan akan mampu meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat ialah bakso ikan. Bakso ikan merupakan salah satu jenis produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging ikan yang dilumatkan, dicampur dengan bahan lain, dibentuk bulatan, dan selanjutnya direbus. Bakso banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak, tekstur yang kenyal, empuk dan lembut serta penyajiannya yang mudah. Dalam rangka menciptakan produk dan kesukaan masyarakat terhadap ikan, perlu adanya diversifikasi pengolahan terhadap ikan dengan penerapan teknologi tepat-guna, mudah dan murah, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai gizi yang baik serta disukai oleh masyarakat (K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, 2013).

2.3. Parameter Kualitas Olahan Ikan Patin (Pangasius sp)

Penilaian organoleptik terhadap mutu nugget ikan patin meliputi penilaian rupa, rasa, aroma, dan tekstur nugget ikan patin. Uji organoleptik atau dikenal dengan uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera mausia sebagai alat utama untuk menilai. Kandungan gizi dalam suatu produk merupakan parameter yang paling penting bagi konsumen dalam mempertimbangkan pemilihan makanan yang dikosumsinya. Salah satu cara untuk menentukan kandungan gizi suatu produk yaitu dengan menggunakan analisis proksimat (Sugiyona, 2017).

Makanan belum mempunyai titik beku yang pasti, pembekuan dipengaruhi oleh kadar air dan komposisi kandungan gizi. Pola pembekuan umumnya menunjukkan garis datar (*plateau*) antara 0^0 dan -5 ^{0}C berkaitan dengan perubahan (fase) air menjadi es. Pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan pada suhu dibawah -12^{0}C belum dapat diketahui dengan pasti. Mikroorganisme *psikrofilik* mempunyai kemampuan untuk tumbuh pada suhu lemari es, terutama di antara 0^0 dan 5 ^{0}C. Jadi penyimpanan yang lama pada suhu-suhu ini baik sebelum atau sesudah pembekuan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan oleh mikroba (K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, 2013).

Selain dari faktor pengetahuan dan faktor ekonomi, hal ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di pasar/tempat-tempat makan dalam bentuk yang mudah diolah, mempunyai daya simpan, bentuk, rupa, bersih, kemasan dan aman serta memenuhi cita rasa yang sama dalam kondisi segar. Perlunya pengembangan teknologi pangan tepat guna, untuk mengubah berbagai bahan pangan menjadi bahan pangan siap olah (Almatsier, 2004).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode survei dilakukan dengan mengumpulkan data dari populasi yang terwakilkan (sampel) mengacu kepada (Sugiyono, 2017). *Fish ball* diperoleh dari salah satu UMKM yang berada di Kota Pekanbaru, sample *fish ball* terdiri dari Vakum (V) dan Non Vakum (NV) yang dikemas dalam kemasan makanan dan diberi label. Uji proksimat dan mikroorganisme.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil uji laboratorium mikroba dan proksimat menggunakan uji t (signifikasi) XL.

Uji validitas data parameter mikro organisme dan proksimat yang diperoleh dari hasil uji laboratorium dilakukan 2 (dua) kali perulangan (*duflo*). Mengacu pada (Sugiyona, 2017), distribusi data mengikuti sebaran normal, jumlah sampel n <30 dapat memakai uji t (rata-rata) persamaan (1).

$$t = \frac{\ddot{X} - \mu 0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \qquad (1)$$

Dimana :

t = nilai t hitung
$\ddot{X}$ = nilai rata-rata
μ0 = nilai yang dihipotesakan
s = simpangan baku
n = jumlah sampel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kemasan Makanan dan Masa Simpan Suhu 5 ^{0}C

Untuk mempertahankan mutu *fish ball* ikan patin (*Pangasius sp.*) dikemas dalam kemasan makanan. Ada 2 (dua) metode pengemasan produk olahan yaitu vakum dan non vakum. Pengemasan vakum merupakan pengemasan hampa udara pada tekanannya kurang dari 1 atm bebas oksigen pada saat disimpan. Proses pengemasan vakum dilakukan dengan memasukkan produk *fish ball* ke dalam kemasan plastik yang selanjutnya menggunakan mesin pengemas vakum (*Vacum Packager*) dan kemasan ditutup bebas udara. Kemasan non vakum adalah kemasan yang masih memungkinkan udara dan air masuk pada saat produk *fish ball* dikemas (pengemasan biasa). Selanjutnya *fish ball* kemasan vakum dan non vakum disimpan pada suhu ruang 5 ^{0}C untuk mencegah kerusakan. Kemasan vakum bebas udara dalam penyimpanan *fish ball* dapat mencegah kerusakan akibat oksidasi sehingga kesegaran produk akan lebih bertahan lebih lama dari produk yang disimpan non vakum.

Perlakukan pengemasan bahan pangan dan olahannya untuk melindungi dan mejaga kualitas gizi. Kerusakan yang terjadi mungkin spontan, tetapi ini sering disebabkan keadaan di luar dan kebanyakan pengemasan digunakan untuk membatasi antara bahan pangan dalam keadaan normal sekelilingnya untuk menunda proses kerusakan dalam jangka waktu yang diinginkan (K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, 2013).

Menurut Nurul Asiah dkk (2020), baik pangan segar maupun pangan olahan sebaiknya dikemas untuk melindungi

pangan. Kemasan sangat berperan dalam menjamin mutu pangan sebelum masa kedaluarsanya. Saat ini telah banyak jenis kemasan pangan, seperti plastik, kertas/karton/logam dan lain-lain. Tiap jenis kemasan hanya akan sesuai untuk pangan tertentu, sebagai contoh untuk pangan beku, kemasan yang sesuai adalah plastik. Kemasan yang dipilih harus mampu melindungi pangan dari kehilangan air, masuknya air, mikroba dan kontaminan lain yang dapat mempengaruhi keamanan dan mutu pangan tersebut.

Pendinginan dan pembekuan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan produk dari proses pembusukan, sehingga mampu disimpan lama sampai tiba waktunya untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi. Penyimpanan menggunakan suhu dingin merupakan salah satu proses pengawetan yang mampu mempertahankan mutu bakso dan melindungi produk dari bakteri pembusuk (Anggara & Nopianti, 2016).

4.2. Proksimat dan Mikroorganisme

Hasil uji proksimat *fish ball* ikan patin dimana setiap kemasan vakum dan non vakum berjumlah 40 buah dengan berat 390 gram dan uji mikroorganisme pada setiap kemasan vakum dan non vakum *fish ball* ikan patin berjumlah 10 buah dengan berat 100 gram. Variasi umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Uji Proksimat dan Mikroorganisme *Fish Ball* Ikan patin Kemasan Vakum dan Non Vakum Suhu 5 ^{0}C

No	Parameter	Satuan	Vakum (V)			Nonvakum (NV)			Syarat Mutu
			0 hr	5 hr	10 hr	0 hr	5 hr	10 hr	
	Proksimat								
1	Kadar Air	%	69,73	72,17	72,00	69,75	72,23	72,47	
2	Kadar Abu	%	1,70	1,84	1,98	1,67	1,85	1,96	
3	Kadar Protein	%	8,82	8,25	7,88	8,29	7,31	7,71	
4	Kadar KH	%	13,26	12,97	12,53	13,31	12,74	12,29	
5	Kadar Lemak	%	0,28	0,44	0,54	0,27	0,45	0,52	
	Mikro Organisme								
	E.Coli	APM/g	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3

Sumber : LHU uji Laboratorium UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Berdasarkan uji t parameter proksimat dan mikroorganisme E.coli *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum diketahui bahwa Nilai signifikansi (2-tailed) >0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan antar subjek penelitian, penyimpanan vakum dan non vakum pada waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari suhu 5 ^{0}C.

Kadar air *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari disajikan pada Gambar 1.

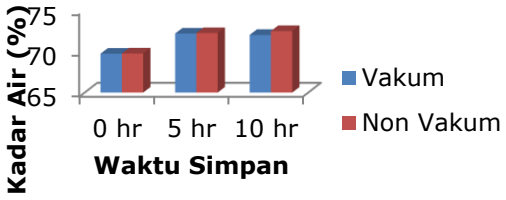

Gambar 1. Kadar Air (%) Fish Ball Vakum dan Non Vakum

Kadar air *fish ball* pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari, penyimpanan vakum dan non vakum berkisar 69 – 72% belum terlihat ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan kemasan vakum dan non vakum pada umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C, kondisi *fish ball* belum berpengaruh terhadap penggunaan kemasan dan didukung oleh uji t (α >0,05).

Menurut Anggara et al., (2016), kadar air bakso ikan patin pada kombinasi perlakuan suhu dan lama perendaman berkisar 64,14% hingga 77,96%. Nilai rata-rata kadar air bakso ikan patin berkisar 70,14% sampai dengan 75,14% (Defyanti Sinaga & Nopianti, 2017).

Kadar abu *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari disajikan pada Gambar 2.

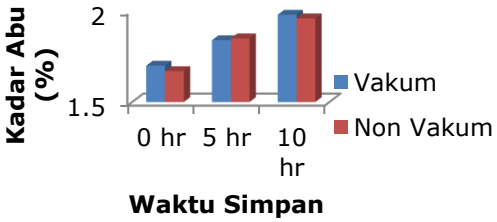

Gambar 2. Kadar Abu (%) Fish Ball Vakum dan Non Vakum

Kadar abu *fish ball* pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari, penyimpanan vakum dan non vakum berkisar 1,7 – 2% belum terlihat ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan kemasan vakum dan non

vakum pada umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C, kondisi *fish ball* belum berpengaruh terhadap penggunaan kemasan dan didukung oleh uji t (α >0,05).

Kadar abu menunjukkan kandungan mineral suatu bahan pangan. Kadar abu ditentukan berdasarkan kehilangan berat setelah pembakaran dengan syarat titik akhir pembakaran dihentikan sebelum terjadi dekomposisi dari abu tersebut (Tahar et al, 2017 dalam Botutihe Fadlianto, 2018).

Kadar protein *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari disajikan pada Gambar 3.

Kadar protein *fish ball* pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari, penyimpanan vakum dan non vakum berkisar 7 – 8% belum terlihat ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan kemasan vakum dan non vakum pada umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C, kondisi *fish ball* belum berpengaruh terhadap penggunaan kemasan dan didukung oleh uji t (α >0,05).

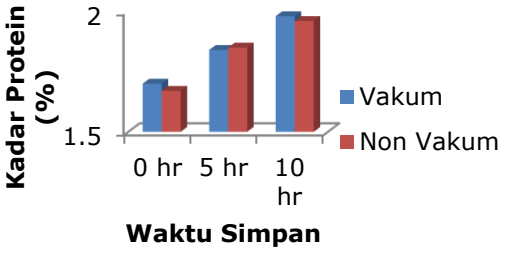

Gambar 3. . Kadar Protein (%) Fish Ball Vakum dan Non Vakum

Menurut Defyanti Sinaga & Nopianti (2017), nilai rata-rata kadar protein pada bakso ikan patin berkisar antara 3,98% hingga 7,13%. Ikan yang mengandung protein tinggi akan menghasilkan produk olahan dengan kandungan protein tinggi. Begitu juga sebaliknya dimana bahan baku yang memiliki kandungan protein yang rendah akan menghasilkan produk olahan dengan kandungan yang juga rendah. Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang dikandungnya. Protein komplek atau protein dengan nilai biologi tinggi atau bermutu tinggi adalah protein yang mengandung semua jenis asam amino esensial dalam proporsi yang sesuai untuk keperluan pertemuan. Semua protein hewani, kecuali gelatin, merupakan protein komplit (Almatsier, 2004).

Kadar lemak *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari disajikan pada Gambar 4.

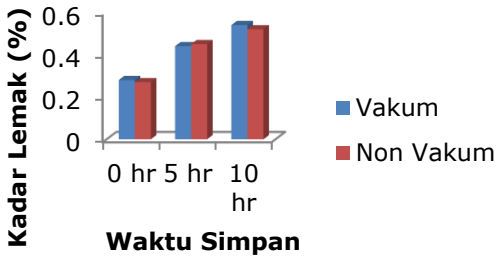

Gambar 4. Kadar Lemak (%) Fish Ball Vakum dan Non Vakum

Kadar lemak *fish ball* pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari, penyimpanan vakum dan non vakum berkisar 0,27 – 0,54% belum terlihat ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan kemasan vakum dan non vakum pada umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C, kondisi *fish ball* belum berpengaruh terhadap penggunaan kemasan dan didukung oleh uji t (α >0,05).

Rata-rata kadar lemak bakso ikan dengan penambahan bahan tambahan pangan berkisar 1,4% sampai dengan 2,16% (Defyanti Sinaga & Nopianti, 2017). Menurut K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, (2013), lemak dan minyak adalah bahan-bahan yang tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lemak dan minyak yang digunakan dalam makanan sebagian besar adalah trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan berbagai asam lemak. Komponen-komponen lain yang mungkin terdapat, meliputi fosfolipid, sterol, vitamin dan zat warna yang larut dalam lemaak seperti klorofil dan karotenoid. Peran daripada lemak (lipid) dalam makanan manusia dapat merupakan zat gizi yang menyediakan energi bagi tubuh.

Kadar Karbohidrat *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari disajikan pada Gambar 5.

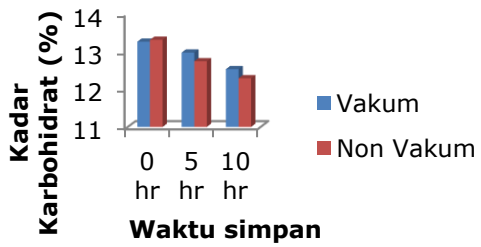

Gambar 5. Kadar Karbohidrat (%) Fish Ball Vakum dan Non Vakum

Kadar karbohidrat *fish ball* pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari, penyimpanan vakum dan non vakum berkisar 12,55 – 13% belum terlihat ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan kemasan vakum dan non vakum pada umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C, kondisi *fish ball* belum berpengaruh terhadap penggunaan kemasan dan didukung oleh uji t (α >0,05).

Bahan pengikat yang digunakan untuk membuat nuget mengandung karbohidrat, maksimal karbohidrta 20% dari 100 g berat bahan (Fazil Hazman dkk, 2023). Menurut Hilman (2008) dalam Puspa Rianti et al., (2018), bahwa karbohidrat sangat dipengaruhi oleh faktor kandungan gizi lainnya, tinggi rendahnya kandungan karbohidrat suatu produk tergantung dengan proporsi kandungan gizi dari produk. Kandungan gizi seperti air, abu, protein, dan lemak rendah, maka kandungan karbohidrat semakin meningkat.

Uji mikroorganisme E.Coli *fish ball* penyimpanan vakum dan non vakum pada pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari disajikan pada Gambar 6.

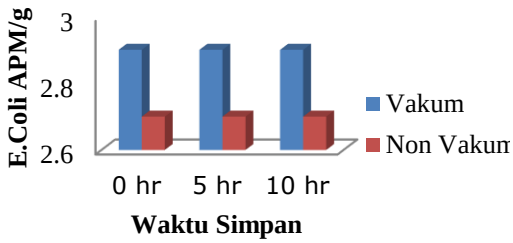

Gambar 6. Gambar Jumlah E.Coli Fish Ball Vakum dan Non Vakum menurut Waktu Simpan

Uji mikroorganisme E.Coli *fish ball* pada suhu 5 ^{0}C waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari. Penyimpanan vakum dan non vakum jumlah E.Coli <3, memenuhi standar syarat mutu makanan. Hal ini menunjukkan kemasan vakum dan non vakum pada umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari pada suhu 5 ^{0}C belum berpengaruh terhadap kualitas *fish ball* ikan patin dan didukung oleh uji t (α >0,05).

Pertumbuhan mikroorganisme di dalam atau pada makanan dapat mengakibatkan berbagai perubahan fisik maupun kimiawi yang tidak diinginkan, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Untuk hampir semua keperluan dalam mikrobiologi pangan, golongan (*genus*) dan jenis (*species*) Escheria coli mampu tumbuh secara aerobik maupun anaerobik. Mikroorganisme membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen dan beberapa unsur lainnya. Suhu adalah salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan organisme. Mikroorganisme psikrofilik mempunyai kemampuan untuk tumbuh pada suhu lemari es, terutama diantara 0 ^{0}C dan 5 ^{0}C. Jadi penyimpanan yang lama pada suhu tersebut baik sebelum dan sesudah pembekuan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan oleh mikroba. Pengemasan merupakan suatu cara dalam memberikan kondisi sekeliling yang tepat bagi bahan pangan. Kerusakan yang terjadi sering disebabkan oleh keadaan di luar dan pengemasan digunakan untuk membatasi antara bahan pangan dan keadaan normal sekelilingnya untuk menunda proses kerusakan dalam jangka waktu yang diinginkan. Bahan pangan kering beku harus dilindungi dari penyerapan uap air dan oksigen dengan cara menggunakan bahan-bahan pengemas yang mempunyai daya tembus yang rendah uap air dan oksigen(K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, 2013).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil uji proksimat dan mikroorganisme E.Coli *fish ball* ikan patin dengan dengan kemasan vakum dan non vakum pada suhu simpan 5 ^{0}C, variasi umur simpan 0 hari, 5 hari dan 10 hari adalah :

1. Parameter proksimat; kadar air, kadar abu, protein, lemak dan karbohidrat pada kemasan vakum dan non vakum tidak terdapat perbedaan yang signifikan
2. Parameter mikroorganisme E. Coli pada kemasan vakum dan non vakum memenuhi standar mutu makanan
3. Hasil Uji t menunjukkan parameter proksimat dan mikroorganisme E.Coli *fish ball* ikan patin penyimpanan vakum dan non vakum diketahui bahwa nilai signifikansi (2-tailed) α >0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan antar subjek penelitian, penyimpanan vakum dan non vakum pada waktu penyimpanan 0 hari, 5 hari dan 10 hari suhu 5 ^{0}C.

5.2. Saran

Tim peneliti menyarankan kepada UMKM yang objek usahanya dibidang olahan ikan khususnya *fish ball* ikan patin, belum perlu menggunakan kemasan vakum pada masa simpan sampai dengan 5 hari suhu 5 ^{0}C, khusus lemari pendingin tidak boleh diisi dengan bahan pangan lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau yang telah memberikan kemudahan dalam penelitian mandiri, dan UMKM yang telah memberi dukungan dalam pelaksanaanya sebagai uji petik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Almatsier, S. (2004). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. In *book: Vol.* (Empat, Issue). Gramedia Jakarta.

[2] Anggara, G., & Nopianti, R. (2016). Pengaruh Suhu dan Lama Perendaman dalam Air Dingin pada Praperebusan Terhadap Kualitas Bakso Ikan Patin (Pangasius pangasius. *Jurnal Teknologi Hasil Perikanan*, 5(2), 134–145.

[3] Botutihe Fadlianto, R. N. P. (2018). Mutu Kimia, Organolpetik, dan Mikrobiologi Bumbu Bubuk Peneydap berbahan Dasar Ikan Roa Asap (Hermihamphus FAR.). *Perbal*, 6(3), 16–30.

[4] Defyanti Sinaga, D., & Nopianti. (2017). Karakterisitik Bakso Ikan Patin (Pangasius pangasius) dengan Penambahan Karagenan, Isolat Protein Kedelai, dan Sodium Tripolyphospat. *Jurnal Teknologi Hasil Perikanan*, 6(1), 1–13.

[5] Fazil Hazman, Adhisty Muthia Rani, Dhea Riski Ismaya, Sri Maharani, Muhammad Adrian Maulana, Alfahrur Rahman, Ranee Sly Panggabean, Na'imatul Rodiah, Fakhri Syatu Kunsino, K. K. (2023). Sosialiasai Nugget Sayur Ikan Patin Untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan di Desa Koto Damai Kampar Kiri Tengah. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 26–30.

[6] K.A.Buckle, R.A. Edwards, G.H. Fleet, M. W. (2013). *Ilmu Pangan.* UI Press Jakarta.

[7] Nurul Asiah, Laras Cempaka, Kunia Ramadhan, S. H. M. (2020). Prinsip Dasar Penyimpanan Pangan Pada Suhu Rendah. Nas Media Pustaka, Makasar.

[8] Puspa Rianti, T., Hermalena, L. (2018). Karakteristik Sosis Ikan Patin (Pangasius Sp) Menggunakan Berbagai Jenis Tepung. *Unes Journal*, *2*(2), 119–127.

[9] Sugiyona. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

STUDI POTENSI PAJAK RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS

Syafrizal Thaher DS[1], Roberta Zulfhi Surya[1], Novrizal Nur[1]
[1]Universitas Islam Indragiri

Email: robertazulfhi@yahoo.co.id (korespondensi)

Abstract

The city of Tembilahan is mostly inhabited by seasonal residents with the aim of education and work, so it requires boarding house facilities. The Indragiri Hilir Regency Government has enacted Regional Regulation No. 13/2018 concerning the management of boarding houses. To increase the source of local revenue, boarding house taxes can be an alternative source of PAD. In addition, if the boarding house is managed professionally, it will also be a source of other PADs such as advertising tax, artesian well tax, and rural-urban land building tax. To carry out the formulation of the strategy, we used the business model canvas and SWOT analysis.

Keywords: *boarding houses, source of local revenue, boarding house taxes*

Abstrak

Kota Tembilahan banyak dihuni oleh penduduk musiman dengan tujuan Pendidikan dan Pekerjaan sehingga membutuhkan fasilitas rumah kos. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Perda No.13/2018 tentang pengelolaan rumah kos. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Rumah kos dapat menjadi salah satu alternatif sumber PAD. Selain itu, apabila rumah kos dikelola secara professional juga akan menjadi sumber PAD lain seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan. Untuk melakukan perumusan strategi digunakan Business Model Canvas dan Analisa SWOT

Kata kunci: *Rumah Kos, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Rumah Kos*

1. PENDAHULUAN

Di Kota Tembilahan berdiri beberapa Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal (seperti KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, dll), dan Perbankan sehingga Tembilahan ramai dihuni oleh pendatang, baik karena pekerjaan maupun pendidikan.

Seiring ramainya jumlah pendatang musiman yang biasanya berdomisili dalam kisaran waktu 1 bulan – 4 tahun. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dalam hal memilih tempat tinggal, dengan demikian Rumah Kos menjadi alternatif utama dalam pemenuhan kebutuhan hunian. Rumah kos merupakan suatu hunian atau tempat tinggal sementara yang disewakan oleh pemiliknya bagi perantau baik berjumlah satu orang maupun lebih dari satu orang, selama belum memiliki tempat tinggal rumah kontrakan atau rumah milik.

Sejalan dengan hukum ekonomi supply – demand, usaha rumah kos cukup menjamur di Tembilahan khususnya di kawasan jalan Subrantas. Tingginya jumlah rumah kos di Kawasan Jalan Subrantas dipengaruhi oleh terdapatnya Perguruan Tinggi, Dekat dengan Kantor Pemerintahan dan bernilai lokasi strategis [1][2].

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Perda No.13/2018 tentang pengelolaan rumah kos. berdasarkan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan

rumah kos dan pasal 9 ayat (2) berbunyi : pengelola rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel [3]. Apabila dioptimasi, Perda No.13/2018 dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengelolaan rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar kos dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. Objek pajak dalam hal ini adalah hotel yang termasuk di dalamnya wisma dan rumah kos, baik itu rumah kos yang permanen ataupun semi permanen yang jelasnya rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan pajak hotel 10% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [4].

Minimnya PAD bersumber dari Pengelolaan Rumah Kos di Tembilahan disebabkan oleh Pengusaha rumah kos menganggap tidak perlu memiliki izin untuk usaha rumah kos mereka. Tidak satupun dari 20 unit rumah kos yang memiliki izin. Menurut pemilik kos alasan mereka belum mengurus izin usaha mereka adalah karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara pengurusan izin tersebut [5].

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh mendapatkan informasi terkait lokasi rumah kos yang berada di Kawasan Subrantas yang berpotensi menjadi Objek Wajib Pajak Kos sehingga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Kos

Penduduk musiman seperti mahasiswa dan karyawan dalam memilih rumah kost memiliki beberapa pertimbangan dalam memilih kost misalnya ada yang memilih kost dengan lokasi yang strategis, tempat makan, fotocopy, Cafe, ataupun tempat-tempat hiburan lainnya. Ada yang memilih kost dengan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk beristirahat, atau ada juga yang lebih suka keramaian. Selain itu harga sewa dan fasilitas kost juga menjadi pertimbangan dalam memilih rumah kost

Rumah kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan.

Kamar kos adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat ringgal dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan.

2.1.1. Kewajiban dan Larangan Pemilik Kos dan Penghuni Kos

Berdasarkan Perda No. 13/2018 Kewajiban Pemilik Kos adalah sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan perizinan pengelolaan rumah kos.
b. Menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah kos.
c. Menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, dan tempat parkir.
d. Memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin Bupati.
e. Menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangan.
f. Melaporkan secara tertulis kepada lurah atau kepala desa melalui ketua RT terkait dengan jumlah identitas penghuni rumah kos setiap 3 bulan paling lama 6 bulan.
g. Membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat agar dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib di maksud.
h. Menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan.
i. Menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah
j. Mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib.
k. Memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistim kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.
l. Membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.
m. Pemilik kos wajib menggandakan kunci utama

Berdasarkan Perda No. 13/2018 Larangan Pemilik Kos adalah sebagai berikut:

a. Melanggar ketentuan perizinan.
b. Menggabungkan penghuni kamar kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri sah.
c. Bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos.
a. Membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku. Menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum

2.1.2. Kewajiban dan Larangan Penghuni Kos

Berdasarkan Perda No. 13/2018 Kewajiban Penghuni Kos adalah sebagai berikut:

a. Mentaati semua peraturan/tatatertib rumah kos.
b. Menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.
c. Saling menghormati sesame penghuni kos.
d. Menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu dengan batas waktu Pukul 21.30 WIB.
e. Melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik dan Ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangnnya.
f. Menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus suami istri.
g. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Berdasarkan Perda No. 13/2018 Larangan Penghuni Kos adalah sebagai berikut:

a. Menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan.
b. Menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras).
c. Melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindak lainnya yang melanggar hukum.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keitensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [5].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tetang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [6] yaitu :

1. Pajak daerah
   Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Dearah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi Daerah
   Disamping pajak daerah, sumber pendapatan dearah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyrakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi dearah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dearah lainnya yang Dipisahkan
   Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembagunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah,(b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian labaatas pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain
   Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daeerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu fakor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanaya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang- Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu [7]:

1. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
2. Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
3. Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
4. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
5. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa konstribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ketahun [7].

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah meliputi

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pajak Rokok. (2)

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak Sarang Burung Walet
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
   k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa **retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah ber-hak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang proibadi atau badan terlebih dahulu [8].

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagau retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yaitu:
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Persampahan/Kebersihan
  2. Retribusi KTP dan Akta Capil
  3. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat
  4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
  5. Retribusi Pelayanan Pasar
  6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  10. Retribusi Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  14. Retribusi Pengendalian lalu-lintas
- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi.

- ✓ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- ✓ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta Retribusi ini meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- ➢ Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu:
  1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
  6. Retribusi Perpanjangan IMTA

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) [9]. Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- ➢ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
  1. pelayanankesehatan;
  2. pelayanan kebersihan
  3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  4. pelayanan pasar; dan
  5. pengendalian lalu lintas.
- ➢ Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
  5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ➢ Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
  1. persetujuan bangunan gedung;
  2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  3. pengelolaan pertambangan rakyat

2.5. Business Model Canvas

Business Model Canvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan dan menangkap sebuah nilai. *Canvas* ini membagi business model menjadi 9 buah komponen utama, kemudian dipisahkan lagi menjadi komponen kanan (sisi kreatif) dan kiri (sisi logik). Persis seperti otak manusia. Ke sembilan komponen yang ada tersebut adalah sebagai berikut, (diurut dari kanan ke kiri). *Customer Segment, Customer Relationship, Customer Channel, Revenue Structure, Value Proposition, Key Activities, Key Resource, Cost Structure,* dan *Key Partners* [10][11][12].

a. *Customer Segment* (CS) yaitu menentukan segmen target customer dari bisnis yang akan dikembangkan. Posisikan diri pada sisi *customer* untukmemperhatikan apa yang dilihat, didengar, dipikirkan dan dilakukan, menjadi keinginan dan tujuan, rasa takut, dan harapan.

b. *Value Proposition* (VP) yaitu memperkirakan kebutuhan *customer* yang sudah diidentifikasi pada *customer segment.* Berdasarkan kebutuhan itu, selanjutnya dapat didefinisikan value (nilai) apa yang akan diberikan agar mampu memenuhi kebutuhan customer. Value yang diberikan itu akan menjadi nilai inti dari kegiatan bisnis.
c. *Customer Relationship* (CR) yaitu mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan customer. Macam-macam jenis hubungan mulai dari memberikan bantuan personal perorangan kepada setiap *customer*, dengan memanfaatkan komunitas, atau bahkan berupa *'selfservice',* yaitu tidak berhubungan langsung dengan customer.
d. *Channel* (CH) yaitu cara untuk mencapai customer. Channel ini adalah jalur antara perusahaan dengan customer, bagaimana delivery dari value yang diberikan akan mampu mencapai customer dengan baik.
e. R*evenue Stream* (RS) yaitu representasi dari jalur penerimaan uang yang akan diterima dari setiap customer segment. Definisikan cara tertentu untuk menghasilkan *revenue* dari setiap customer segment.
f. *Key Resource* (KR) adalah Sumber Daya Utamayang menjelaskan mengenai aset terpenting yang diperlukan dalam membuat model bisnis kerja. Setiap model bisnis memerlukan Sumber Daya Utama. Sumber Daya Utama akan memungkinkan perusahaan untuk membuat dan melebihi Proposisi Nilai, mencapai pasar, memelihara hubungan dengan Segmen Pelanggan, dan memperoleh pendapatan.
g. *Key Activities* (KA) adalah Kegiatan Utama yang menjelaskan hal terpenting yaitu perusahaan harus membuat model bisnis. Setiap model bisnis dibuat untuk sejumlah Kegiatan Utama. Hal ini merupakan tindakan yang paling penting bagi perusahaan sehingga harus maksimal untuk dapat menghasilkan operasi yang berhasil. Seperti Kunci Sumber Daya, diwajibkan untuk membuat dan melebihi Proposisi Nilai, Pencapaian pasar, mempertahankan Hubungan Pelanggan,dan pendapatan yang diperoleh, seperti Kunci Sumber Daya, kegiatan tergantung pada jenis model bisnis. Untuk perangkat lunak pembuat Microsoft,
h. *Key Partners* (KP) adalah Kunci Kemitraan yang menjelaskan jaringan pemasok dan mitra yang membuat pekerjaan model bisnis. Perusahaan menjalin kemitraan untuk banyak alasan, dan kemitraan menjadi landasan model bisnis. Perusahaan membentuk aliansi untuk mengoptimalkan model bisnisnya, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya. Ada empat jenis kemitraan:
   - Strategi aliansi antara non-pesaing
   - Strategi kemitraan antara pesaing *(Coopetition)*
   - Usaha bersama: usaha untuk mengembangkan bisnis baru
   - Hubungan Pembeli-Pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan
i. *Cost Structure adalah* Struktur Biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan model bisnis ini. Blok bangunan ini menjelaskan biaya yang paling besar terjadi antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menghasilkan *Value Proposition* yang ditujukan pada *Customer Segments* sehingga didapat *Revenue Stream.* Biaya tersebut dapat dihitung relatif mudah setelah mendefinisikan Sumber Daya Utama, Kegiatan Utama, dan Kunci Kemitraan.

2.6. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi usaha. Analisis ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ataupun tantangan [13]. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan strategi serta kebijakan usaha. Analisis faktor-faktor strategis usaha adalah sebagai berikut:

1. Analisis kekuatan
   Kekuatan merupakan suatu kelebihan khusus yang memberikan keunggulan komparatif didalam suatu usaha. Kekuatan usaha akan mendukung perkembangan dengan cara memperhatikan sumber dana, citra, kepemimpinan pasar, hubungan dengan

konsumen ataupun pemasok-pemasok dengan faktor lainnya.

2. Analisis kelemahan
   Kelemahan adalah keterbatasan dan kekurangan dalam hal sumberdaya, keahlian dan kemampuan secara nyata menghambat aktivitas keragaan usaha.Fasilitas, sumberdaya keuangan, kemampuan manajerial, keahlian pemasaran dan pandangan orang terhadap merek dapat menjadi sumber kelemahan.
3. Analisis peluang
   Peluang adalah situasi yang diinginkan atau disukai dalam lingkungan usaha.Segmen pasar, perubahan dalam persaingan atau lingkungan, perubahan teknologi dan perbaikan hubungan dengan pembeli serta pemasok dapat menjadi peluang bagi usaha.
4. Analisis tantangan
   Tantangan adalah situasi yang paling tidak disukai atau diinginkan dalam lingkungan usaha. Tantangan merupakan penghalang bagi posisi yang diharapkan dalam menjalankan usaha. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, peningkatan posisi penawaran dari pembeli dan pemasok, perubahan teknologi dan peraturan baru atau peraturan lama yang ditinjau kembali.

2.7. Matrik SWOT

Setelah diketahui peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan maka dapat menentukan strategi dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, mengatasi kelemahan yang dimiliki dan mengatasi kelemahan yang dimilikinya, menghindari tantangan yang ada atau dengan meminimalkan kelemahan tersebut. Cara untuk merumuskan strategi usaha dengan menggunakan matrik SWOT adalah sebagai berikut [14].

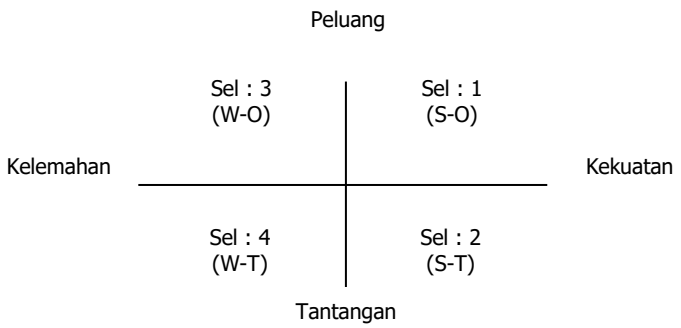

Gambar 1 Diagram SWOT

Sel 1 menjelaskan memiliki banyak kekuatan yang disertai dengan terbukanya banyak kesempatan dilingkungan sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi agresif (*growth oriented strategy*). Sel 2 menjelaskan banyak kemampuan tetapi banyak tantangan dalam usaha sehingga strategi yang ditempuh adalah diversifikasi dan mempersiapkan pasar produk untuk jangka panjang.

Table 1 Format Matrix SWOT

	Internal	
Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Daftar kekuatan-kekuatan internal	Daftar Kelemahan-kelemahan internal
Peluang O	Strategi S-O	Strategi W-O
Daftar peluang-peluang eksternal	Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang timbul	Strategi dengan mengambil keuntungan dari peluang untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki
Tantangan T	Strategi S-T	Strategi W-T
Daftar tantangan-tantangan eksternal	Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari tantangan	Strategi dengan meminimumkan kelemahan dan menghindari tantangan

Sumber: Weihrich dalam Wheelen dan Hunger (1992)

Sel 3 menjelaskan usaha menghadapi peluang yang baik namun memiliki kendala-kendala tertentu sehingga strategi yang diterapkan adalah *turn around oriented strategy* atau difrensiasi produk. Sel 4 menjelaskan usaha menghadapi tantangan dipasar dan memiliki banyak kelemahan sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi bertahan atau konsolidasi (*defensive strategy*) atau dengan mengurangi keterlibatan langsung.

2.8. Metode Stealth

Stealth (siluman) adalah strategi pemasaran yang dilakukan secara tersembunyi, sehingga konsumen tidak sadar saat sedang dibujuk oleh pemasar untuk memiliki minat terhadap produk yang dipasarkannya. *Stealth marketing* merupakan strategi pemasaran yang seringkali dilakukan oleh perusahaan guna menciptakan word of mouth positif bagi konsumennya. Konsumen cenderung dipersvasi secara halus sehingga akan

menimbulkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, karena konsumen terstimuli dalam pikirannya bahwa iklan yang disampaikan merupakan kenyataan yang ada dan sudah terbukti kebenarannya. Stealth marketing dirasa cukup efektif karena praktek pemasaran seperti ini dapat menghindari atau melewati *defense mechanism* yang terdapat dalam diri konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak memiliki antipati terlebih dahulu akan pesan komunikasi pemasaran yang dilakukan pemasar, karena konsumen tidak menangkap secara eksplisit pesan tersebut [15].

Pada Penelitian ini dilakukan modifikasi metode *Stealth* untuk memvalidasi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan metode ini akan memperlihatkan kondisi faktual kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada tahap awal, penelitian ini dilakukan dengan Desk Review terhadap Perda No.13/2018 melalui website www.jdih.inhilkab.go.id, selanjutkan melakukan Pengumpulan Data Primer melalui QSPM kepada stakeholder terkait. Setelah itu Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan survey ke Kawasan Jalan Subrantas dimana disana terdapat sangat banyak Rumah Kos dan mengidentifikasi rumah kos yang potensial menjadi objek PAD yaitu minimal 10 kamar.

Dalam memvalidasi kualitas layanan yang dilakukan oleh Bapenda dan Dinas Perizinan dan PTSP digunakan Metode *Stealth.* Untuk merencanakan aksi penigkatan PAD pada sektor rumah kos, penelitian ini juga merumuskan *Business Model Canvas* dan Analisa SWOT untuk memetakan arah strategi yang dijalankan kedepan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan Kelembagaan

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, Pajak Rumah Kos merupakan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah. Merujuk pada dan pasal 9 ayat (2) berbunyi: pengelola rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. Maka Pajak Rumah Kos akan berada di bawah koordinasi Kepala Bidang Pajak Daerah 2 dan Kasubbid Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. Pajak Hotel merupakan Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak [16]. Sedangkan Izin Pengelolaan Rumah Kos adalah Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perizinan & PTSP Kabupaten Indragiri Hilir berkantor di lokasi yang sangat strategis dan dalam satu Gedung yaitu Gedung Inhil Bisnis Center yang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 4 Tembilahan. Dinas Perizinan dan PTSP berkantor di Lantai 1 sedangkan Bapenda berkantor di Lantai 3.

Untuk memvalidasi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Peneliti melakukan metode *Stealth Costumer* atau Metode Konsumen Siluman ke kantor Bapenda dan Dinas PTSP pada tanggal 7 Februari 2023. Berdasarkan metode *Stealth Costumer* pada kantor tersebut didapatkan pengalaman dan informasi bahwa Pelayanannya sangat baik. Pejabat dan Staff sangat terbuka dan ramah kepada Masyarakat yang berurusan dan berkonsultasi dengan Bapenda maupun Dinas Perizinan dan PTSP.

4.2. Perizinan Rumah Kos

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pajak Rumah Kos dapat digolongkan pada KBLI 2020 55 Penyediaan Akomodasi dengan uraian Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. **Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya**. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi [17].

Dengan penelusuran lebih detail, maka rumah kos dalam KBLI dapat termasuk dalam KBLI 55900 Penyediaan Akomodasi lainnya dengan uraian: Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan **rumah kost**, baik dengan makan maupun tidak dengan makan [17].

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perizinan dan PTSP telah mengatur tata cara pengurusan Izin Pengelolaan Rumah Kos Yang akan

terselesaikan dalam waktu 5 (lima hari kerja) dan bebas biaya [18]. Persyaratan Administrasi pengurusan Izin Pengelolaan Rumah Kos adalah sebagai berikut [18]:

1. Permohonan bermaterai Rp. 10.000
2. Pasfoto berwarna 4x6 (3 lembar)
3. Fotokopi e-KTP pemohon
4. Fotokopi NPWP
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS
6. Izin Usaha
7. Persetujuan Bangunan Gedung
8. Izin Lingkungan
9. Bukti lunas Pajak Reklame
10. Bukti lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur pengurusan Izin Pengelolaan Rumah Kos adalah sebagai berikut [18]:

1. Penenerimaan Berkas darin pemohon dan memeriksas kelengkapan Berkas
2. Mengecek dan mencatat kedalam buku perjalanan berkas (Tracking)
3. memeriksa Kelengkapan dan keabsahan berkas pemohon perizianan, jika lengkap dan dan absah maka akan di paraf, jika tidak akan dikembalikasn ke petugas LOKET
4. Memeriksa Kelengkapan dan keabsahan berkas pemohon, jika lengkap dan absah, maka akan diparaf, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada ke kepala Seksi (Teknis)

4.3. Identifikasi Potensi Rumah Kos

Berdasarkan pengamatan penelitian, maka diperoleh data rumah kos yang beroperasional di sekitar kawasan jalan Subrantas Tembilahan adalah:

Table 2 Identifikasi Rumah Kos yang beroperasi di Sekitaran Kawasan Jalan Subrantas

No	Alamat Kawasan	Jumlah Rumah
1	SKB Margomulyo	1 Rumah Kos
2	SKB	1 Rumah Kos
3	Jalan Utama Subrantas	3 Rumah Kos; 2 Guest House
4	Kawasan Jln. Perwira	3 Rumah Kos
5	Tunas Baru	1 Rumah Kos
6	Pulai Indah	2 Rumah Kos
7	Pinus Indah	2 Rumah Kos
8	Jelutung Indah	3 Rumah Kos
9	Pantai Ceria	2 Rumah Kos
10	Meranti Indah	1 Rumah Kos
11	Ramin Indah	1 Rumah Kos
12	Bakau Indah	1 Rumah Kos

4.4. Tarif Rumah Kos

Harga rata-rata sewa kamar kos terdapat beberapa tingkatan, tingkatan biasa yang di huni oleh Mahasiswa berkisar antara Rp. 200.000,- sampai Rp.400.000,- perbulan yang banyak terletak di sekitaran Kampus II Universitas Islam Indragiri. Kos ini biasanya di huni oleh minimal 2 (dua) orang per kamar dan tidak menyediakan fasilitas.

Sedangkan pangsa pasar rumah kos Karyawan yaitu dalam kisaran Rp. 500.000,- sampai Rp.1.500.000,- per bulan dengan fasilitas cukup lengkap seperti Kasur, Kipas angin, Meja, Lemari, AC, Dispenser, Kulkas, Parkir Mobil dan fasilitas lainnya.

4.5. Dampak Ekonomi dan Sosial Rumah Kos terhadap Lingkungan di Indragiri Hilir.

Sejalan dengan Penelitian sebelumnya, Usaha yang dijalankan warga Banyaknya kos-kosan dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang mendirikan usaha pendukung yang dapat melengkapi kebutuhan para penghuni kos atau pendatang baru. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat Kawasan Jalan Subrantas tidak memiliki usaha kos melainkan memiliki usaha yang lain seperti penjual makanan, Café, toko kelontong, toko pakaian, laundry, photocopy, Jasa Kurir, air gallon, agen pulsa, dan sebagainya [19].

Berdasarkan acuan dari sumber penelitian yang kita ambil bahwa pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan pada dasarnya harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti: penduduk, keadaan ekonomi, sosial budaya, masyarakat, pertahanan, kesempatan kerja, potensi daerah dan lingkungan hidup. Selain geliat ekonomi, Pertumbuhan Rumah Kos di Indragiri Hilir mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat seperti terbukanya lapangan kerja, pengurangan pengangguran, keterlibatan penduduk musiman dalam aktivitas sosial masyarakat tempatan seperti Gotong Royong, Pengajian dan *Haulan.* [19]

4.6. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Pengelolaan Rumah Kos

Berdasarkan pengolahan data dan informasi yang kemudian dianalisa secara mendalam, maka Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dari pengelolaan rumah kos antara lain:

4.6.1. Pajak Rumah Kos

Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak rumah kos masuk dalam kategori pajak hotel [8], Rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan pajak hotel 10% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [4][5][20][21].

4.6.2. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan. Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame menjelaskan pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame [22]. Kita biasanya mengidentikkan reklame dengan media periklanan besar yang ditempatkan pada area yang sering dilewati masyarakat umum seperti sisi jalan raya. Reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang besar dan menarik.

Penyelenggaraan rumah kos membutuhkan promosi dan papan informasi terkait ketersediaan kamar yang ditawarkan oleh pengelola/pemilik rumah kos. Apabila reklame atau plang nama/merk rumah kos terpasang melekat pada bangunan tidak akan dipungut pajak reklame, namun apabila sudah dipasang dipinggir jalan ataupun didepan rumah kos maupun lokasi strategis maka akan berpotensi dikenakan pajak reklame. Besaran pungutan pajak reklame diatur dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame [22]. Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut penetapan Bupati [16].

4.6.3. Pajak Pemanfaatan Air Tanah

Air merupakan kebutuhan primer manusia. Berdasarkan pengamatan penelitian, Pemenuhan kebutuhan air untuk penyelenggaraan rumah kos di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya berasal dari sumur artesis (sumur bor). Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku maka pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah kos akan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah. Pajak air tanah di Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah [23] [24]. Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut penetapan Bupati [16].

4.6.4. Pajak PBB P2

PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut, termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan Menara. Apabila telah dibangun menjadi rumah kos yang dikelola secara professional maka pemilk rumah kos sebagai wajib pajak akan sadar membayar PBB P2 atas bangunan tersebut. PBB P2 tergolong pada jenis pajak yang ditetapkan oleh Bupati [16][21].

4.7. Business Model Canvas Pengelolaan PAD bersumber dari Pajak Rumah Kos

Dalam membuat pemetaan bisnis dengan *Brainstorming Business Model Canvas* yang menggali ide dan gagasan dari peserta dapat dilihat pada *Business Model Canvas* terlampir. Scenario pada penelitian ini adalah Bapenda.

4.8. Analisis SWOT

Dalam menyususn strategy formulasi PAD bersumber dari Pajak Rumah Kos di Kabupaten Indragiri Hilir, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal.

Penyusunan faktor internal dan eksternal dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen, Regulasi (Perda dan Undang-undang) kajian literatur, , survey pendahuluan di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir, serta wawancara dan diskusi yang dilakukan kepada pemilik rumah kos, pemerintah, dan akademisi di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.8.1. Analisis Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Regulasi yang Kuat dan Jelas
2. Memiliki Kelembagaan yang mengelola yang Kuat dan Jelas (dalam hal ini Bapenda)
3. Memiliki Partner yang Kuat dan Jelas (Satpol PP, Dinas PTSP)
4. Sudah tersedia Sistem Pembayaran Pajak Daerah yang Online dan pembayaran virtual dan manual
5. Sistem Perizinan yang mudah dan cepat

Sedangkan faktor kelemahan usaha perdagangan kelapa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perda no.13/2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos belum tersosialisasi secara luas

Berdasarkan faktor-faktor internal kekuatan dan kelemahan, dapat disusun matrik evaluasi IFE (*Interval Factors Evaluation*).Masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan diberikan bobot dan peringkat. Matrik IFE kekuatan dan kelemahan dari PAD bersumber dari pajak rumah kos dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3 Matrix IFE (Internal)

Faktor Internal	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (c = a x b)
Kekuatan			
Memiliki Regulasi yang Kuat dan Jelas	0,07	3,8	0,266
Memiliki Kelembagaan yang mengelola yang Kuat dan Jelas	0,05	3	0,15
Memiliki Partner yang Kuat dan Jelas	0,067	3,2	0,2144
Sudah tersedia Sistem Pembayaran Pajak Daerah yang Online dan pembayaran virtual dan manual	0,075	3,2	0,24
Sistem Perizinan yang mudah dan cepat	0,036	3,2	0,1152
Jumlah (A)	0,298		0,9856
Kelemahan			
Perda no.13/2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos belum tersosialisasi secara luas	0,702	3.8	1,404
Jumlah (B)			
Total (A+B)	1		2,389

Sumber Data: Data Diolah Sendiri

4.8.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal usaha perdagangan kelapa terdiri dari faktor-faktor peluang dan tantangan. Faktor peluang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingginya kebutuhan dan pertumbuhan rumah kos di Indragiri Hilir
2. Selain Pajak Rumah Kos, dapat juga diperoleh Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB P2

Faktor tantangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Kesadaran membayar pajak yang rendah
2 Kejujuran dan transparansi pemilik/pengelola kos
3 Kekhawatiran *Conflict of interest* karena ada sebagian pejabat public yang memiliki usaha Rumah Kos.

Berdasarkan faktor-faktor eksternal peluang dan tantangan, dapat disusun matrik evaluasi EFE (*External Factors Evaluation*). Masing-masing faktor peluang dan tantangan PAD bersumber dari pajak rumah kos diberikan bobot dan peringkat.

Table 4 Matrix EFE (External)

Faktor Eksternal	Bobot (a)	Rating (b)	Nilai (c = a x b)
Peluang			
Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB P2	0,26	3,8	0,988
Kesadaran membayar pajak yang rendah	0,24	3	0,72
Jumlah (A)	0,5		1,78
Tantangan			
Kesadaran membayar pajak yang rendah	0,21	3.8	0,798
Kejujuran dan transparansi pemilik/pengelola kos	0,19	3.2	0,68
Kekhawatiran *Conflict of interest* karena ada sebagian pejabat public yang memiliki usaha Rumah Kos.	0,10	2.7	0,27
Jumlah (B)	0,5		1,676
Total (A+B)	1		3,384

Sumber Data: Data Diolah Sendiri

4.8.3. Perumusan Strategi Pengembangan Usaha

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari matrik IFE dan EFE maka selanjutnya dapat disusun matrik IE (*Internal Evaluation*) yang menunjukkan posisi usaha perdagangan kelapa. Martix SWOT PAD bersumber dari Pajak Rumah Kos terlampir.

Analisis SWOT merupakan proses mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT secara sistematis mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal serta menggambarkan kesesuaian yang paling baik. Analisis ini didasarkan bahwa suatu yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan tantangan. Analisis SWOT yang akurat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan strategi yang dirancang.

Perumusan strategi yang dihasilkan berupa kombinasi kekuatan-peluang (*strength-opportunities*), kekuatan-tantangan (*strength-threats*), kelemahan-peluang (*weaknesess-opportunities*) dan kelemahan-tantangan (*weaknesess-threats*).

Strategi kekuatan-peluang (*Strenghts-Opportunities*)

Strategi S-O (strategi agresif) dalam kondisi pelaku usaha perlu melakukan pengembangan bisnis yang agresif. Strategi S-O kelapa adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Perda No.13/2018 khususnya pada Kewajiban memiliki Izin Rumah Kos dan Pajak Rumah Kos.
- Penegakan Aturan bersama Satpol PP
- Pendampingan teknis kepada Pemilik/Pengelola Kos tentang tata cara laporan dan pembayaran pajak
- Perluas jaringan komunikasi berbasis IT dan menyediakan laman khusus pajak Rumah kos pada website Bapenda

Strategi kekuatan-tantangan (*Strenghts-Threats*)

Strategi S-T (strategi diversifikasi) dalam kondisi pelaku usaha perlu melakukan diversifikasi produk atau usaha melalui pengembangan produk-produk unggul. Strategi S-T pada usaha perdagangan kelapa adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi dan penegakan Perda
- Raising awareness pemilik/pengelola rumah kos taat pajak

Strategi kelemahan-peluang (*Weaknesses-Opportunities*)

Strategi W-O (strategi balik arah) dalam kondisi pelaku usaha perlu melakukan analisis terhadap kelemahan sehingga mampu menghilangkan kelemahan utama. Strategi W-O pada usaha perdagangan kelapa adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Motivasi dan Kapasitas ASN Penagih pajak dan ASN Perizinan
- Perkuat sosialisasi dan membangun kesadaran pajak rumah kos
- Penerbitan petunjuk teknis penagihan pajak rumah kos

Strategi kelemahan-tantangan (*Weaknesses-Threats*)

Strategi W-T (strategi bertahan) dalam kondisi perlu menganalisis terhadap kelemahan utama sekaligus menghindari tantangan. Strategi W-T adalah sebagai berikut:

- Restrukturisasi Kelembagaan
- Penguatan SDM yang bertanggung jawab atas PAD

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki Kekuatan Hukum dalam memungut Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda No.13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos. Pajak Rumah kos dapat dipungut apabila telah mengelola sebanyak 10 (sepuluh kamar) dan besaran pengutan pajak adalah 10% dari omset merujuk pada Perda no.6/2008 tentang Pajak Hotel. Selain itu, potensi PAD lain yang dapat diperoleh dari pengelolaan rumah kos adalah Pajak Reklame (Perda No.7/2008), Pajak Air Tanah (Perda No.21/2010) dan PBB P2 (Perbup No.22/2020).

Usaha Rumah Kos juga memberikan dampak ekonomi yang baik kepada masyarakat sekitar yaitu dapat menumbuhkan usaha jasa yang dikelola oleh masyarakat tempatan seperti Jasa Kurir, Loundry, air galon, penjual makanan, Cafe, toko kelontong, toko pakaian, laundry, photocopy, agen pulsa, dan sebagainya

Penelitian ini menyarankan bahwa perlunya penegakan Perda no.13/2018 dengan tegas dan ”tebang pilih”. Berdasarkan pemetaan *Bisnis Model Canvas* Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Satpol PP yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Penegak Perda. Setelah itu biaya yang dibutuhkan berdasarkan pemetaan tidak telalu besar seperti Biaya Rapat, Biaya Koordinasi dan Biaya Sosialisasi Perda kepada Pengelola/Pemilik Rumah Kos.

Merujuk pada publikasi Kementrian Hukum dan HAM, implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pajak dan Retribusi harus diatur dalam satu Peraturan

Daerah (PERDA) sehingga Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus bekerja ekstra dalam masa transisi dari UU 28/2009 PDRD menuju UU 1/22 HKPD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah menyediakan Jurnal Selodang Mayang sebagai media peneliti memberikan masukan dan berkontribus terhadap pembangunan daerah. Selain itu Peneliti juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Pihak Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP karena telah melayani peneliti dalam melakukan Metode *Steatlh* dalam memvalidasi kualitas layanan. Berdasarkan metode *Stealth* peneliti dapat mendapatkan pengalaman faktual yang diberikan sangat baik dan memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Hajar and D. P. E. N. Made Susilawati, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Rumah Kost," *E-Jurnal Mat.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–31, 2012.

[2] S. Rachmawati, "ANALISIS PREFERENSI MAHASISWA DALAM PEMILIHAN TEMPAT KOS (Studi : Kawasan Kos di Kelurahan Ketawanggede dan Kelurahan Sumbersari, Kota Malang)," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

[3] *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos*. Indonesia, 2018. [Online]. Available: https://jdih.inhilkab.go.id/

[4] *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*. 2010.

[5] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf

[6] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.

[7] D. P. K. Kemenkeu, *Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

[8] *Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.

[9] *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).*

[10] A. Osterwalder and Y. Pigneur, "Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers," *A Handb. visionaries, game Chang. challengers*, no. July, p. 288, 2010, doi: 10.1523/JNEUROSCI.0307-10.2010.

[11] H. Hartatik and T. Baroto, "Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Metode Business Model Canvas," *J. Tek. Ind.*, vol. 18, no. 2, pp. 113–120, 2017, doi: 10.22219/jtiumm.vol18.no2.113-120.

[12] W. S. Dewobroto, "Penggunaan Business Model Canvas Sebagai Dasar Untuk Menciptakan Alternatif Strategi Bisnis Dan Kelayakan Usaha," *J. Tek. Ind.*, vol. 2, no. 3, pp. 215–230, 2012, doi: 10.25105/jti.v2i3.7032.

[13] F. Rangkuti, *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2006.

[14] J. D. Wheelen, Thomas L. & Hunger, *Strategic Management and Business Policy*, Thirteenth. New York: Pearson, 2012.

[15] E. D. Sucipto, "STEALTH MARKETING: DILEMA ETIKA DALAM MENJANGKAU KONSUMEN," *J. Manaj.*, vol. 1, no. 2, 2016, [Online]. Available: https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/1665/1/STEALTH MARKETING.pdf

[16] *Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir nomor 22 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah*. 2020.

[17] K. I. BPKM, "KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020." https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/06d9c4e4-8a6b-43bd-8e3e-84dcb6e344a1 (accessed Feb. 09, 2023).

[18] Dinas Perizinan dan PTSP, "Izin Pengelolaan Rumah Kos." https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7985109/pemerintah-kab-indragiri-hilir/izin-pengelolaan-rumah-kost?download=true (accessed Feb. 08, 2023).

[19] N. K. A. A. Puspita Indra Wardhani, Wulansari Dwi Pambudi, Jenny Fiaoza, Safira Alfanisa, Helmi Zain Susanto, "IDENTIFIKASI PENGARUH

PEMBANGUNAN KOS-KOSAN TERHADAP AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI DI DESA PABELAN KABUPATEN SUKOHARJO," *Lageografia J.*, vol. 20, no. 2, pp. 138–148, 2019, [Online]. Available: https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/22475

[20] *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 6 tahun 2008 tentang Pajak Hotel*. 2008.

[21] E. A. Damanik, "Tata Cara Pengenaan PBB Sektor P2 Atas Rumah Kost Atau Kamar Kost (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)," Universitas Sumatera Utara, 2020. [Online]. Available: http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26219

[22] *Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame*. 2008. [Online]. Available: https://jdihn.go.id/files/301/32_7_Tahun_2008.pdf

[23] *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah*. 2010.

[24] *Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah*. 2012.

Lampiran 1 *Business Model Canvas* Pengelolaan PAD bersumber dari Pajak Rumah Kos

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Partner
1. Satpol PP
2. Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
3. Dinas Perizinan dan PTSP
4. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia</td>
<td>Aktivitas
1. Penagihan Pajak Rumah Kos dan lainnya yang terkait dengan rumah kos
2. Sosialisasi dan Upaya penyadaran taat pajak</td>
<td rowspan="2">Value Proposition

PAD bersumber dari Pajak Rumah Kos
(dalam scenario ini dilaksanakan oleh Bapenda)</td>
<td>Chanel
WhatsApp Grup dan Direct Communication</td>
<td rowspan="2">Costumer
Pengelola Rumah Kos yang berada di territorial Kabupaten Indragiri Hilir</td>
</tr>
<tr>
<td>Resources
1. Perda no.13/2018
2. UPT Bapenda
3. ASN</td>
<td>CRM
1. Sosialisasi
2. Komunikasi melalui Asosiasi Pengelola Kos</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">COST
1. Biaya Sosialisasi
2. Biaya Rapat
3. Biaya Operasional</td>
<td colspan="2">REVENUE STREAM
1. Pajak Rumah Kos
2. Pajak Reklame
3. Pajak Air Tanah
4. PBB P2</td>
</tr>
</table>

Lampiran 2. Matrix SWOT PAD bersumber dari Pajak Rumah Kos

INTERNAL FAKTOR / EKSTERNAL FAKTOR	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. Memiliki Regulasi yang Kuat dan Jelas 2. Memiliki Kelembagaan yang mengelola yang Kuat dan Jelas (dalam hal ini Bapenda) 3. Memiliki Partner yang Kuat dan Jelas (Satpol PP, Dinas PTSP) 4. Sudah tersedia Sistem Pembayaran Pajak Daerah yang Online dan pembayaran virtual dan manual 5. Sistem Perizinan yang mudah dan cepat	Perda no.13/2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos belum tersosialisasi secara luas
Peluang	**KEKUATAN-PELUANG**	**KELEMAHAN-PELUANG**
1. Tingginya kebutuhan dan pertumbuhan rumah kos di Indragiri Hilir 2. Selain Pajak Rumah Kos, dapat juga diperoleh Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB P2	➢ Sosialisasi Perda No.13/2018 khususnya pada Kewajiban memiliki Izin Rumah Kos dan Pajak Rumah Kos. ➢ Pendampingan teknis kepada Pemilik/Pengelola Kos tentang tata cara laporan dan pembayaran pajak ➢ Penegakan Aturan bersama Satpol PP ➢ Perluas jarignan komunikasi berbasis IT dan menyediakan laman khusus pajak Rumah kos pada website Bapenda	➢ Peningkatan Motivasi dan Kapasitas ASN Penagih pajak dan ASN Perizinan ➢ Perkuat sosialisasi dan membangun kesadaran pajak rumah kos ➢ Penerbitan petunjuk teknis penagihan pajak rumah kos
Tantangan	**KEKUATAN-TANTANGAN**	**KELEMAHAN-TANTANGAN**
1 Kesadaran membayar pajak yang rendah 2 Kejujuran dan transparansi pemilik/pengelola kos 3 Kekhawatiran *Conflict of interest* karena ada sebagian pejabat public yang memiliki usaha Rumah Kos.	➢ Meningkatkan sosialisasi dan penegakan Perda ➢ Raising awareness pemilik/pengelola rumah kos taat pajak	➢ Restrukturisasi Kelembagaan ➢ Penguatan SDM

e-ISSN: 2620-3332 SELODANG MAYANG

PEMBINAAN KECAMATAN KINERJA PERINGKAT TERENDAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ismal[1,], Ardiansah[1], Sudi Fahmi[1]
[1]Universitas Lancang Kuning

Email: ismal.younk@gmail.com (korespondensi)

Abstract

In granting the government authority to the regions, it indirectly brings consequences for the central government to the regions and also adds responsibility to the regions themselves. Thus a leader and head of government in the region must be able to manage and regulate the organizational affairs of his government agencies. The purpose of this research is to analyze the Lowest Performance Subdistrict Development, obstacles, and solutions in coaching in the field and analyze the efforts made to overcome obstacles in its implementation in the field. The research method is sociological legal research; the approach used in addition to the statutory regulation approach is an approach by conducting interviews. The results of this study are to find out sanctions and guidance or administrative reprimands for failure to take care of their government households for low-ranked sub-districts.

Keywords: *development of the lowest ranked District*

Abstrak

Dalam pemberian kewenangan pemerintah kepada daerah, secara tidak langsung membawa konsekuensi pemerintah pusat terhadap daerah dan juga menambah akan tanggung jawab kepada Daerah itu sendiri. demikian seorang pemimpin dan kepala pemerintahan di daerah harus bisa sedemikian rupa untuk mengelola dan mengatur urusan organisasi instansi pemerintahannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Pembinaan Kecamatan Kinerja Peringkat Terendah, hambatan dan solusi dalam Pembinaan dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaanya dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan wawancara. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui sanksi dan pembinaan atau teguran administratif terhadap kegagalan mengurus rumah tangga pemerintahannya kepada kecamatan yang berperingkat rendah.

Kata kunci: *pembinaan Kecamatan peringkat terendah*

1. PENDAHULUAN

Artikel ini bermaksud mengevaluasi seorang pemimpin dan kepala pemerintahan di daerah harus bisa sedemikian rupa untuk mengelola dan mengatur urusan organisasi instansi pemerintahannya, mengurus disini adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak Eksekutif sehingga pemerintah daerah dapat membuat dan membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan, sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau DPRD.[1]

Dengan demikian untuk mengatur dan mengurus lembaga pemerintahan ini pemimpin harus memiliki pola komunikasi yang baik terhadap sebuah organisasi pemerintahan tersebut, kekuasaan dan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan tersebut dan juga harus didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang

[1] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)., hlm. 84

memadai, maka penyelenggaraan dan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, dan sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu penyebab dan akan menjadi faktor utama runtuhnya kinerja birokrasi di Indonesia.

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dalam sebuah organisasi tentunya harus memiliki pola komunikasi yang baik dimana nantinya dari pola komunikasi inilah akan menghasilkan tingkat kepuasan dalam berorganisasi dan pelayanan publik yang maksimal. Yang dimaksud dengan kepuasan organisasi menurut Redding adalah semua tingkat kepuasan seorang karyawan mempersepsi lingkungan komunikasi secara merata dan keseluruhan.

Konsep keseluruhan ini juga menunjukan kepada bagaimana baiknya informasi yang tersedia untuk memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi akan tuntutan bagi informasi yang akurat dari atasan maupun dari sesama karyawan menyumbangkan kepuasan dalam komunikasi sebuah organisasi adalah informasi yang penuh dan bertanggung jawab.[2] Sebagimana di pahami lewat studi ilmu politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan secara etimologis istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik.

Dalam fenomena yang lazim sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyandarkan dirinya sebagai pelayan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyandarkan diri sebagai majikan bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima baik karena kondisi masyarakat maupun konsumen dari pemerintah masing-masing yang dituangkan dalam cita konstitusi.[3] Jika kita ingin mengatakan bahwa pelayanan hanya dilakukan bagi pemenuhan kebutuhan pemegang kekuasaan (kepala keluarga), maka dapat dibenarkan sepanjang tercipta kearifan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Jika pengelolaan sumber daya diserakan pada elemen lain untuk kemudian didistribusikan pada pemegang kekuasaan Dalam model dengan sistem yang paling moderen sekalipun, pelayanan tetap dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk kemudian didistribusikan pada masyarakat. Hanya saja, pada sistem yang paling primitif jaminan soal pendistribusian bersifat langka, sekalipun pada sistem otoriter yang baik pendistribusian resources tidak menjadi masalah, bahkan menjadi perhatian khusus. Pertanyaan etis dalam hal ini adalah siapakah yang lebih berhak untuk dilayani.[4]

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sudah merupakan pola dan sistem pemerintahan yang berasaskan desentralisasi, yang mana desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.[5]

Keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan lokasi penelitian, tentu ada penghargaan dan juga sebaliknya sanksi berupa pembinaan dan teguran administratif terhadap kegagalan mengurus rumah tangga pemerintahannya. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir No.20 Tahun 2013 Pasal 12 (ayat 1): Kecamatan peringkat pertama diberikan pengharagaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan dan Camatnya direkomendasikan sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk mendukung jabatan eselon yang lebih tinggi dan berhak mengikuti lomba tingkat provinsi. Sedangkan untuk kecamatan yang berperingkat rendah, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No.20 Tahun 2013 Pasal 13: (1) Bupati memberikan pembinaan bagi Kecamatan yang memperoleh peringkat terendah; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a) Teguran Administratif; dan (b) Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dengan itu penulis mengangkat permasalahan untuk penulisan artikel ini dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBINAAN KECAMATAN

[2] Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995).,hlm. 88

[3] *Ibid*, hlm. 18

[5] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 55

KINERJA PERINGKAT TERENDAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN"

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan suatu metode yang tepat. penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melakukan kajian melalui suatu analisis, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap satu atau beberapa fakta hukum untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.[6]

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif mengenai Implementasi Pembinaan Kecamatan Kinerja Peringkat Terendah Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk melaksanakan penelitian hukum sosiologis diperlukan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data tersebut diperolah dari sumber-sumber yang benar melalui kegiatan obervasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur kepada responden serta data yang berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

3. PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se provinsi Riau, memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, bahwa tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk:[7]

1. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan b. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.
4. Mengembangkan berbagai kretivitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian dan pasal di atas, maka sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah provinsi Riau maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah diatur. Dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itutujuan dari pelaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk: Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan, Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan

[6] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press 2011), hlm. 38.

[7] *Rahyuni Rauf, Panduan Umum Evaluasi Kinerja Kecamatan*¸ Jurnal, Marpoyan Tujuh, 2016, Hal. 10

kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam proses menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya kecamatn masing-masing.

Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa; Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi:[8]

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
3. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
4. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup dari proses evaluasi kinerja kecamatan baik di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah proses penyelenggaraan dari tugas umum pemerintahan atau yang sering disebut dengan "tugas atributif" dari seorang camat, serta proses penyelenggaraan dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagai urusan otonomi daerah atau yang sering juga disebut dengan "tugas delegatif" dari seorang camat, serta melakukan penilaian terhadap proses penyelenggaraan tuga-tugas lainnya dari seorang Camat, serta kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah kecamatan.

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan juga memiliki beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, bahwa sasaran dari Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah:[9]

1. Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumendokumen)
2. Perencaan kinerja kecamatan
3. Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan
4. Hasil kerja keseluruhan kinerja kecamatan.

Oleh karena itu secara jelas dapat diketahui bahwa kegiatan evaluasi kinerja kecamatan memiliki sasaran yakni melengkapi data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen), memantapkan Perencanaan kinerja kecamatan, meningkatkan pelaksanaan kinerja kecamatan serta meningkatkan hasil kerja dari keseluruhan kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

3.1. Implementasi Pembinaan Kecamatan Kinerja Peringkat Terendah di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Penilaian evaluasi kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (PEKK) berpedoman pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan Penilaian ini berlandaskan asas:[10]

1. Transparansi, yaitu penilaian evaluai kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja Kecamatan;
2. Akuntabilitas, yaitu penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
3. Partisipatif, yaitu penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan *stakeholder* untuk mengembangkan efektifitas kinerja Kecamatan;
4. Sinergi, yaitu penilaian evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah;
5. Inovatif, yaitu penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan;
6. Kreatifitas, yaitu penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi Kecamatan; dan
7. Adil, yaitu peniaian kinerja Kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

[9] pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, bahwa sasaran dari Evaluasi Kinerja Kecamatan hal. 18

[10] Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2013 tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir BAB II Pasal 5

Indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintah oleh perangkat Kecamatan. Kondisi objektif dimaksud sebagai berikut:[11]

1. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain;
2. Kepemimpinan serta kompetensi Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan pelayanan publik.

Setiap peristiwa pastilah dipengaruh oleh banyak faktor. Sebagai peristiwa atau kejadian, kinerja, menurut Rivai[12], ditentukan oleh:

1. Strukturorganisasi
2. Sistemdanprosedurkerja
3. Gayakepemimpinan
4. Strategi
5. Nilai budaya
6. Lingkungan (system politik, hukum, globalisasi, dsb.).

Untuk meningkatkan kinerja, sering juga disarankan untuk meningkatkan anggaran, penggajian, dan personel baru yang berkualifikasi tinggi atau mengubah manajemen lembaga ke arah komersial, misalnya untuk meringankan birokrasi. faktanya hal-hal tersebut tidak selalu mengarah pada kinerja yang lebih baik, tetapi seringkali menjadi pemborosan. disarankan agar perangkat kecamatan memiliki fitur berikut:

1. Punya komitmen untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama
2. Kompeten dalam bertugas atau melayani publik
3. Terampil, kreatif, inovatif
4. Profesional, beretika
5. Tanggap dan akuntabel
6. Otonom tapi bertanggungjawab
7. Produktif, berkualitas dan efisien

Hasil wawancara dengan Camat Tembilahan Hulu Bapak Ridwan, S.Sos[13] yang pernah meraih reward atau sebagai pemenang lomba pertama tingkat kabupaten, bahwa untuk penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilaian evaluasi kinierja kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya sudah bagus dan cukup transparan hanya saja kami dari pihak kecamatan untuk memenuhi berkas ataupun dokumen sebagai syarat penilaian agak berat untuk merangkumnya dalam sebuah dokumen karena banyaknya berkas yang harus disiapkan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, belum lagi untuk kelengkapan dokumen sesuai dengan indicator yang akan dilakukan oleh tim penilai Propinsi Riau dimana pemenang lomba tingkat kabupaten akan dilakukan atau dilombakan untuk tingkat propinsi dan pada intinya reward yang kami terima dalam bentuk uang hanya cukup untuk menutupi segala pengeluaran sesuai dengan kelengkapan bahan yang harus difotokopi dan dicetak atau dijilid disertakan juga menjamu tim dan menyiapkan tempat dilokasi atau dikantor kecamatan untuk dilaksaanakan penilaian.

Hasil wawancara dengan camat Pulau Burung Bapak Syafruddin KH[14] terkait dengan Penilaian kinerja kecamatan ini berat untuk kami kalua harus menyiapkan data atau dokumen sesuai yang diminta oleh tim dalam penilaian indicator penilaian kinerja kecamatan dan untuk kecamatan pulau burung sendiri masih kekurangan tenaga Pegawai Negeri Sipil dan tidak semua staf dapat diandalkan dalam melaksanakan kegiatan, ketika dilakukan penilaian oleh tim penilai kecamatan pada umumnya apa yang ditanya agak susah untuk menjawabnya pada intinya sumber daya manusia masih lemah dan sebagaimana kita ketahui kami kecamatan pulau burung untuk menuju ibukota kabupaten sangat sulit karena terbentur biaya transportasi yang besar dan mahal.

Hasil wawancara dengan Ketua LSM Fokus Ornop[15], bahwa selama ini kami sedikit saja mengetahui tentang adanya penilaian evaluasi kinierja kecamatan dan hanya dapat memeberikan sedikit saran saja supaya hal yang baik ini dalam rangka untuk membentuk pengelolaan pemerintahan yang baik agar pemerintah kabupaten Indragiri Hilir agak sedikit gencar melakukan sosialiasi baik ke dinas terkait dan masyarakat pada umumnya.

[11] Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2013 tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 7

[12] Faktor yang mempengaruhi kejadian, kinerja, menurut Rivai, 2008 hal: 68

[13] Hasil wawancara dengan Camat Tembilahan Hulu Bapak Ridwan, S.Sos pada tanggal 3 Januari 2023

[14] Hasil wawancara dengan camat Pulau Burung Bapak Syafruddin KH pada tanggal 3 Januari 2023

[15] Hasil wawancara dengan Ketua LSM Fokus Ornop pada tanggal 28 desember 2022

3.2. Hambatan dan solusi dalam Pembinaan Kecamatan Kinerja Peringkat Terendah di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Penilaian evaluasi kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, bahwa tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk:[16]

1. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan
2. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
3. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
4. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan
5. Mengembangkan berbagai kretivitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian dan pasal di atas, maka sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah provinsi Riau maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah diatur. Dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itutujuan dari pelaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk: Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan, Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam proses menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya kecamatn masing-masing.

Dapat dilihat Faktor – faktor kinerja kecamatan rendah antara lain :

1. Camat kurang kreatif Camat kurang ide dan inovasi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Memahami potensi daerah juga bisa menjadi langkah awal bagi pengelola daerah ketika mencoba mencari ide dan inovasi untuk menjadikan daerah lebih baik lagi.
2. Kekurangan Personil (SDM) Kualitas dan kuantitas penting disini. Secara kualitatif, yaitu pegawai kecamatan masuk ke dalam kelompok usia tidak produktif atau menjelang pensiun. Sekaligus kuantitatif, yakni angka penyerapan tenaga kerja minimum di kecamatan.
3. Luas dan jumlah penduduk Luas sub wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sudah statis, sehingga tidak dapat dikembangkan lagi. Selain itu, letak kecamatan yang jauh dari kabupaten melemahkan pengawasan kecamatan.
4. Kurangnya kapasitas pengarsipan dokumen Pengarsipan dokumen di wilayah Indragiri-Hiliri sangat lemah. Untuk banyak kegiatan camat, baik di luar maupun di dalam kecamatan, tidak ada dokumen yang diperoleh yang menunjukkan bahwa camat terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian banyak dokumen penting kecamatan yang hilang atau tidak dapat ditemukan lagi karena berbagai faktor seperti pergantian pegawai lama dengan yang baru dll.
5. urangnya motivasi kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, tentunya pemerintah kabupaten telah memberikan insentif tersebut. Camat tidak berusaha memotivasi karyawannya, terutama dalam operasional sehari-hari. Salah satu buktinya adalah pemeringkatan hasil kinerja kabupaten
6. Kurangnya penggunaan informasi dan teknologi (TI) Permasalahannya terletak

[16]Rahyunir Rauf, *Panduan Umum Evaluasi Kinerja Kecamatan*, Jurnal, Marpoyan Tujuh, 2016, Hal. 10

pada penggunaan internet. Akses internet di daerah ini juga sangat buruk. Pemerintah daerah belum mengambil inisiatif untuk meningkatkan penggunaan internet seefektif mungkin. Jika dilihat letak pemekaran ini jauh dari Ibukota Kabupaten.

Inilah beberapa hal yang membuat kinerja beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi rendah dan semua ini harus dicarikan solusi seperti sering memberikan sosialisasi dengan melakukan monitoring, mengangkat anggaran kecamatan dan meningkatkan profesionalisme aparatur dikecamatan seperti sering memberikan pelatihan-pelatihan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tantawi Jauhari selaku Ketua Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan[17] terkait dengan hambatan dan solusi dalam pembinaan kecamatan kinerja rendah bahwa sebagaimana kita ketahui Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dimana setiap kecamatannya dilalui oleh ribuan sungai sungai kecil dan masyarakat pada umumnya mengunakan transportasi air khususnya untuk kecamatan yang jauh dari Ibukota Kabupaten harus melalui sungai dengan mengunakan kapal kapal kecil ataupun boat untuk sampai ke Ibukota Kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut merupakan suatu pengaruh yang sangat besar bagi kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten untuk melakukan koordinasi ke Pemeritah Kabupaten, dan itu pula yang menjadi kendala susah memang untuk menerapkan sanksi bagi kecamatan kinerja rendah yang rata-rata memang kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten tersebut rata rata memilik penilaian rendah ditambah juga aparatur pendukung yang kurang dan masih lemahnya sumber daya manusianya, namun dalam hal ini bukan berarti Pemerintah Kabupaten melakukan pembiaran terhadap kinerja kecamatan yang rendah dengan langkah-langkah yang diambil diantaranya dengan melakukan pembinaan melalui surat teguran dari Bupati Indragiri Hilir ataupun melalui surat dari Sekretaris Daerah.

Adapun solusi kedepan yang mungkin dapat meminimalisir rendahnya kinerja kecamatan dimaksud adalah dengan lebih meningkatkan lagi inovasi daerah, seperti halnya apa yang telah dibentuk oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan membentuk suatu Inovasi TIPEKK Terintegrasi (Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Terintegrasi). Diharapkan kedepannya dapat mempermudah koordinasi oleh kecamatan dan menjadikan setiap kecamatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja perangkat kecamatan karena adanya pengawasan yang terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir,[18] dimana hambatan dalam melakukan pembinaan bagi kecamatan kinerja terendah adalah sulitnya jarak tempuh antar kecamatan dan ke ibukota Kabupaten kedepan pemerintah akan selalu lebih memaksimalkan lagi pembangunan infrastruktur seperti jalan ataupun jembatan penghubung disetiap kecamatan dan kita sadar ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit namun tetap kita pikirkan membangun infrastruktur tersebut baik melalui anggaran APBD, dana Alokasi Khusus ataupun Dana Alokasi umum serta tidak tertutup kemungkinan mengunakan dana lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada atau undang-undang.

Hasil wawancara dengan Camat Kempas Bapak Muhammad Yusuf[19], kinerja rendah kecamatan memang tergantung kepada Sumber Daya Manusia dimana kemampuan seorang aparatur sipil negara harus mampu memahami kinerjanya secara tugas pokok dan fungsinya yang disetiap tahunnya dilimpahkan dalam suatu perjanjian kinerja, untuk hambatan dalam pembinaan baik terhadap kecamatan ataupun aparatur kecamatan tergantung kepada pimpinan diatas yaitu Bupati melalui Pemerintah Kabupaten bias saja pembinaan itu berbentuk surat peringatan atau bisa juga di nonjobkan bagi Aparatur Sipil Negara yang memegang jabatan dan biasanya kalau kami dikecamatan adalah seringnya pegawai tidak masuk kantor sebagaimana jam kerja yang ditetapkan dan cendrung Aparatur Sipil Negara itu banyak yang tinggal di Ibukota Kabupaten dari pada dikecamatan tempat mereka mengabdi dan solusi yang dapat

[17] Hasil wawancara dengan Bapak Tantawi Jauhari selaku Ketua Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan pada tanggal 28 desember 2022

[18] Hasil wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 30 desember 2022

[19] Hasil wawancara dengan Camat Kempas Bapak Muhammad Yusuf pada tanggal 3 Januari 2023

saya berikan agar terus berkoordinasi dengan stakeholder dan berusaha untuk memenuhi perjanjian kerja serta memotivasi bawahan agar indikator dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja

4. Kesimpulan

Pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal pasal 77 ayat 6 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[20]

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam pasal 12 menyebutkan Bupati melakukan pembinaan terhadap kecamatan kinerja rendah dan pembinaan tersebut dapat dalam bentuk sanksi administrative dan pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undagan.[21] Dalam hal ini camat sebagai pemangku diwilayah kerjanya yang berkinerja ataupun peringkat terendah dapat juga diberikan sanksi seperti dilakukan pembinaan dengan dinonjobkan dan difungsionalkan di organisasi perangkat daerah tertentu biasanya dilakukan pembinaan di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, bias juga kalua yang tertalu rendah capaian kinerjanya diberikan demosi atau penurunkan pangkat setingkat dari pangkat yang ada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan belum terlaksana sebagaimana mestinya dalam penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan. Untuk menerapkan sanksi bagi Kecamatan yang kinerjanya rendah bukan hanya semata-mata karena kelalaian ataupun kelemahan camat dan aparaturnya walapun diketahui dan diakui untuk sumber daya manusia nya mungkin masih lemah namun ini tidak menjadi alas an yang begitu signifikan sebagai pembenaran rendahnya kinerja camat, adapun factor yang sangat mempengaruhi adalah factor alam yang boleh dibilang agak ekstrim untuk Kabupaten Indragiri Hilir dimana alamnya dengan struktur tanah yang terdiri dari rawa dan tanah gambut dengan dikelilingi oleh ribuan sungai-sungai kecil.

Sebaiknya memang Pemerintah Daerah memebrikan perhatian lebih kepada kecamatan-kecamatan yang terjauh dari ibukota kabupaten dengan cara antara lain dengan memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan lebih menigkatkan pelayanan secara online dengan membentuk inovasi-inovasi yang mudah dipahami oleh perangkat kecamatan dan untuk kecamatan terjauh yang rata-rata memiliki kinerja rendah dilakukan pembinaan dan bimbingan diantara memikirkan juga untuk tunjangan kemahalannya dan diangkat anggaran penunjangnya. Sehingga nantinya camat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik lagi dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Daftar Pustaka

[1]. Amiroeddin Sjarif*, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*. Bandung:Rineka Cipta, 1987

[2]. Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).,hlm. 112

[3]. Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995).,hlm. 88

[4]. Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-CO, 1992

[5]. Didi Nazmil Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*. Padang:Angkasa Raya, 1992

[6]. Fritzgerald dalam buku Satjipto Raharjo*, Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Mukhti Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2004

[7]. HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

[8]. Inu Kencana Syafiie*, Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)., hlm. 84

[9]. Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 55

[10]. Ishaq*, Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika,2009

[11]. Jimly Asshiddiqie, *Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

[12]. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).,hlm. 16

[20] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal pasal 77 ayat 6

[21] Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam pasal 12

[13]. Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan PerundangUndangan*, Bandung: Nusamedia,2005
[14]. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987
[15]. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
[16]. Samidjo. *Ilmu Negara*, Bandung: Armico,1986
[17]. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000
[18]. Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum),* Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
[19]. Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
[20]. Lana Maulana, "Pengaruh Pembinaan Oleh Kepala Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Payung Agung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis", *Jurnal tidak diterbitkan,* hal, 138
[21]. Rilfayanti Thomassawa, "Pembinaan Aparatur Terhadap Peningkatan Kinerja Pada Kantor Lurah Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota", Jurnal Ilmiah Administratie Volume: 13 Nomor: 1 Edisi: September 2019, hlm 52
[22]. Tita Meiriana Djuwita dan Indra Aditya Prayoga, "Pengaruh Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung)", *Jurnal tidak di publis*, hlm 1
[23]. Abdul Rifqi, "Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik Berdasarkan Uu Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Kota Pekan Baru".
[24]. Received: Augt 20, 2020, Accepted: Sept 30, 2020 /Published: Okt 31, 2020
[25]. Muhammad Solihan, "Analisis Kinerja Pegawai, Pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar", 2011,
[26]. dalam: https://repository.uin-suska.ac.id/404/1/2011_201190.pdf
[27]. Rati Pundissing, "Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja", 2021
[28]. Rivai, Veitzhal. 2004. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. PT. Raja Grafindo, Jakarta
[29]. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
[30]. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan
[31]. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan
[32]. dalam: https://www.researchgate.net/profile/Rati-Pundissing/publication/340816221_PENGARUH_MOTIVASI_TERHADAP_KINERJA_PEGAWAI_KANTOR_KECAMATAN_MASANDA_KABUPATEN_TANA_TORAJA/links/5e9f0c1192851c2f52b7b8c0/PENGARUH-MOTIVASI-TERHADAP-KINERJA-PEGAWAI-KANTOR-KECAMATAN-MASANDA-KABUPATEN-TANA-TORAJA.pdf
[33]. Wibawa, Samodra. "KINERJA EMPAT KANTOR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWEN." *Civil Service Journal* 5.1 Juni (2011).
[34]. Wibawa, S. (2011). KINERJA EMPAT KANTOR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWEN. *Civil Service Journal*, *5*(1 Juni).

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Fitri Wahyuni[1], Yaswirman[2], Nilma Suryani[2]
[1]Universitas Islam Indragiri
[2]Universitas Andalas Padang

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The causes of the still high stunting rate in Indonesia are very complex. This includes the Indragiri Hilir Regency. The number of cases of stunting that is the cause is more to do with economic problems and poor families. based on data from the Health Service (Diskes) the stunting rate in Inhil still reaches 3.15 percent. Therefore, appropriate steps are needed to reduce and prevent stunting, one of which is by distributing zakat to families affected by stunting. However, this needs to be studied according to Islamic law, are those affected by stunting the party (group) entitled to receive zakat? This research is normative legal research. With secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with qualitative data analysis by drawing deductive conclusions. The results of the study show that in Islamic law there are eight asnab (classes) who are entitled to receive zakat, namely 1. Fakir 2. Poor 3. 'Amilin (zakat manager) 4. Muallaf. 5). Riqab (slave), 6). Gharimin (People who are in debt), 7). Sabilillah (people who fight in the way of Allah), 8). Ibn Sabil. Of the eight groups referred to by residents in Indragiri Hilir who are affected by stunting, they are included in the poor category, so according to Islamic law, they are entitled to receive zakat.

Keywords: *Islamic Law, Zakat, Stunting*

Abstrak

Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Termasuk juga di Kabupaten Indragiri Hilir Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting yang menjadi penyebabnya lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) angka stunting di Inhil masih mencapai angka 3,15 persen. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang tepat guna menurunkan dan mencegah terjadinya stunting salah satunya dengan penyaluran zakat kepada keluarga yang etrdampak stunting. Namun hal tersebut perlu dikaji menurut hukum Islam apakah mereka yang terdampak stunting merupakan pihak (golongan) yang berhak menerima zakat?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan analisa datanya berupa kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian bahwa dalam hukum Islam ada delapan asnab (golongan) yang berhak menerima zakat yaitu 1.Fakir 2. Miskin 3. 'Amilin (Pengelola zakat) 4. Muallaf. 5). Riqab (budak), 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), 8). Ibnu Sabil. Dari delapan golongan yang dimaksud warga yang ada di Indragiri Hilir yang terdampak stunting merupakan mereka yang termasuk dalam kategori miskin, maka menurut hukum Islam mereka berhak menerima zakat.

Kata kunci *Hukum Islam, Zakat, Stunting*

1. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia maju. Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama stunting. Stunting dapat didefinisikan sebagai kondisi tinggi badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. Tinggi badan merupakan salah satu jenis pemeriksaan antropometri dan menunjukkan status gizi seseorang. Adanya stunting menunjukkan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu

yang lama (kronis).[1]

Persoalan stunting merupakan persoalan yang terjadi di Indonesia dimana angka stunting di Indonesia mencapai 30,8 %. Hal ini didasarkan pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya satu dari tiga balita mengalami stunting. Indonesia sendiri, bahkan merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.[2]

Sedangkan data stunting di Provinsi Riau tercatat sebesar 23,3%. Terdapat 6 kabupaten/kota di Riau yang memiliki prevalensi di atas rata-rata provinsi tersebut. Prevalensi tertinggi ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu 29,7%, diikuti Kabupaten Indragiri Hilir 28,4%, Kabupaten Rokan Hulu 25,8%, Kabupaten Kampar 25,7%, Kabupaten Indragiri Hulu 23,6%, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,3%. Terdapat pula 6 kabupaten/kota dengan prevalensi balita *stunting* di bawah angka rata-rata provinsi, yaitu Kota Pekanbaru 11,4%, Kabupaten Siak 19%, Kabupaten Pelalawan 21,2%, Kabupaten Bengkalis 21,9%, Kabupaten Kuantan Singingi 23%, serta Kota Dumai 23%.[3] Artinya dintara kabupaten yang ada di Provinsi Riau kabupaten Indragiri Hilir termasuk kabupaten yang memiliki Prevalensi yang cukup tinggi angka stuntingnya diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Persoalan stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Stunting, tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, namun juga terganggunya perkembangan otak. Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak dibawah usia dua tahun. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat.

Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting di kabupaten Indragiri hilir lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) angka stunting di Inhil masih mencapai angka 3,15 persen.[4] Dengan banyaknya kasus-kasus stunting yang terjadi perlu adanya upaya-upaya bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Indragiri Hilir dalam menurunkan dan mencegah adanya kasus-kasus stunting melalui pemberdayaan zakat yang ada baik yang dihimpun oleh lembaga resmi pemerintah maupun lembaga yang dihimpun secara swadaya oleh masyarakat. Karena sejatinya zakat dalam hukum islam diperuntukkan untuk mereka yang secara ekonomi sangat lemah dan apakah mereka yang terdampak stunting tersebut dapat menerima dan berhak untuk menerima penyaluran zakat dari lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah dan oleh lembaga zakat yang dikelola secara swadaya masyarakat? Hal ini perlu dikaji menurut kajian hukum Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat dalam Pandangan Maqashid Syariah

Maqasid al syari'ah secara etimologi berarti maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Pengertian maqasid al syari'ah secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah memahami makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh syar'i pada hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan-tujuan syari'at serta rahasia-rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (syar'i) pada setiap hukumnya. Teori maqasid al syari'ah yang dikemukakan oleh Abi Ishaq al Syatibi, yang mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan manusia di dunia dan diakhirat. Tujuan utama syari'at ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut sebagai daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.[5]

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta

[1]Aryu Candra, *Epidemiologi Stunting*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang,2020, hlm.7

[2]https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828 diakses tgl 16 Feb 2023

[3]https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/ini-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-riau-pada-2021. diakses tgl 16 Feb 2023

[4]https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-stunting-di-inhil-capai-315-persen.html. diakses tgl 16 Feb 2023.

[5]Fitri Wahyuni, *Formulasi Sanksi Pidana Perkosaan Pada Anak Dalam Persektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia kaitannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, hal. 44.

kebahagiaan manusia sebagai individu dan kepentingan masyarakat seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagian di akhirat kelak. Maka kebutuhan dharuriyyat merupakan kebutuhan yang harus ada dan apabila tidak terpenuhi maka terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka syari'at di turunkan. Karena tanpa terpeliharanya kelima kepentingan pokok tersebut, maka tidak tercapainya kehidupan manusia yang sempurna. Kepentingan kelima pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[6]

1. Memelihara Agama (*hifzh al-Din)*
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al- Nafs)*
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql).*
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dalam permasalahan ekonomi, para ulama sejak masa Imam Al-Ghazali (505 M) telah bersepakat bahwa menjaga harta(hifdz al-maal) adalah salah satu dari almaqashid asy-syariah yang pokok atau termasuk ke dalam 5 (lima) kebutuhan dasar manusia yang lima (dharuriyat alkhams). Islam meletakkan pengelolaan dan penjagaan harta sebagai sesuatu yang sangatvital dalam kehidupan manusia. Sehingga tak heran, banyak para ulama yang menulis bab atau buku yang secara khusus membahas al-maqashid asysyariah dalam ekonomi, diantaranya adalah Imam Muhammad Thahir Ibnu Asyur dalam bukunya "Al-Maqashid Asy Syari'ah Al-Islamiyah" dan Yusuf al Qaradhawi dalam bukunya "Al-Maqashid Asy-Syariah Al-Muta'alliqah bil Maal". Dengan demikian, maka aplikasi syariah yang terkait dengan ekonomi tidak boleh melupakan ruh dan semangat pensyariatannya, al-maqashid asy-syariah.[7]

Maqashid Syariah merupakan sebuah tujuan dari implementasi syariat (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari.[8]Konsep ini menjadi sebuah konsepsi berfikir yang melekat pada pembangunan teori dan praktik ekonomi dan keuangan Islam. Sebuah konsep yang sangat komprehensif dalam mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun baik dalam tataran mikro maupun makro.

Maqashid Syariah dibangun di atas sebuah asumsi dasar bahw syariat yang telah Allah Sang Pembuat Syariat tetapkan melalui sumber-sumber utama ontologi Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dibangun di atas tujuan pencapaian kemaslahatan, bukan hanya bagi individual melainkan juga sosial. Maka dari itu, sumber-sumber turunan di bawah sumber utama otologi Islam tersebut juga harus merujuk pada pencapaian maqashid syariah individu dan masyarakat secara luas, bukan hanya menggunakan pendekatan fiqih klasik.

Terkait dengan itu, argumen Ebrahim et al bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dewasa ini perlu mengikuti ijtihad yang dinamis berlandaskan pada maqashid syariah, bukan hanya sekadar fiqih klasik, adalah sangat relevan. Selain dapat sesuai dengan tujuan syariah, hal ini juga mendorong terciptanya iklim pembangunan yang inovatif dan dinamis. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut definisi dan kerangka kerja yang pasti dan jelas terkait dengan maqashid syariah perlu dibangun.[9] Untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh ekonomi Islam, maqasid syariah telah sepantasnya digunakan sebagai basis pertimbangnnya, setidaknya inspirasi dari perspektif maqasid syariah tersebut.

2.2 Mustahiq Zakat (golongan yang berhak menerima zakat)

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60, [10]Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. (AT-Taubah ayat 60).

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria masing-masing golongan penerima zakat tersebut, Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah ashnab delapan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat atTaubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amilin, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabiil. perinciannya adalah sebagai berikut:[11]

a. Fakir

Orang yang tergolongfakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang al-

[6] *Ibid*.

[7]Hani Fauziah dkk, *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, Vol 11 No Tahun 2018, hal.103 .

[8] Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah, 2017, hal.10.

[9] *Ibid.*

[10] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur"an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... hal.196.

[11] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, hal.62

Muhazzab menulis definisi faqir sebagai berikut: "Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya". Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja. Jika diangkakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

b. Miskin

secara umum Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, tetapi ada pula diantara ulama yang berpendapat sebaliknya, miskin lebih terpuruk ekonominya dibandingkan dengan faqir. Terlepas dari siapa yang lebih buruk dalam keadaan ekonominya di antara fakir dan miskin, yang jelas mereka, baik faqir maupun miskin, adalah orangorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status fakir dan miskin dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nishab hartanya.

c. Amil

Secara bahasa amii berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan "orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat kepada orang yang berhak menerimanya". Di Indonesia, kata ini amil juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurusi zakat, terkhusus zakat fitrah. Sayangnya, kata ami/ belum begitu familyer para struktur BAZNAS ataupun LAZ, mereka biasanya masih disebut dengan pengurus.

Ada hal menarik yang patut diketahui bahwa, amil tidak hanya ditunjuk berdasarkan karen ia rajin ke masjid, atau karena rumahnya dekat masjid, atau karena ia pengangguran dan yang semakna dengannya. Akan tetapi Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang setidaknya dimilki oleh seorang amil. Setidaknya ada em pat hal yakni. al-su'ah (pengumpul), al-katabah (administrator), al-hazanah(penjaga/pemelihara/pengembang), dan ai-Qasamah (distributor). Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dari pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, sekalipun mereka tergolong orang yang kaya diberikan hak untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka atas amal bakti merekayang mereka sumbangkan. Adapun besarnya, disesuaikan dengan keadaan.

Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat yangmampu menjalankan tugasnya dengan baik, hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung. Syarat utama dimaksud adalah (1) bukan termasuk keluarga Rasullullah Saw dan atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muthallib, (2) Islam, (3) Adil, (4) Amanah, (5) Memiliki waktu yang cukup. Sementara itu, syarat pendukung untuk menjadi Amil Zakat adalah memiliki kemampuan ekoriomi yang mencukupi. Syarat ini diadakan dengan tujuan agar kesulitan ekonomi yang dialami tidak mengganggu kelancaran tugasnya dan tidak akan menimbulkan buruk sangka orang kepada yang bersangkutan.

d. Muallaf

Secara harfiah kata mual/af berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memelukagama Islam.

e. Riqab

Yang dimaksud dengan riqab dalam istilah fiqih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengmpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. lstilah lain yang digunakan oleh ulama fiqih untuk menyebut riqab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya "dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta.

Zakat diberikan kepada roqab dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada riqabnya) karena akan terjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan. Imam AI Bajuri menyebutkan : "Adapun Tuan yang memiliki hamba mukatab (riqob) tidak bo/eh memberikan zakatnya kepada hamba mukatabnya tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan kembali lagi".

Pada zaman sekarang, golongan riqab · sudah sangat sulit ditemukan atau mungkin tidak ada lagi, dan ini tidak bisa dikembangkan. Adapun

pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa riqob dapat diqiyaskan dengan membebaskan para wanita tuna susila (pelacur) dari cengkraman mucikari adalah pendapat yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan qiyasnya yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang semacam ini sebaiknya tidak dimasukan kedalam kelompok riqob, tetapi dimasukan ke dalam kategori fi sabillilah.

f. Gharimin

Yang termasuk kategori Ghorim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban Fi Sabillilah

Secara harfiyah fi sabillilah berarti " pada jalan menuju (ridha) Allah". Dari pengertian harfiyah ini, terlihat cakupan fi sabillilah begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Jumhur ulama memberikan pengertian fi sabillilah sebagai "perang mempertahankan dan mempejuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin" Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa fi sabillil/ah itu mencakup juga kepentingan -kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan dan lain-lain.

g. Ibnu Sabil

Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata : ibnu yang berarti "anak" dan sabil yang berarti jalan. Jadi Ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT. Misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan zirah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturrahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh dan yang semakna dengannya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum.[12]Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematik, faktual dan akurat[13].

3.2 Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitianyang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum, baik bahan hukum primer,sekunder maupun Tersier.

1. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang yang terakait dengan penelitian ini terutama tentang Zakat.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan yang di teliti.
3. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.3 Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan induktif atau deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN ZAKAT BAGI WARGA YANG TERDAMPAK STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Para pakar ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat

[12] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 153.

[13]Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua* PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.[14]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib(fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.[15]

Kewajiban zakat telah diperintahkan Allah, sebagai bentuk pendistribusian kekayan kepada pihak yang lebih memerlukan sebagai ibadah sosial zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi.[16] Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu ai-Qur'an dan ai-Hadits. Ayat-ayat AI-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat ai-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. lni menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Secara jelas Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60 yang Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ayat diatas secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat: 1). Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. 2). Masakin (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekuranga. Ia mempunya pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3). 'Amilin (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. 4). Muallaf yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5). Riqab (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang). 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya. 8). Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dari delapaan golongan penerima zakat yang di jelaskan diatas, masyarakat di Indragiri Hilir yang terdampak stunting merupakan keluarga yang tergolong miskin. Artinya menurut hukum Islam bahwa orang yang miskin merupakan golongan yang harus diberikan haknya untuk memperoleh zakat. Demikian pula Kunci untuk menurunkan angka stunting adalah penanganan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu penyebab ibu dan anak tidak memperoleh gizi yang cukup. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan adalah melalui kegiatan pemberian zakat produktif. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat.

[14]Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-, hal.7

[15] *Ibid.*

[16]Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, hal. 80-81.

Menurut Al-Qardhawi[17] bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahanpermasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Banyaknya kasus-kasus terjadinya stunting di kabupaten Indragiri hilir lebih kepada persoalan ekonomi dan keluarga yang tidak mampu. Upaya-upaya dalam memberantas dan mencegah terjadinya kasus-kasus stunting harus diupayakan melalui peningkatan ekonomi salah satunya dengan menyalurkan zakat bagi keluarga yang terdampak stunting sehingga dengan peningkatan ekonomi keluarga kesadaran terhadap pola hidup sehat dan gizi yang seimbang akan mencegah terjadinya stunting kembali. Dalam hukum Islam mereka yang terdampak stunting yang memiliki ekonomi lemah (miskin) merupakan golongan yang termnasuk ke dalam asnab (pihak-Pihak yang berhak menerima zakat) terutama keluarga yang terdampak stunting yang merupakan ekonomi lemah atau miskin. Jadi jelas penyaluran zakat bagi warga yang terdampak stunting dapat menerima dan sangat berhak menerima zakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kampus tercinta Unversitas Islam Indargiri yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Semoga kontribusi yang diberikan kepada peneliti menjadi amal jariyah di akhirat kelak amin.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Aryu Candra, *Epidemiologi Stunting*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang,2020.

[2]. Al-Qardhawi, Yusuf*, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj.* Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

[3]. Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua* PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998.

[4]. Fitri Wahyuni, *Formulasi Sanksi Pidana Perkosaan Pada Anak Dalam Persektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia kaitannya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.

[5]. Hani Fauziah dkk, *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, Vol 11 No Tahun 2018.

[6]. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

[7]. Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

[8]. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003).

[9]. Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

[10]. Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah, 2017.

[11]. Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur"an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

[12]. https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828 diakses tgl 16 Feb 2023

[13]. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/ini-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-riau-pada-2021. diakses tgl 16 Feb 2023

[14]. https://www.goriau.com/berita/baca/kasus-stunting-di-inhil-capai-315-persen.html. diakses tgl 16 Feb 2023.

[17]Al-Qardhawi, Yusuf*, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj.* Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

PEMANFAATAN KELAPA BUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF USAHA PENGOLAHAN KOPRA ASALAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELURAHAN SUNGAI SALAK KECAMATAN TEMPULING

Triyana Syahfitri[1], Annisa Alwahidah[1], Khairul[1], Nurhayati[1],Rahma Fadila[1]
[1]Universitas Islam Indragiri

Email: syahfitritriyana@gmail.com

Abstract

The livelihoods of the people in Sungai Salak sub-district are mostly as farmers. The large number of coconut products in the salak river, makes many discarded coconuts/coconuts that are not feasible. However, these coconuts can actually be processed into random copra/white copra, but many people still don't understand how to process white copra, and many people don't dare to make white copra because there is no certainty about the selling price of white copra. Another factor is that copra does not reach white copra moisture content at 5% but in the range of 10-15%, this is also the influence of environmental factors and work systems, as well as the influence of temperature and the drying process which has an impact on the selling price of white copra itself. several determining factors supporting the success of processing white copra itself are in the work system, environment, and other factors. Temperature and drying process are also other factors in obtaining export standard white copra. If this is implemented by farmers, there will be no more wasted coconuts, and this can also improve the economy of the people in Sungai Salak Village.

Keywords : *utilization, discarded coconut, copra, random.*

Abstrak

Mata pencaharian masyarakat di kelurahan sungai salak, sebagian besar adalah sebagai petani. Banyaknya hasil kelapa di sungai salak, membuat banyaknya kelapa buangan/kelapa yang tidak layak. Namun kelapa tersebut sebenarnya masih bisa di olah menjadi kelapa kopra asalan/kopra putih, namun masih banyak belum memahami cara pengolahan kopra putih, dan banyak masyarakat tidak berani membuat kopra putih karena tidak adanya kepastian harga jual kopra putih. Faktor lainnya kopra tidak mencapai kadar air kopra putih di angka 5 % tetapi di kisaran 10-15 %, ini juga menjadi pengaruh dari faktor lingkungan dan sistem kerja, dan juga pengaruh suhu dan proses pengeringan hingga berdampak pada harga jual kopra putih itu sendiri. beberapa faktor penentu penunjang keberhasilan pengolahan kopra putih sendiri berada di sistem kerja, lingkungan, dan faktor lainnya. Suhu dan proses pengeringan juga menjadi faktor lainnya untuk mendapatkan kopra putih yang berstandar ekspor. Apabila hal tersebut diterapkan oleh petani, maka tidak ada lagi kelapa yang terbuang, dan hal tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan sungai salak.

Kata kunci : *pemanfaatan, kelapa buangan, kopra, asalan.*

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Sungai Salak merupakan salah satu kelurahan dari 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Perkebunan kelapa menjadi sektor merupakan andalan bagi Indonesia dalam perkembangan Bidang Perkebunan, perkebunan andalan Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus dihadapi antara lain yaitu rendahnya kulitas hasil (produk) yang diperoleh dari usaha perkebunan.

Kopra putih adalah nama lain dari kopra yang memiliki kualitas jauh lebih bagus. Ciri utama kopra putih adalah lebih bersih dan tidak berjamur. Manfaat utama dari kopra putih ii banyak digunakan untuk bahan pembuatan kosmetik. Cara membuat kopra putih juga tidak telalu berbeda dengan proses membuat kopra pada umumnya.

Pembuatan kopra putih itu sendiri umumnya sama dengan pembuatan kopra sebelumnya yang membedakan terletak pada proses pengeringnya dimana kopra biasa dikeringkan dengan cara dipanggang berbeda dengan kopra putih dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari menggunakan metode green house dengan memberikan terlebih dahulu bahan yag disebut belerang untuk pembuatan kopra putih pada malam hari sebelum dijemur, bahan tersebut di bakar dan disimpan dekat kopra yang telah di belah dan kemudian di tutupi dengan terpal hingga mengasapi kopra tersebut. Salah satu warga Kelurahan Sungai Salak yang mengolah kopra putih yaitu bernama Bapak ERWIN yang beralamat di sungai salak RT 07, usaha ini berdiri selama kurang lebih 6 bulan dan memiliki karyawan. Hingga saat ini kelapa yang dijadikan kopra putih masih aktif berproduksi dengan baik semakin banyak kopra yang dihasilkan semakin banyak pula keuntungan yang di raih, melihat potensi kelapa masyarakat yang ada masih belum termanfaatkan dengan baik karena masyarakatnya masih menjual kelapa bulat.

Kopra yang telah di beri asap belerang dan dikeringkan selama 6-7 hari tersebut siap untuk di cungkil dengan menggunakan alat tertentu, setelah itu kopra siap dikemas dalam karung dan siap untuk dijual. Cara pengolahan kopra putih tidak terlalu rumit tetapi belum diminati masyarakat Kelurahan Sungai Salak. Untuk harga kopra sendiri lebih tinggi dari pada harga kelapa bulat yaitu mencapai Rp. 12.000 / Kg dan kopra asalan hingga harga Rp. 5.000-6.000 / Kg, sampai sekarang masyarakat Kelurahan Sungai Salak masih berharap adanya tempat dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengolahan kopra ini.

Banyak masyarakat atau pun petani kelapa Desa Sungai Dusun yang tidak mengetahui banyak yang bisa di olah dari kelapa buangan tersebut, hari ini kelapa buangan bisa di jadikan kopra asalan yang menurut petani tidak memiliki arti dan di buang begitu saja. Informasi dan keterampilan dalam pengolahan kopra putih menjadi bagian penting dalam mendapat hasil standar ekspor. Melihat kondisi ini menjadi persoalan yang sangat penting untuk diselesaikan agar petani kelapa bisa berpindah profesi yang dulu nya hanya menjual kelapa bulat menjadi penghasil produk turunan kelapa kopra putih maupun kopra asalan yang berstandar ekspor.

Kelapa yang dianggap buangan ini menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian petani kelapa yang kini menjerit dengan harga kelapa yang murah mencapai 1.100 per Kg, banyak yang bisa di dapat petani kelapa jika ingin merubah kelapa menjadi pengolahan kopra putih selain kelapa buangan yang bisa di jadikan kopra asalan tetapi batok kelapa bisa juga di jadikan arang untuk di ekpor. Masyarakat petani kelapa kebanyakan secara umum belum merubah pola pikir nya sehingga masyarakat hanya berpikir yang melakukan pengolahan kopra putih hanya bisa dilakukan oleh pengepul atau tokeh saja bukan nya petani, hal ini yang membuat para petani kelapa di Kelurahan Sungai Salak banyak belum melakukan perubahan untukmengolah kopra putih. Selain itu, yang menjadi persoalan di masyarakat yaitu tempat yang tidak memadai dan juga proses nya yang lambat untuk menghasilkan uang ini yang menjadi penyebab para petani kelapa tidak melakukan pengolahan kopra putih.

Dengan adanya perkembangan pengolahan kopra ini sangat bisa dirasakan masyarakat jika semua berjalan dengan lancar, dampak yang bisa di rasakan masyarakat yaitu terpenuhi nya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan, dan meningktakn sumber daya manusia nya. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemanfaatan Kelapa Buangan Sebagai Alternatif Usaha Pengolahan Kopra Asalan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sungai Salak".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kata Kunci / Variabel

1. Pemanfaatan kelapa buangan
2. Alternatif usaha pengolahan kopra asalan
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat

2.2. Pokok-pokok Persoalan

1. Masyarakat Kelurahan Sungai Salak masih banyak belum mengetahui cara memanfaatkan kelapa buangan menjadi kopra putih atau asalan yang berstandar ekspor.
2. Tidak adanya alternatif usaha masyarakat di Kelurahan Sungai Salak selain hanya menjual kelapa bulat saja.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Sungai Salak dengan adanya pengolahan kopra putih yang baik bisa meningkat harga jual beli

sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
4. Pola pikir petani yang hanya berpikiran kopra putih hanya bisa dilakukan oleh pengepul/tokeh saja.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Kuesioner dan Forum Kegiatan. Berdasarkan metode ini diharapkan penulis dapat mengetahui permasalahan masyarakat pada proses Pembuatan Kopra Putih di Kelurahan Sungai Salak di Kecamatan Tempuling.

Selain metode kuesioner kepada para petani, penulis juga menggunakan metode wawancara kepada para masyarakat dan petani dan perangkat pemerintahan di keluarahan sungai salak, kecamatan tempuling. Yaitu terhadap bapak camat, bapak lurah dan perangkatnya. Hal tersebut penulis lakukan selama penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di kecamatan Tempuling, selama beberapa bulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Alternatif Pemecahan Masalah

Proses pengolahan komuditi kelapa yang umum nya diproduksi oleh petani adalah kopra putih. Produk kopra merupakan produk olahan yang biasanya dilakukan ditingkat petani dan pekopraan dilokasi kebun kelapa. Hasil kopra merupakan bahan baku bagi pabrik pengolahan minyak kelapa dalambentuk Cerude Coco Nute Oil (CCO/CNO) yang dapat diolah menjadi produk berkualitas seperti minyak yang di refinery, di beleaching dan di deodorize (RBD). Produk olahan minyak ini pun masih merupakan bahan baku untuk produk olahan yang bernilai tambah seperti produk cocochemical.

Produktivitas petani kelapa Indonesia masih rendah,jauh di bawah perkebunan suasta. Kondisi ini berakibat pada kurangnya pendapatan petani,dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani tersebut.rendahnya produktivitas perkebunan rakyat di sebabkan pekebun atau petani kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan manajerial perkebunan.

Peningkatan produktivitas untuk menghasilkan target produksi CPO Indonesia memerlukan peran sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil atau sember daya manusia (sdm) di perkebunan kelapa di Indonesia sangat di butuhkan, sejalan dengan target produksi CPO Indonesia.

Pengolahan pasca panen produk perkebunan adalah salah satu upaya untuk meningkat kan nilai tambah dari produk perkebunan. Nilai tambah komuditas dapat di tingkatkan melalui deversifikasi produk olahan dan peningkatan umum.

Cara membuat kopra putih dengan Sinar Matahari

Kopra putih merupakan komoditi export yang telah ada sejak lama, kebanyakan di export ke india, namun sekarang sudah menembus pasar eropa. Nilai ekonomisnya sangat baik, Harganya yang selalu diatas kopra hitam. Namun membuat kopra putih dinilai agak rumit karena sebagian besar produsen terbiasa dengan produksi kopra hitam yang sangat mudah dilakukan. Membuat kopra putih ada yang menggunakan sistem jemur matahari dan oven. Berikut adalah langkah membuat kopra putih dengan menggunakan Matahari:

a. Belah menjadi 2 kelapa tuanya.
b. Buatlah tenda dari terpal, yang nantinya akan digunakan untuk menutup kopra pada saat malam hari.
c. Buatlah tenda dari terpal, yang nantinya akan digunakan untuk menutup kopra pada saat malam hari.
d. Jemurlah belahan kelapa tadi di tanah lapang yang banyak disinari matahari, pastikan tidak berdebu dan jauh dari hewan berkeliaran seperti ayam, kambing, anjing.
e. Setelah menjelang malam hari, tutuplah dengan terpal tadi yang telah di buat, sulfurlah tenda tersebut, tutup rapat agar asap sulfurnya tidak bocor dan cepat habis.
f. Besok paginya buka terpalnya, jemur kembali kopranya. lakukan selama 5 hari agar keringnya cukup bagus dengan kadar air 5%.
g. Lakukan penyimpanan kopranya seperti biasanya.
h. Simpan di gudang yang lantainya telah dibuatkan palet, jadi kopra tidak langsung kontak dengan lantai agar tidak lembab sehingga cepat menimbulkan jamur.
i. Tiap hari beleranglah ruangan di gudang agar benar-benar steril dari kutu kopra atau serangga lain penyebab jamur.
j. Bila anda mengirim kopra putih dengan konteiner, harap diperhatikan kebersihannya, biasakan belerang sejenak konteinernya.

Untuk spesifikasi dari *Kopra Putih* sendiri yaitu Kopra putih memiliki kualitas lebih

tinggi dibanding kopra biasa. Kopra berkualitas ini memiliki ciri-ciri fisik diantaranya adalah berwarna putih bersih, mulus, bebas jamur, keras dan agak susah dipatahkan. Kandungan airnya berkisar antara 3 – 5%.

Kopra yang baik dihasilkan dari daging kelapa segar yang telah cukup tua, diproses langsung begitu kelapa dibelah atau dikupas batoknya dan dilakukan dengan teknik pengeringan yang tepat. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan suhu sinar matahari dalam metode green house memakai sistem pemanasan tidak langsung pada kisaran suhu 60 – 80°

Dari pokok-pokok persoalan diatas maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan beberapa pemecahan permasalahan maka dibuat beberapa kebijakan yaitu:

a. Kebijakan
   Masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling harus melakukan terobosan untuk membuat pengolahan kopra putih yang berstandar ekspor dalam meningkatkan perekonomian petani kelapa kelapa di Kelurahan Sungai Salak.
b. Strategi
   Dalam mencapai kebijakan yang diinginkan maka peneliti melakukan strategi yang terdiri dari dua cara yaitu:
   1) Wawancara, dimana peneliti mencari informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan mengenai kelapa dan kopra putih, sehingga peneliti mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat petani kelapa di Kelurahan Sungai Salak.
   2) Forum Kegiatan melalui kegiatan (Workshop Kopra Putih), kegiatan ini peneliti laksanakan sebagai lanjutan dari wawancara yang telah di lakukan, dengan kegiatan ini masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Salak dapat mengetahui proses pengolahan kopra putih yang berstandar ekspor dan masyarakat petani kelapa bisa mengaplikasikan ilmu yang di dapat untuk di rumah agar petani berubah menjadi kopra putih untuk meningkatkanperekonomian keluarganya.
c. Upaya
   Upaya merupakan langkah riil atau tindakan nyata dan bersifat teknis dari strategi yang telah ditentukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan wawancara, analis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara

4.2. Proses pembuatan

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode Wawancara dengan pedoman umum untuk mengumpulkan data dari objek. Dimana hasil dari wawancara didapati:

Pembuatan Kopra menjadi sangat menentukan dalam menentukan kualitas kopra, karena kualitas hasil kopra akan berpengaruh terhadap harga, maka pengetahuan cara atau teknik pembuatan kopra, mutlak diperhatikan oleh para petani pembuat kopra

Kopra adalah daging kelapa yang dibelah menjadi 2 bagian secara manual atau memakai **mesin pembelah kopra,** kemudian dikeringkan dengan bantuan sinar matahari atau panas buatan. Pengeringan bagian endosperm (kadar air putih lembaga) sebanyak 50% naik turun 5-6%.

Pembuatan Kopra dengan cara pengeringan ada beberapa cara. Antara lain:

a) Penjemuran matahari
   Cara ini memakan waktu lama 5-7 hari, sangat bergantung pada kondisi cuaca dan peralatan yang digunakan, dan kualitas kopra pun sering tidak stabil, berjamur, kadar air kurang maksimal adalah ciri khas dari teknik ini.
b) Penjemuran bertudung Plastik
   Modifikasi dari penjemuran sinar matahari, tetapi memanfaatkan tudung plastik, kopra dijemur dalam areal plastik. Panas yang masuk ke dalam areal plastik akan bertahan lama sehingga penjemuran bisa lebih cepat dari penjemuran biasa. Teknik penjemuran ini lebih baik. dari cara penjemuran matahari langsung dan teknik ini lah yang menjadi idaman untuk saat ini dalam pengolahan kopra.
c) Pengasapan
   Cara ini adalah teknik yang banyak berkembang di petani kopra. Daging Kelapa dimasukkan ke dalam para-para tungku pengasapan dengan

membakar sabut kelapa atau tempurung dibawahnya. Teknik ini membutuhkan waktu 3 harian.

d) Pengovenan
Teknik pengeringan kopra ini adalah yang terbaik untuk menghasilkan kopra. Teknik yang dipakai adalah model Lade oven. Prosesnya adalah kelapa basah disusun dalam lemari oven yang telah tersedia, kemudian dipanasi dalam kondisi tertutup, ke dalam ruangan ini dialirkan panas dengan suhu 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Panas dihasilkan dari pembakaran biomassa yang menghasilkan asap dan panas, kemudian dialirkan oleh blower untuk mengaliri oven pengering kopra. Untuk teknik pengovenan ini belum secara umum dipahami para pengolah kopra mungkin hanya tingkat PT yang dapat melakukan teknik ini dalam skala besar.

4.3. Forum Kegiatan

Forum kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh anak KKN Kelurahan Sungai Salak sebagai wadah diskusi untuk pembagian ilmu dalam pengolahan kopra putih. Dengan berdiskusi kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman-pengalaman. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan atau pendapat antara dua orang atau lebih. Dalam forum kegiatan peneliti menghadirkan narasumber yang dapat memberikan gagasan atau pendapat mengenai pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat petani kelapa dalam memenuhi spesifikasi kopra putih yang berstandar ekspor Di Kelurahan Sungai Salak. Forum Kegiatan ini dilakukan kepada petani Kelapa yang berada di Kelurahan Sungai Salak ketika metode wawancara telah dilaksanakan dan menurut peneliti ini menjadi acuan yang perlu di laksanakan dalam kegiatan ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran dari penulisan ini adalah:

1. Banyaknya masyarakat di Kelurahan Sungai Salak yang masih banyak belum memahami cara pengolahan kopra putih, dan banyak masyarakat tidak berani membuat kopra putih karena tidak adanya kepastian harga jual kopra putih.
2. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan wawancara di penampung kopra putih di Parit Jamrah yaitu kopra tidak mencapai kadar air kopra putih di angka 5 % tetapi di kisaran 10-15 %, ini juga menjadi pengaruh dari faktor lingkungan dan sistem kerja, dan juga pengaruh suhu dan proses pengeringan hingga berdampak pada harga jual kopra putih itu sendiri.
3. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan wawancara di penampung kopra putih di Parit Jamrah yaitu kopra tidak mencapai kadar air kopra putih di angka 5 % tetapi di kisaran 10-15 %, ini juga menjadi pengaruh dari faktor lingkungan dan sistem kerja, dan juga pengaruh suhu dan proses pengeringan hingga berdampak pada harga jual kopra putih itu sendiri.
4. Setelah beberapa kali penulis melihat pengolahan kopra putih dan melakukan penelitian di kelurahan sungai salak, beberapa faktor penentu penunjang keberhasilan pengolahan kopra putih sendiri berada di sistem kerja, lingkungan, dan faktor lainnya. Suhu dan proses pengeringan juga menjadi faktor lainnya untuk mendapatkan kopra putih yang berstandar ekspor.
5. Perlu nya sarana BUMDES untuk melanjutkan program ini agar masyarakat bisa terabantu pada sistem penjualan, sehingga masyarakat bisa meningkatkan perekonomiankeluarganya.
6. Perlu adanya kerja sama anatara pemerintah desa dengan pengusaha-pengusaha kopra putih atau juga kopra asalan sehingga masyarakat Kelurahan Sungai Salak memiliki jaminan untuk penjualan kopra dan bisa beralih menjadi petani kopra putih.
7. perlu adanya penelitian lebih lanjut agar kedepannya hasil kopra yang dihasilkan bisa berstandar ekpor perlu nya mengenai pembahasan suhu dan pengeringan dan juga pada proses pengolahan kopra itu sendiri, untuk saran yang bisa peneliti bagi perangkat desa dan juga masyarakat Kelurahan Sungai Salak yaitu perlu nya adanya komunikasi yang berkelanjutan dengan pengusaha kopra yang berada di Inhil agar terbukanya peluang masyarakat untuk menjual hasil pengolahannya.
8. Sedangkan, untuk petani atau masyarakat di Sungai Salak untuk bisa terus dan membuka pengetahuan tentang pengolahan kelapa agar masyarakat tidak menjual kelapa bulat lagi yang membuat ekonomi masyarakat turun.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Berutu,Thomson. 2008. Analisis Manajemen Strategi Giant dalam Menghadapi Persaingan Ritel di Kota Bogor. Fakultas Pertanian Industri Pertanian Bogor

[2]. Amir Solihin, Muhammad dan Sudirja, Rija. 2007, Pengelolaan Sumber Data Alam Secara Terpadu Untuk Meperkuat Perekonomian Lokal.

[3]. Kotler Philip, Susanto A. B, 2000, Manajemen Pemasaran di Indonesia (Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian), Salemba Empat. Jakarta.

[4]. Kotler Philip, 1998, Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencananaan, Implementasi, dan Kontrol). PT, Prenhallindo, Jakarta.

[5]. Setyamidjaja, Djoehana. 2008. Teh Budidaya dan Pengolahan Pascapanen, Yogyakarta: Kanisius.

[6]. Warisno 2003 dalam Tuna 2013. Analisis Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kelapa Dalam Di Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. e-J. Agrotekbis 4 (2) :210-216, April 2016.

POTENSI SAGU (METROXYLON SP.) DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU

Syartiwidya[1]
[1]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

Email: widyaipbgma2015@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Riau Province has a large potential for sago (Metroxylon sp). This is indicated by an area of 84,780 hectares and a production of 260,658 tons/year (Riau Plantation Office, 2020). The use of sago starch is still limited as a staple food for certain communities. Sago with a high nutritional content of carbohydrates equivalent to rice is an all-around plant, which means a plant that has many benefits. Besides sago can reducing dependence on imported flour, rice imports are also used as food ingredients that are processed into various forms of processed food, as well as non-food ingredients. such as renewable energy sources, namely bioethanol and pharmaceutical industry materials. Sago waste also provides many benefits, such as bark as flooring for houses, roads, and firewood, midrib as roofs, and pith pulp as animal feed, adhesives, charcoal briquettes, board particles, and composting materials. Optimizing the utilization of sago potential if it can be applied through food diversification efforts will open up economic activities and support food security in Riau Province.

Keywords: *sago, food security, optimalization*

Abstrak

Provinsi Riau memiliki potensi sagu (Metroxylon sp) yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh luas area seluas 84.780 Ha dan produksi sebesar 260.658 ton/tahun (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2020). Pemanfaatan pati sagu masih terbatas sebagai pangan pokok masyarakat tertentu. Sagu dengan kandungan gizi tinggi karbohidrat setara beras tersebut merupakan tumbuhan serba gatra yang artinya tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat. Selain sagu dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor terigu, impor beras juga sebagai bahan pangan yang diolah menjadi berbagai bentuk olahan pangan, serta juga sebagai bahan non pangan seperti sumber energi terbarukan, yaitu bioetanol dan bahan industri farmasi. Limbah sagu juga memberikan banyak manfaat, seperti kulit batang sebagai lantai rumah, jalan dan kayu bakar, pelepah sebagai atap rumah, dan ampas empulur sebagai pakan ternak, bahan perekat, brikat arang, papan partikel dan bahan pembuat kompos. Optimalisasi potensi sagu ini bila dapat diterapkan melalui upaya penganekaragaman pangan yang akan membuka kegiatan ekonomi dan mendukung ketahanan pangan di Provinsi Riau.

Kata kunci: *sagu, ketahanan pangan, optimalisasi*

1. PENDAHULUAN

Potensi sagu dilihat dari konsumsinya sebagai pangan lokal, diharapkan dapat diolah dalam berbagai bentuk olahan sehingga konsumsi sagu dan olahannya meningkat dan dalam jangka pangan dapat mengurangi tingginya impor terigu (8.1 juta ton) dan tingginya konsumsi beras (114 kg/kap/tahun). Sagu dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang diolah dari pati sagu menjadi berbagai makanan seperti mi sagu, lempeng sagu, sempolet, kerupuk sagu, bihun, cendol sagu, gobak, ongol-ongol dan lain-lain. Pati sagu yang telah diolah umumnya dikonsumsi sebagai pangan pokok bersama dengan lauk lainnya oleh sebagian masyarakat maupun sebagai pangan selingan dalam bentuk berbagai macam olahan. Keberhasilan pemanfaatan potensi sagu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu daya terima masyarakat, akses, nilai ekonomis (harga) dan produksi sagu yang cukup, serta upaya promotif menjadikan sagu sebagai salah satu pangan sumber karbohidrat alternatif selain beras [6].

Sagu dilihat dari potensi produksi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki prospek pengembangan yang cukup bagus di Indonesia. Beberapa daerah penghasil sagu yaitu Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan dan Riau (BPS 2012). Luas areal sagu di Provinsi Riau pada tahun 2015 mencapai 82.713 Ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 62.513 Ha (75.57%) dan perkebunan besar swasta seluas 20.200 Ha (24.43%) [6]

Tanaman sagu merupakan penghasil pati terbesar yang menghasilkan produksi pati tinggi dalam setiap hektar tanaman sagu. Setiap batang bisa memproduksi sekitar 200 kg tepung sagu basah per tahun, atau 25 hingga 30 ton per Ha. Indonesia salah satu negara yang memiliki luas areal tanaman sagu terluas di dunia, yaitu sekitar 5.2 juta hektar atau sekitar 50 persen areal sagu di dunia [5].

Sagu sangat potensial dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan didayagunakan bagi pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, serta dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia selain beras. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 94 tahun 2013 tentang SOP sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman sagu, dan Perpres No. 22 tahun 2009 tentang kebijakan penganekaragamn konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dasar hukum tersebut mendukung pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), dimana diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kemandirian pangan dapat tercapai dengan menggerakkan sumber daya manusia melalui upaya penganekaragaman pangan, selain upaya dalam keberpihakan kepada petani dan kebijakan yang kondusif bagi sektor pertanian dan perdagangan [5]. Terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan akan menciptakan kemandirian pangan. Sistem pangan yang berkelanjutan akan mendukung ketahanan pangan, melalui penggunaan secara optimal sumber daya alam dan manusia, dapat diterima dan mudah diakses, ramah lingkungan, dan memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, aman, sehat dan tersedia untuk sekarang dan masa yang akan datang. Rancangan dan implementasi kebijakan perbaikan ekonomi, lingkungan dan sosial melalui perbaikan rantai pangan, yaitu melalui perbaikan produksi dan konsumsi dibutuhkan dalam upaya mencapai ketahanan pangan berkelanjutan dan kemendirian pangan [7].

2. TANAMAN SAGU DAN POTENSINYA

2.1. Tanaman Sagu

Tanaman Sagu (Metroxylon sp) yang tergolong dalam kelompok palmae banyak tumbuh diwilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Tanaman sagu yang merupakan salah satu tanaman sumber karbohidrat yang berasal dari pati. Pati sagu yang dihasilkan dari hasil ekstraksi empulur/batang sagu bebas dari bahan kimiawi, merupakan ingridien alami, layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet setiap hari dan memiliki fungsi tertentu dalam metabolisme tubuh [11].

Dalam setiap rumpun sagu terdapat 1-8 batang, pada setiap pangkal batang tumbuh 5-7 batang anakan. Batang sagu berbentuk silinder yang berfungsi untuk mengakumulasi/menumpuk karbohidrat dengan tinggi 10-15 meter rangkaian yang keluar dari ujung batang, berbentuk manggar secara rapat berukuran kecil-kecil berwarna putih, berbentuk seperti bunga kelapa jantan dan tidak berbau. Sagu mulai berbunga 8-15 tahun tergantung pada kondisi tanah, tinggi tempat dan varietas dan diameter 35-40 cm. Komponen dominan dari sagu adalah pati atau karbohidrat. Pati berupa butiran atau granula yang berwarna putih mengkilat, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa [5].

Tanaman sagu disebut tumbuhan serba gatra, artinya tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat. Selain sagu memiliki kandungan gizi tinggi karbohidrat setara beras sehingga menjadi bahan pangan yang diolah menjadi berbagai bentuk olahan pangan, juga sebagai sumber energi terbarukan, yaitu bioetanol. Sebagai bahan pangan sagu dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor terigu, impor beras, dan sebagai bahan non pangan sagu juga dapat mengurangi impor bahan untuk industri farmasi. Selain itu sebagai non pangan, limbah sagu juga memberikan banyak manfaat, seperti kulit batang sebagai lantai rumah, jalan dan kayu bakar, pelepah sebagai atap rumah, dan ampas empulur sebagai pakan ternak, bahan

perekat, brikat arang, papan partikel dan bahan pembuat kompos. Manfaat lain sagu juga bagi lingkungan sebagai pengatur tata air tanah mengatur serapan air, dan pengendalian pemanasan global atau kebakaran hutan [10].

Pati sagu memiliki sifat-sifat yang menguntungkan. Kandungan lemak dan proteinnya relatif kecil (< 5 %). Kadar pati dan amilosanya relatif tinggi (98.12 dan 26.19 %). Amilosa merupakan polimer rantai lurus gkulosa yang dihubungkan oleh ikatan α-(1,4)-glikosidik. Amilopektin merupakan gula sederhana, bercabang dan berstruktur terbuka dan ikatan α-(1,6)-glikosidik. Kandungan amilosa yang lebih tinggi menyebabkan pencernaan menjadi lebih lambat, karena rantai tidak bercabang sehingga struktur lebih kristal dan ikatan hidrogen lebih kuat, sehingga sukar dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan [13]. Kadar amilosa yang tinggi memperlambat pencernaan pati hingga menyebabkan GI rendah [2].

2.2. Potensi Sagu Mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah, seperti tertuang di dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dua kelompok indikator ketahanan pangan yaitu indikator proses yang menggambarkan situasi pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses pangan, indikator dampak meliputi indikator langsung dan tidak langsung. Output dari ketahanan pangan adalah status gizi, kesehatan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Kebijakan dan politik berhubungan langsung dengan ketersediaan sumber daya. Dalam merancang program pengembangan sumber daya diperlukan analisis sumber daya pangan wilayah untuk mengetahui potensi dan hambatan disuatu wilayah dengan memperhatikan daya dukung wilayah [3].

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia diyakini dapat digerakkan dalam pencapaian ketahanan pangan melalui upaya penganekaragaman pangan. Keberpihakan kepada petani dan kebijakan yang kondusif bagi sektor pertanian dan perdagangan akan mendorong tercapainya kemandirian pangan [3]. Ketahanan pangan yang berkelanjutan akan menciptakan kemandirian pangan. Sistem pangan yang berkelanjutan akan mendukung ketahanan pangan, melalui penggunaan secara optimal sumber daya alam dan manusia, dapat diterima dan mudah diakses, ramah lingkungan, dan memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, aman, sehat dan tersedia untuk sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan suatu rancangan dan implementasi kebijakan perbaikan ekonomi, lingkungan dan sosial melalui perbaikan rantai pangan, yaitu melalui perbaikan produksi dan konsumsi [5].

Konsep sistem pangan dan gizi berkaitan dengan ketersediaan, akses, gizi yang cukup serta kaitan ketiga komponen tersebut, sehingga pangan, gizi dan kesehatan menjadi tujuan utama didalam pertanian dan sistim pangan berkelanjutan [6]. Masalah gizi merupakan tantangan dalam ketahanan pangan yang sering dilupakan, namun tanpa meletakkan masalah gizi dalam standar yang layak untuk diimplikasikan, maka pencapaian ketahanan pangan secara global akan sulit diraih [10].

Tantangan lain ketahanan pangan adalah adanya keragaman sumber daya alam, keragaman hayati serta berbagai jenis makanan tradisional yang dimiliki oleh seluruh wilayah di Indonesia yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Implementasi kebijakan penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan [20]. Capaian penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal masih rendah ditandai dengan masih tingginya konsumsi terigu dan turunannya. Implementasi strategi penganekaragaman pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan sehingga ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan dapat tercapai. Untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan di masa yang akan datang membutuhkan ketersediaan aneka ragam bahan pangan selain beras. Selain itu kebijakan harga pangan dan ketersediaan akses pangan membutuhkan kebijakan lain yang mendukung, seperti pembangunan infrastruktur penunjang dan pendistribusian [4].

Saat ini strategi penganekaragaman pangan untuk menurunkan tingkat konsumsi beras yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu memanfaatkan sumber pangan domestik yang sangat kaya dan beragam, justru mengarah kepada produk berbasis terigu yang berasal dari gandum [3]. Sedangkan gandum tidak dapat diproduksi optimal di Indonesia, sehingga impornya semakin meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan meningkatnya

konsumsi produk berbasis terigu seperti mi dan roti. Tahun 2015 Indonesia terdata sebagai pengimpor gandum nomor dua di dunia setelah Mesir, yaitu 7 juta ton.

Sagu (Metroxylon spp) merupakan salah satu sumber pangan domestik yang potensial untuk dikembangkan sebagai pengganti gandum untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional. Pemanfaatan potensi sagu sebagai komponen ketahanan pangan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) diversifikasi produk olahan sagu agar beragam, bergizi, seimbang dan aman, (2) pertahankan dan perbaiki pola konsumsi pangan berbasis sagu, (3) mutu dan keamanan pangan agar terjamin, (4) pemanfaatan teknologi tepat guna, dan (5) usaha peningkatan nilai tambah melalui perbaikan dan peningkatan produk olahan berbasis sagu yang berdaya saing tinggi [4].

Sagu sebagai salah satu sumber daya lokal dapat berkontribusi sebagai pangan alternatif substitusi beras. Luasnya lahan sagu di Indonesia umumnya dan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani sagu. Karakteristik sosial ekonomi (umur, pendidikan formal dan pendidikan non formal) akan mempengaruhi prilaku sosial dan ekonomi pengelola sagu dalam pemanfaatan sagu. Selain itu lama berusaha, motivasi usaha dan skala usaha akan mempengaruhi tingkat konsumsi sagu dan kapasitas pengelola sagu dalam mengolah sagu [25].

Sagu sangat potensial untuk mendukung kemandirian pangan Indonesia. Potensi produksi sagu di Indonesia mencapai 5 juta ton/tahun, namun pada saat ini tingkat produksinya baru mencapai + 210.000 ton/tahun. Luas hutan sagu di Indonesia mencapai sekitar 1,1 juta hektar atau + 50 persen dari sagu dunia yang tersebar di Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Riau.

Sagu mempunyai keunggulan komparatif untuk diversifikasi pangan. Kandungan gizi sagu setara dengan beras, namun mempunyai beberapa keunggulan dibanding beras dan komoditas pangan lain, yaitu: a) Komponen pati sagu kering mencapai 25-30 ton/ha/ta hun, sedangkan beras dan jagung hanya berkisar antara 5-6 ton/ha/tahun, b) Sagu mempunyai beberapa manfaat yang baik bagi tubuh, diantaranya tidak cepat meningkatkan kadar glukosa dalam darah, mampu meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko terjadinya kanker usus, mengurangi resiko terjadinya kanker paru-paru, mengurangi kegemukan, mempermudah buang air besar [11].

Beras sebagai salah satu jenis pangan yang menempati posisi paling strategis diantara jenis pangan lainnya, sehingga ada tuntutan masyarakat agar kebutuhan beras dapat terpenuhi. Peningkatan permintaan beras tidak seimbang dengan ketersediaan dalam negeri, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama ini dilakukan melalui impor beras. Sementara tanaman pangan sumber karbohidrat lain seperti sagu, jagung, aneka umbi (ubi kayu, ubi jalar, talas) dan buah (sukun, pisang) belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, ketahanan pangan nasional berkelanjutan semakin sulit dipertahankan [14].

Beberapa karakter yang dimiliki oleh pangan alternatif substitusi beras adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kandungan energi dan protein yang cukup tinggi sehingga apabila harga bahan pangan tersebut dihitung dalam kalori atau protein nabati, maka perbedaannya tidak terlalu jauh dibandingkan beras;
2. Memiliki peluang yang besar untuk dikonsumsi dalam kuantitas yang relatif tinggi sehingga apabila terjadi penggantian konsumsi beras dengan bahan pangan alternatif tersebut dapat dipenuhi;
3. Bahan baku untuk pembuatan bahan pangan alternatif cukup tersedia di daerah sekitarnya;
4. Dari segi selera, bahan pangan alternatif memiliki peluang cukup besar untuk dikonsumsi secara luas oleh rumah tangga konsumen.

Berdasarkan karakter yang terdapat pada sagu, maka sagu dapat dijadikan pangan alternatif substitusi beras yang baik, sehingga bila dioptimalkan pemanfaatannya baik cara budibaya dan teknologi pengolahannya maka akan dapat menurunkan konsumsi beras. Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sagu sebagai primadona pangan lokal di berbagai daerah olahan sagu telah dihasilkan melalui teknologi sederhana yang terdapat di industri skala rumah tangga. Beberapa contoh produk olahan sagu yang telah dikembangkan namun hanya skala industri

kecil atau rumah tangga antara lain seperti: 1) industri pembuatan tepung sagu, 2) Mie sagu, 4) Makaroni sagu 5) Sagu rendang. 6) Sempolit atau keperun (masakan yang terbuat dari dari tepung sagu yang dimasak dengan dengan sayur-sayuran seperti pakis dan kangkung), 7) Kue bangkit, 8) Kerupuk sagu dan lain-lain [17].

Dalam perspektif diversifikasi pangan, sagu dapat diolah menjadi berbagai bentuk macam olahan yang menarik. Pati sagu dapat diolah menjadi berbagai bentuk pangan tradisional antara lain di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, sagu biasa diolah menjadi mie sagu basah, kepurun atau sempolet, ongol-ongol, lempeng sagu dan penganan lainnya yang terbuat dari sagu. Namun pemanfaatan sagu dengan memperhatikan fungsi fungsionalnya dalam menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan kebugaran belum diperhatikan. Sehingga sagu masih menjadi pangan terbelakang atau inferior, walaupun sagu sudah dikenal dari zaman nenek moyang.

2.3. Potensi Produksi

Indonesia memiliki luas lahan sagu terbesar di dunia. Dari 6,5 juta ha lahan sagu di seluruh dunia, sebesar 5,4 juta ha berada di Indonesia dan lebih dari 95 persen terfokus di wilayah Papua (5,3 juta ha). Potensi pengembangan lahan sagu di Indonesia baru dimanfaatkan sekitar 6 persen dengan produksi tidak lebih dari 500.000 ton, dimana sebagian besar diproduksi di Provinsi Riau (80 persen) dan lebih dari 95 persen pengusahaan sagu berasal dari perkebunan milik rakyat.

Areal sagu di Provinsi Riau terdapat di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis, Siak dan Pelalawan. Kabupaten yang memiliki area terluas yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas 39.951 Ha dan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kabupaten penghasil sagu terbesar kedua di Provinsi Riau menghasilkan sagu sebanyak 13.564 ton/Ha [8]. Hal ini karena sagu tumbuh dengan baik di daerah rawa seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir. Tanah rawa mengandung air tanah coklat yang mengandung zat organik tersuspensi atau terlarut yang merupakan sumber energi penting bagi mikroorganisme. Sagu membutuhkan tanah yang kaya akan bahan mineral dan organik, dan di tanah rawa sagu akan menghasilkan pati lebih banyak namun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk di panen [16].

Luas areal sagu di Riau pada tahun 2020 mencapai 82 713 Ha,yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 62 513 Ha (75.57%) dan perkebunan besar swasta seluas 20 200 Ha (24.43%) [6]. Produksi sagu di Provinsi Riau terdapat di 5 kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.

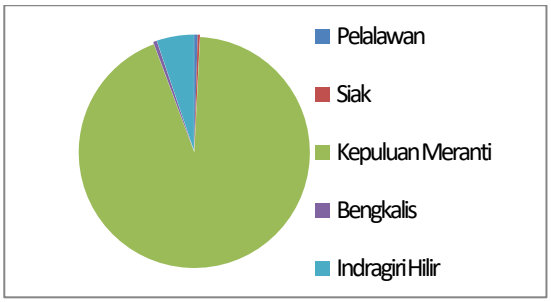

(Sumber Data Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020)

Gambar 1. Produksi Sagu di Provinsi Riau

Gambar 1 menunjukkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten kedua yang memiliki areal terluas di Provinsi Riau. Sebanyak 3,03 persen dari 594.433 hektar lahan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir ditanam dengan pohon sagu, umumnya banyak terdapat dibagian utara seperti Kecamatan Gaung Anak Serka, Mandah dan Kecamatan Pelangiran.

Tanaman sagu dinilai mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah setempat. Perkembangannya pengelolaan tanaman sagu di Kabupaten Indragiri Hilir masih sagu hutan yang tumbuh sendiri, seperti di Papua. Usaha intensifikasi sagu diperlukan guna meningkatkan produksi, seperti penanaman bibit sagu dengan varietas unggul yaitu varietas yang cepat menghasilkan dan produktitas tinggi [16].

2.4. Potensi Konsumsi

Konsumsi sagu Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,4-0,5 kg/kapita/tahun sedangkan konsumsi beras cukup besar hingga 95 kg/kapita/tahun dan konsumsi tepung terigu meningkat tajam hingga 10-18 kg/kapita/tahun. Upaya mengoptimalkan pemanfaatan sagu sebagai primadona pangan lokal di berbagai daerah, telah menghasilkan olahan sagu melalui teknologi sederhana yang terdapat di industri skala rumah tangga. Beberapa contoh produk olahan sagu yang telah dikembangkan antara lain seperti: (1) tepung sagu, (2) Mi

sagu, (3) Makaroni sagu (4) Sagu rendang. (5) Sempolit atau keperun (masakan yang terbuat dari dari tepung sagu yang dimasak dengan dengan sayur-sayuran seperti pakis dan kangkung), (6) Kue bangkit, (8) Kerupuk sagu dan lain-lain [14].

Pangan berbasis sagu yang memiliki potensi kadar GI rendah adalah mi dan beras analog sagu. Fakta ini menjadi peluang dan kekuatan terhadap pengembangan pangan berbasis sagu meski pangan dari sagu dari sisi komposisi gizi rendah protein dan lemak, kekurangan gizi tersebut diatasi dengan menambahkan protein dan lemak dari luar pada saat mengonsumsi [8]. Pangan berbasis sagu yang banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berbentuk mi, kandungan gizinya tidak kalah dari mi terigu (Tabel 1).

Tabel 1. Kandungan gizi mi sagu dan mi terigu setiap 100 g

No	Komposisi (%)	Mi terigu	Mi sagu
1.	Kadar air	3,50	9,04
2.	Kadar abu	2,13	2,08
3.	Kadar protein	10,00	0,08
4.	Kadar lemak	21,43	0,01
5.	Kadar pati	61,43	88,89
6.	Kadar serat kasar	2,85	0,477
7.	Kadar Pati resisten	0,90	4,5
8.	Kadar indeks glikemik	48	28
9.	Kadar gluten	Tinggi	Bebas gluten

Tabel 1 menunjukkan mi sagu kandungan protein dan lemak rendah dibanding mi terigu. Mi sagu memiliki kelebihan terhadap kandungan pati resisten yang nilainya hampir lima kali lebih besar dibanding pati resisten mi terigu. Artinya bila mengonsumsi mi sagu akan kenyang lebih lama karena karbohidrat tercerna secara lambat [8]. Mi sagu mampu memberikan kontribusi sekitar 7 persen terhadap pemenuhan energi bagi orang dewasa, anak SD dan ibu rumah tangga [13].

Karbohidrat dikandung sagu yang setara beras tidak berbahaya seperti yang terdapat pada beras, karena tidak memiliki efek negatif bagi usus, memiliki resisten starch yang dapat menjadi prebiotik bagi usus sehingga dapat memperlancar pencernaan. Mengkonsumsi sagu setiap hari secara rutin dapat menjaga kesehatan terutama bagi penderita diabetes [14]. Aktivitas antioksidan pada sagu , yaitu mengandung senyawa fenolik, flavonoid dan tanin terkondensasi serta menunjukkan aktivitas penangkal radikal bebas. Total antioksidan dan kemampuan mereduksi pada sagu yaitu senyawa fenolik, flavanoik dan tanin pada sagu segar lebih tinggi daripada pada sagu kering [24].

2.5. Potensi Ekonomi

Komoditi pangan yaitu beras menempati posisi paling strategis diantara jenis pangan lainnya.Tingginya tuntutan masyarakat akan kebutuhan beras tidak diimbangi dengan ketersediaan dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama ini dilakukan melalui impor beras. Sementara tanaman pangan sumber karbohidrat lain seperti sagu, jagung, aneka umbi (ubi kayu, ubi jalar, talas) dan buah (sukun, pisang) belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, ketahanan pangan nasional berkelanjutan semakin sulit dipertahankan [9]. Untuk jangka panjang, kebijakan pembatasan impor beras dapat dikurangi secara bertahap dengan peningkatan produksi domestik dan upaya penganekaragaman konsumsi pangan sehingga mengurangi tekanan akan kebutuhan pada beras, yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya lokal dan agroindustri non beras.

Sagu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, selain sebagai sumber pangan juga banyak digunakan sebagai sumber non pangan. Sebagai sumber pangan diolah menjadi berbagai makanan baik makanan pokok ataupun selingan. Sebagai sumber non pangan seperti sebagai biofuel atau sumber energi alternatif baru. Pengembangan biofuel yakni bioetanol sangat prospektif bagi tersedianya energi pada daerah penghasil sagu. Keuntungan finansial dari pengusahaan bioetanol sagu dapat digambarkan yaitu harga pati Rp. 4.000/kg apabila diolah menjadi bioetanol absolut dengan harga 10.000/l dengan biaya total sebesar Rp 8.000/l maka akan diperoleh laba bersih Rp 2.000/l. Apabila satu batang sagu dapat menghasilkan 300 kg pati maka harga jual pati Rp 1.200.000 dan akan dihasilkan 150 liter bioetanol. Dengan perhitungan tersebut maka akan diperoleh laba bersih untuk setiap pengolahan satu pohon sagu yaitu sebesar Rp 300.000 [22].

Pati sagu telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan ringan, kosmetik, pakan ternak, HFS (high fructose syrup), biogas. Ampas sagu diolah lebih

lanjut menjadi produk-produk ramah lingkungan seperti plastik organik. Limbah sagu sebanyak 50-100% sebagai amelioran dan herbisida nabati pada tanaman perdu dapat meningkatkan kandungan senyawa fenolat dalam proses dekomposisi, dan menurunkan total C-mikroorganisme dan fungi, sehingga memiliki daya herbisida terhadap tanaman perdu, selain itu sebagai mulsa dapat memperbaiki sifat kimia, fisika dan biologi tanah [22]. Melalui proses fraksinasi dan asetilasi limbah sagu menghasilkan bahan campuran plastik sintetik, lebih mudah di degradasi oleh mikroba Aspergilus.sp [26]

Agroindustri sagu mempunyai peluang besar untuk dikembangkan dilihat dari ketersediaan lahan, geografis, dan ketersediaan bahan baku, hendaknya didukung oleh subsistem agribisnis lainnya yaitu teknologi, kemitraan dan kebijakan pemerintah (pembangunan infrastutur, akses terhadap permodalan, pembinaan kewirausahaan dan promosi pasar dalam mengatasi fluktuasi harga) yang mendukung [23]. Sagu merupakan komoditas unggulan pertanian (KUP) yang spesifik layak diangkat dan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pendekatan analisis kebijakan berdasarkan potensi dan keunikannya [13].

Agroindustri komoditas non beras sebaiknya dibangun di pedesaan guna membuka kesempatan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mengingkatkan kualitas hidup dan mutu gizi masyarakat. Makin meningkat daya beli masyarakat akan berpengaruh pada : (1) keragaman jenis pangan yang dikonsumsi, (2) makin banyak pangan bergizi tinggi yang dikonsumsi, dan (3) makin berkurang pendapatan untuk beras sehingga mengurangi ketergantungan pangan impor [9]. Berdasarkan karakter yang terdapat pada sagu, maka sagu dapat dijadikan pangan alternatif substitusi beras yang baik, sehingga bila dioptimalkan pemanfaatannya baik cara budidaya dan teknologi pengolahannya maka akan dapat menurunkan konsumsi beras [18].

Subsistem agroindustri sagu lebih mengarah kepada pengelolaan hasil dalam bentuk pati sagu baik basah maupun kering yang dilakukan di kilang-kilang sagu baik milik perorangan ataupun perusahaan. Ketersediaan produksi tidak terlepas dari daya dukung lahan. daya dukung lahan merupakan kemampuan lahan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama bahan makanan. Tingkat daya dukung lahan pertanian dapat dihitung dengan membandingkan luas panen tanaman pangan perkapita dengan luas lahan untuk swasembada pangan [16].

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sagu baik dari produksi maupun sektor hilir yaitu industri olahan sagu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor pertanian. PDRB merupakan indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah, yang dapat diketahui dengan 3 pendekatan, yaitu (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pendapatan dan (3) pendekatan pengeluaran (Prishardoyo 2008). Untuk mengetahui PDRB dapat dilakukan dengan pendekatan elastisitas, yaitu dengan membandingkan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan elastisitas PDRB, sehingga diperoleh posisi fiskal daerah [21]

PENUTUP

Sagu sebagai salah satu sumber daya lokal dapat berkontribusi sebagai pangan alternatif substitusi beras. Sagu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, selain sebagai sumber pangan juga banyak digunakan sebagai sumber non pangan. Sebagai sumber pangan berupa pati sagu yang diolah menjadi berbagai makanan baik makanan pokok ataupun selingan. Sebagai sumber non pangan seperti sebagai biofuel atau sumber energi alternatif baru. Melihat dari luas area dan produksinya, sagu dapat menjadi alternatif pangan sumber karbohidrat dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abd-Aziz S. 2002. Sago Stasch and its utilisation. *Journal of Bioscience and Bioenineering.* 94(6):526-529

[2] Arif AB, Budiyanto, Hoeruddin. 2013. Nilai indeks glikemik produk pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. J.Litbang Pert. 32(3):91-99
[3] Apdita F, Yayuk B. 2012. Ketahanan pangan di Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2010. Jurnal Gizi dan Pangan. 7(2):57-64.
[4] Azahari DH. 2008. Membangun kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Analisis Kebijakan Pertanian. 6(2):174-195
[5] Bintoro HMH. 2016. Sagu untuk kemajuan Indonesia. Makalah pada Seminar Ilmiah dan Lokakarya Nasional Sagu. 9-10 November 2016. Bogor
[6] Ballayram, Beverly L, Fitzroy H. 2015. Food security and health ini the Caribbean imperatives for policy implementation. Journal of Food Security. 3(6):137-144.
[7] Capone R, Hamid El B, Philipp D, Gianluigi C, Noureddin D. 2014. Food system sustsinsbility and food security: connecting the dots. Journal of Food Security. 2(1):13-22.
[8] Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2020. Statistik Perkebunan Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Riau
[9] Elizabeth R. 2011. Strategi pencapaian diversifikasi dan kemadirian pangan: antara harapan dan kenyataan. Iptek Tanaman Pangan. 6(2):230-241
[10] Fanzo J. 2015. Ethical issue fpr human nutrtion in the context of global food security and sustainable develompent. Global Food Security. 7(1):15-23.
[11] Flach. 1997. Sago palm: Metroxylon sagu rottb. Promotion the conservation and use of underutilized and neglected crops. International Plant Genetics Resource Institute, IPGRI. Roma Italy
[12] Hariyanto B. 2014. Perkembangan teknologi produk pangan berbasis sagu guna mendukung ketersediaan pangan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Serpong
[13] Ikhsan dan Atahnan. 2011. Jurnal Agribisnis Perdesaan. Vol.1. No.3. 166-177
[14] Karim AA, Pei-Lang Tie A, Manan DMA, Zaidun ISM. 2008. Starch from the Sago (Metroxylon sagu) Palm Tree-Properties, Prospect, and Challenges as a New Industrial Source for Food and Other Uses. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 7(3):215-228
[15] Louhenapessy JE, M Lukuhay. 2014. Sagu tumbuhan serba gatra. Makalah Seminar Nasional Agroforestri ke –V. Ambon, Maluku 20-21 November 2014
[16] Moniaga VRB. 2011. Analisis daya dukung lahan pertanian. ASE. 7(2):61-68
[17] Notohadiprawiro, T dan Louhenapessy, JE. 2006. Potensi Sagu dalam Penganekaragaman Pangan Pokok ditinjau dari Prasyarat Lahan. Makasal Simposisum Sagu Nasional. Diselenggarakan oleh UNPATTI, Pemda Tk I Maluku dan BPPT, Ambon. 12-13 Oktober 2006.
[18] Papilaya EC. 2008. Mewujudkan Ketahanan Pangan Organik Berbasis Nilai Kearifan Lokal. Prosiding Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Hal:161-169
[19] Purwani EY. 2012. Penghambatan proliferasi sel kanke kolon HCT-116 oleh produk fermentasi pati resisten tipe 3 sagu dan beras. Sekolah Pascarasjana Institut Pertanian Bogor [Disertasi].
[20] Rachman HPS, Mewa A. 2008. Penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia: permasalahan dan implikasi untuk kebijakan dan program. Analisis Kebijakan Pertanian. 6(2):140-154.
[21] Rimbawan, Siagian A. 2004. Indeks Glikemik Pangan. Penebar Swadaya, Jakarta.
[22] Sumarsono H. 2009. Analisis kemandirian otonomi daerah: kasus Kota Malang (1999-2004). JESP. 1(1):13-26
[23] Syakir M, Elna K. 2013. Potensi tanaman sagu (metroxylon spp) sebagai bahan baku bioenergi. Prespektif. 12(2):57-64
[24] Tarigan EP, Lidya IM, Edi S. 2015. Karakterisasi dan aktivitas antioksidan tepung sagu baruk. Jurnal MIPA Unsrat online. 4(2):125-130.
[25] Tahitu EM. 2015. Pengembangan kapasitas pengelola sagu dalam peningkatan pemanfaatan sagu di Maluku Tengah Provinsi Maluku. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor[Disertasi].
[26] Yuliasih I, Irawadi TT, Sailah I, Pranamuda H. 2007. Pengaruh proses fraksinasi pati sagu terhadap karakateristik pati amilosanya. J.Tek.Ind.Pert.17(1): 29-36

Penerbit
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

e-ISSN 2620-3332
9 772620 333004

ISSN 2442-7845
9 772442 784008